

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN  
PENDAPATAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN  
(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**DHIA NADHIFAH**

**145020101111073**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**KONSENTRASI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)"

Yang disusun oleh :

Nama : Dhia Nadhifah  
 NIM : 145020101111073  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **17 Desember 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.  
 NIP. 19631116 199002 1 001  
 (Dosen Pembimbing)
2. David Kaluge, SE., MS., M.Ec. Dev., Ph.D.  
 NIP. 19601225 198701 1 001  
 (Dosen Penguji I)
3. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec., Dev.  
 NIP. 19860801 201504 1 004  
 (Dosen Penguji II)

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



Malang, 19 Desember 2018  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan,

**Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.**  
 NIP. 19610411 198601 2 001



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan,  
dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan  
(Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)**

Yang disusun oleh :

Nama : Dhia Nadhifah  
NIM : 145020101111073  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 26 November 2018  
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.

NIP. 19650311 198903 2 001

Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.

NIP. 19631116 199002 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Dhia Nadhifah**  
 Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 29 September 1996**  
 NIM : **145020101111073**  
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**  
 Konsentrasi : **Keuangan Negara dan Daerah**  
 Alamat : **Desa Kenep RT.04/RW.01 Kecamatan Balen, Bojonegoro**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Desember 2018

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,

Yang membuat pernyataan,




Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.  
NIP 19631116199021001

Dhia Nadhifah  
NIM 145020101111073



Mengetahui,  
Ketua  
Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.  
NIP 196503111989032001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Dhia Nadhifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Asal : Jalan Baru No.78 RT.04/RW.01 Desa Kenep  
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Jawa



Telepon (HP) : 081259661696  
E-mail : [dhianadhifah929@gmail.com](mailto:dhianadhifah929@gmail.com)  
Pendidikan :  
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2014-2018)  
2. SMAN 3 Bojonegoro (2011-2014)  
3. SMPN 2 Balen (2008-2011)  
4. SDN Kenep II (2005-2008)  
5. SDN Sumpat I (2002-2005)  
6. TK Cendikia (2001-2002)

Pengalaman Organisasi :  
1. Staf Magang Divisi Marketing Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE) Tahun 2014.

Pengalaman Kepanitiaan :  
1. Staf Divisi Konsumsi PHOSE (*Photography School of Economics*) Tahun 2016 oleh HMJIE FEB UB.  
2. Staf Divisi Supervisor TRANSFORMER (*Transition of New Student for Maximizing Economic Role*) Tahun 2015 oleh HMJIE FEB UB.



## MOTTO

*Sebuah Perubahan Itu Tidak Akan Pernah Anda  
Dapatkan Bila Anda Terus Menunggu Waktu Yang Tepat.  
Sebenarnya Kitalah Si Makna Perubahan Itu.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015) dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan hingga selesai, telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. rer. Pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dalam memperbaiki konsep ide dan memberikan semangat serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan.
5. Bapak David Kaluge, SE., MS., M.Ec.Dev., Ph.D. dan Bapak Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev. selaku dosen penguji dalam ujian

komprehensif yang telah berbesar hati untuk meluangkan waktu dan memberikan masukan serta perbaikan dalam penulisan skripsi.

6. Para staf pegawai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
7. Keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat dan doa dalam proses penulisan skripsi hingga sekarang.
8. Teman-teman jurusan ilmu ekonomi angkatan 2014 yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis.
9. Serta semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak .

Malang, 19 Desember 2018

Penulis



**ABSTRAK****ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)****Dhia Nadhifah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

E-mail: dhianadhifah929@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran sektor pertanian, dan sektor industri terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi panel studi pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2009-2015. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, dan sektor industri, dengan variabel dependennya adalah kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan sektor industri berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

**Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, Sektor Pertanian, Sektor Industri.**

**ABSTRACT****ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, INCOME INEQUALITY, AND UNEMPLOYMENT ON POVERTY (A Study In 38 Regencies/Cities In East Java In The Period Of 2009-2015)****Dhia Nadhifah**

Faculty of Economic and Business University of Brawijaya

E-mail: dhianadhifah929@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of variables economic growth, income inequality, unemployment, agricultural sector, and industrial sector on poverty in 38 regencies and cities in East Java. This research is a type of quantitative research, and the data used was secondary data. The analysis technique used was regression of study panels in 38 regencies and cities in East Java with 2009-2015 observation periods. The independent variables used economic growth, income inequality, unemployment, agricultural sector, and industrial sector, with dependent variable being poverty. The result of this study show that economic growth has a positive and significant effect on poverty, income inequality has a positive and significant effect on poverty, unemployment has a positive and significant effect on poverty, agricultural sector has a positive and significant effect on poverty, and industrial sector has a not significant effect on poverty.

**Keywords: Poverty, Economic Growth, Income Inequality, Unemployment, Agricultural Sector, Industrial Sector.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	19
2.1.1 Pembangunan Ekonomi .....	19
2.1.2 Kemiskinan .....	20
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	30
2.1.4 Ketimpangan Pendapatan .....	44
2.1.5 Pengangguran .....	48
2.1.6 Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan .....	53
2.1.7 Peran Sektor Industri Dalam Pembangunan .....	56

2.2 Hubungan Antar Variabel .....	59
2.2.1 Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan .....	59
2.2.2 Keterkaitan Antara Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan ....	62
2.2.3 Keterkaitan Antara Pengangguran dan Kemiskinan .....	63
2.2.4 Keterkaitan Antara Sektor Pertanian dan Kemiskinan.....	64
2.2.5 Keterkaitan Antara Sektor Industri dan Kemiskinan .....	64
2.3 Penelitian Terdahulu .....	65
2.4 Kerangka Pemikiran .....	69
2.5 Hipotesis Penelitian .....	70

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	71
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	72
3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	72
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	74
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	77
3.6 Populasi dan Sampel .....	77
3.7 Metode Analisis dan Pengolahan Data .....	77
3.7.1 Penentuan Model .....	78
3.7.2 Pemilihan Model Estimasi .....	79
3.7.3 Pengujian Kesesuaian Model .....	81
3.7.4 Pengujian Statistik .....	82
3.7.5 Pengujian Asumsi Klasik .....	84

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	87
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian .....	93
4.2.1 Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur.....	93
4.2.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur .....	100
4.2.3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur .....	106

4.2.4	Kondisi Pengangguran Provinsi Jawa Timur .....	110
4.2.5	Kondisi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur .....	113
4.2.6	Kondisi Sektor Industri Provinsi Jawa Timur .....	117
4.3	Analisis Regresi Data Panel .....	118
4.3.1	Pemilihan Model Regresi Panel .....	118
4.4	Hasil Pengujian Regresi Panel .....	122
4.5	Hasil Pengujian Signifikansi .....	124
4.5.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	124
4.5.2	Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	125
4.5.3	Koefisien Determinasi ( <i>R-squared</i> atau $R^2$ ) .....	127
4.6	Pengujian Asumsi Klasik .....	128
4.7	Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian .....	132
4.7.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan .....	132
4.7.2	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan .....	138
4.7.3	Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	141
4.7.4	Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan .....	145
4.7.5	Pengaruh Sektor Industri Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	150
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	153
5.2	Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		xviii
<b>LAMPIRAN</b> .....		155

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2015 ( <i>dalam Miliar Rupiah</i> ) .....	5
Tabel 1.2 :	Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ).....	8
Tabel 2.1 :	Argumentasi Industrialisasi .....	58
Tabel 2.2 :	Pola Strategi Industrialisasi.....	58
Tabel 2.3 :	Penelitian Terdahulu.....	65
Tabel 3.1 :	Jenis Data, Sumber Data, dan Variabel Data.....	74
Tabel 3.2 :	Kerangka Identifikasi Autokorelasi.....	86
Tabel 4.1 :	Pencapaian Pembangunan Indikator Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan 2015 .....	91
Tabel 4.2 :	Pencapaian Pembangunan Indikator Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2015 .....	92
Tabel 4.3 :	Hasil Uji Chow .....	119
Tabel 4.4 :	Hasil Uji Hausman .....	120
Tabel 4.5 :	Hasil Uji Lagrange Multiplier .....	121
Tabel 4.6 :	Hasil Uji Regresi Panel Fixed Effect Model (FEM) .....	122
Tabel 4.7 :	Hasil Uji Multikolinearitas .....	130
Tabel 4.8 :	Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas .....	131
Tabel 4.9 :	Hasil Uji Asumsi Autokorelasi .....	132
Tabel 4.10 :	5 Kabupaten/Kota dengan Rata-Rata Kontribusi PDRB Tertinggi Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 .....	134
Tabel 4.11 :	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	135
Tabel 4.12 :	Perkembangan Pemerataan Pendapatan di Jawa Timur.....	140



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Tingkat Kemiskinan Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2015 (dalam Persen) .....	4
Gambar 1.2 :	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2015 (dalam Persen) .....	7
Gambar 1.3 :	Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2015 (dalam Persen) .....	9
Gambar 1.4 :	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen) .....	11
Gambar 1.5 :	Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 .....	13
Gambar 2.1 :	Lingkaran Setan Kemiskinan.....	26
Gambar 2.2 :	Paradigma Baru Kemiskinan.....	27
Gambar 2.3 :	Kurva 'U Terbalik' Kuznets .....	46
Gambar 2.4 :	Kurva Lorenz.....	47
Gambar 2.5 :	Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan .....	61
Gambar 2.6 :	Kerangka Pemikiran Teoritis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemsikinan.....	62
Gambar 2.7 :	Kerangka Pemikiran.....	69
Gambar 4.1 :	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen) .....	95
Gambar 4.2 :	Persentase Penduduk Miskin Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (dalam Persen) .....	96
Gambar 4.3 :	Persentase Penduduk Miskin Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (dalam Persen) .....	97
Gambar 4.4 :	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015.....	98
Gambar 4.5 :	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Desa dan Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2014 ...	99

Gambar 4.6 :	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	100
Gambar 4.7 :	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	102
Gambar 4.8 :	Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	103
Gambar 4.9 :	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	104
Gambar 4.10 :	Pertumbuhan Ekonomi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	105
Gambar 4.11 :	Pertumbuhan Ekonomi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	106
Gambar 4.12 :	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 .....	107
Gambar 4.13 :	Indeks Gini Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 .....	108
Gambar 4.14 :	Indeks Gini Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 .....	109
Gambar 4.15 :	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	111
Gambar 4.16 :	Tingkat Pengangguran Terbuka Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 .....	112
Gambar 4.17 :	Tingkat Pengangguran Terbuka Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 .....	113
Gambar 4.18 :	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	114
Gambar 4.19 :	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ) .....	115
Gambar 4.20 :	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 ( <i>dalam Persen</i> ).....	116

Gambar 4.21 : Hasil Uji Asumsi Normalitas .....	129
Gambar 4.22 : Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 .....	136
Gambar 4.23 : Delapan Kelemahan Pertanian di Indonesia.....	150





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan standar hidup, harga diri, dan kebebasan seluruh kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Yang mana tujuan dari program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh sesuai dengan alenia keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan pembangunan terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu wilayah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Arsyad, 1988).

Akan tetapi, arah dari pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya sekedar menaikkan pendapatan per kapita masyarakat saja melainkan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat (Kuncoro, 1997). Hal ini sejalan dengan pendapat Todaro dan Smith (2011) yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penyediaan lapangan kerja.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Bahkan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara berkembang saja, melainkan juga banyak dialami oleh negara-negara maju. Hal

ini tercermin pada Deklarasi *Millennium Development Goals* (MDG) yang telah disepakati oleh para anggota PBB pada tahun 2000. Dengan menjadikan kemiskinan dan pembangunan manusia sebagai fokus utamanya. Tujuan utama dari MDG yaitu berkaitan dengan upaya dalam pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah kebawah (*lower middle income*) tak luput dari masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 34 Ayat 1-4. Program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebab, tujuan dari program pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana individu (keluarga) atau sekelompok masyarakat tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang direpresentasikan oleh kebutuhan minimal dari standari hidup tertentu. Baik berupa sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan juga kesehatan. Seringkali kemiskinan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi, serta kualitas dari faktor produksi yang masih kurang memadai. Selain itu, disebabkan pula oleh kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah pembangunan masih kurang dan/atau belum sesuai dengan kemampuan dari masyarakatnya, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memperoleh atau merasakan manfaat dari proses pembangunan yang dihasilkan tersebut. Tingginya angka kemiskinan dapat memunculkan berbagai dampak, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi.



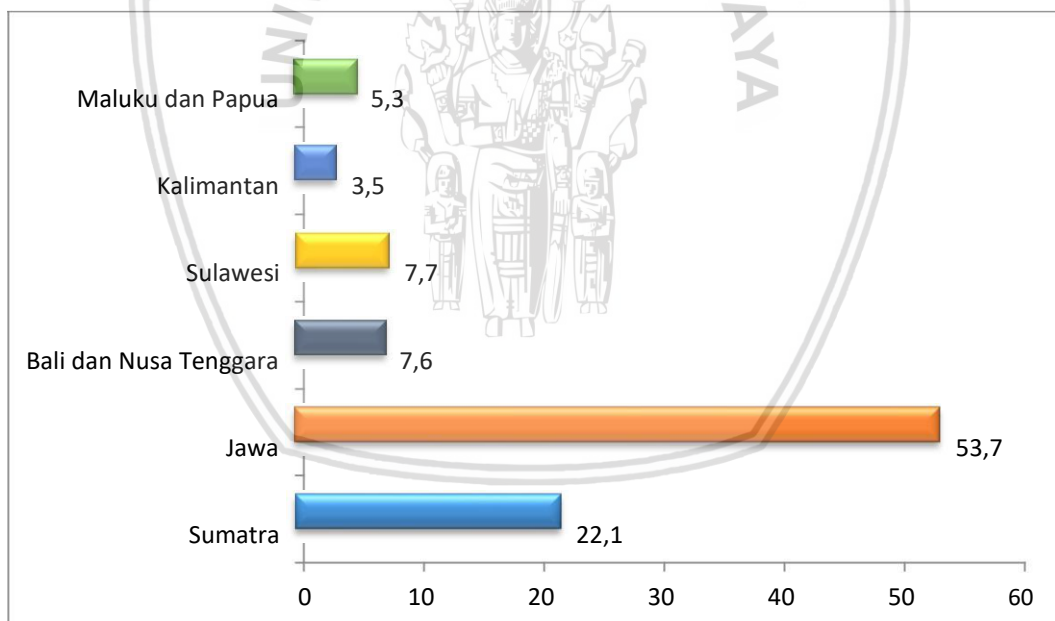
Awal Pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi meyakini bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa, dan hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, yaitu sektor yang memiliki nilai tambah (*value added*) tinggi, dan pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut dengan *trickle-down effect* (efek menetes kebawah). Artinya hasil dari pembangunan ekonomi melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dirasa akan menciptakan *trickle-down effect* dan nantinya dapat membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera (Tambunan, 2009). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Albert O. Hirschman pada tahun 1958. Yang menjelaskan bahwa dampak dari kemajuan suatu perekonomian akan menetes kebawah, dan akan menciptakan berbagai peluang ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya pertumbuhan perekonomian tersebut.

Mekanisme *trickle-down effect* untuk saat ini dirasa kurang memiliki dampak terkait dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, tidak secara langsung tertuju pada masyarakat golongan miskin, melainkan melalui masyarakat golongan kaya terlebih dulu. Kakwani dan Pernia mengungkapkan bahwa proses *trickle-down effect* justru akan memunculkan disparitas atau kesenjangan antar kelompok masyarakat, yang kemudian akan berdampak kepada bertambahnya jumlah penduduk miskin (Attibrizi, 2016). Attibrizi (2016) mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek dalam mengentaskan tingginya angka kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, serta kemiskinan itu sendiri. Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk merumuskan berbagai kebijakan guna mengatasi ketiga masalah tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berpihak terhadap masyarakat miskin. Strategi ini

telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN tersebut menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat *pro growth*, melainkan juga harus bersifat *pro poor* dan *pro job*. Artinya, suatu pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mampu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. *Pro growth*, *pro poor*, dan *pro job* atau yang biasa disebut dengan strategi *Pro Poor Growth* (PPG) merupakan penyempurna dari strategi sebelumnya yaitu *trickle-down effect* yang sempat diterapkan pada masa Orde Baru.

**Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2015  
(dalam Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa Pulau Jawa menyumbang angka kemiskinan terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, yaitu sebesar 53,7 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa. Di samping itu, Badan Pusat Statistik

menyebutkan urutan provinsi-provinsi yang menyumbang angka kemiskinan terbesar di Indonesia pada tahun 2015, diantaranya: 1) Jawa Timur; 2) Jawa Tengah; 3) Jawa Barat; 4) Sumatera Utara; 5) Nusa Tenggara Timur. Provinsi Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Sekitar 4.775.000 penduduk yang berpenghasilan rendah. Lebih dari 3,2 juta diantaranya berada di daerah perdesaan. Sementara 1,5 juta lainnya tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan per bulan untuk keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka Rp318 ribu (Nugraha, 2016).

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa dan Kota Surabaya sebagai ibu kotanya. Jawa Timur juga merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan luas wilayahnya yang mencapai 47.799,75 km<sup>2</sup>. Di samping itu, jumlah penduduk di Jawa Timur merupakan tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 42.030.633 jiwa, dengan kepadatan sebesar 844 jiwa/km<sup>2</sup>. Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai studi kasus dalam penelitian ini, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur yang merupakan tertinggi kedua se-Indonesia, setelah DKI Jakarta. Kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 14,85 persen.

**Tabel 1.1 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2015 (dalam Miliar Rupiah)**

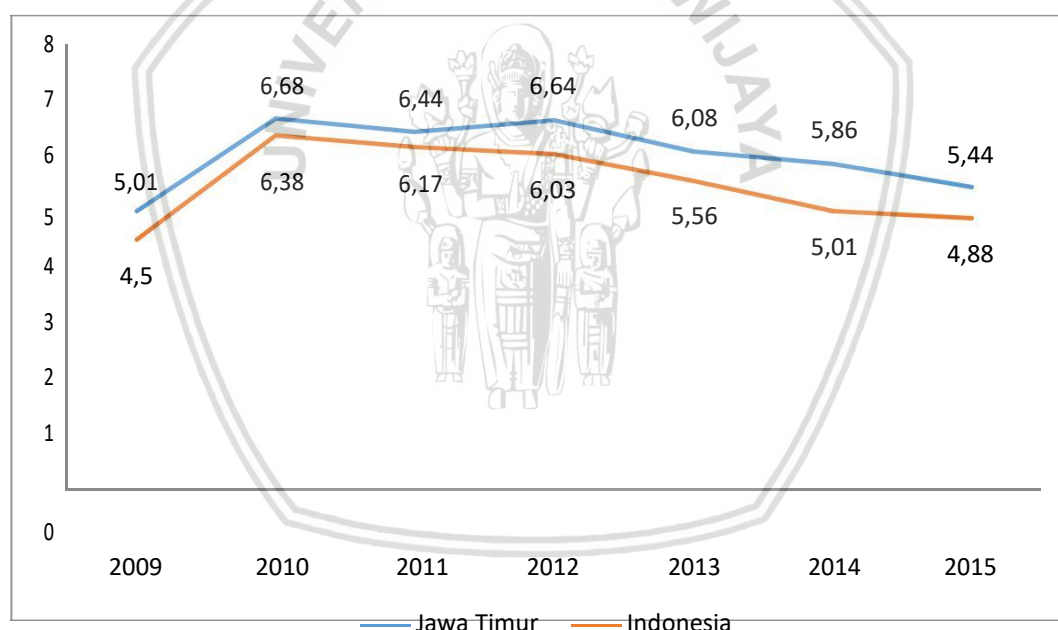
Provinsi	2015	Rank
Aceh	112.661	17
Sumatera Utara	440.956	6
Sumatera Barat	140.705	13
Riau	448.992	5
Jambi	125.036	16
Sumatera Selatan	254.045	9

Provinsi	2015	Rank
Bengkulu	38.066	30
Lampung	199.536	11
Kep. Bangka Belitung	45.961	29
Kep. Riau	155.113	12
DKI Jakarta	1.454.346	1
Jawa Barat	1.207.083	3
Jawa Tengah	806.775	4
DI Yogyakarta	83.474	21
<b>Jawa Timur</b>	<b>1.331.395</b>	<b>2</b>
Banten	368.216	8
Bali	129.131	15
Nusa Tenggara Barat	89.345	20
Nusa Tenggara Timur	56.832	26
Kalimantan Barat	112.325	18
Kalimantan Tengah	78.891	23
Kalimantan Selatan	110.868	19
Kalimantan Timur	440.648	7
Kalimantan Utara	49.316	28
Sulawesi Utara	70.425	25
Sulawesi Tengah	82.803	22
Sulawesi Selatan	250.758	10
Sulawesi Tenggara	72.991	24
Gorontalo	22.069	33
Sulawesi Barat	25.984	31
Maluku	24.859	32
Maluku Utara	20.381	34
Papua Barat	52.346	27
Papua	130.460	14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015 menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Meskipun cenderung mengalami penurunan, namun dalam periode yang sama rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih cukup tinggi, angkanya mencapai 6,02 persen. Bahkan ketika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menjadikan provinsi tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan nasional.

**Gambar 1.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak dapat menjanjikan suatu wilayah akan terbebas dari masalah-masalah ekonomi lainnya. Tingginya angka PDRB Jawa Timur yang mencapai 1.331.395 miliar rupiah merupakan PDRB tertinggi kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta pada tahun 2015, dan angkanya yang selalu berada diatas nasional

selama kurun waktu 2009-2015, namun hal tersebut tidak sebanding dengan kondisi kemiskinan di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur masih merupakan sarang bagi penduduk miskin. Hal ini bertentangan dengan Pandangan Tradisional terkait dengan upaya pembangunan di Negara Sedang Berkembang (NSB) yang identik dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini meyakini bahwa apabila pendapatan per kapita masyarakat ditingkatkan, maka masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dapat dengan mudah terpecahkan melalui apa yang disebut dengan *trickle-down effect* (efek menetes kebawah) (Kuncoro, 1997). War (2000) juga berpendapat bahwa pertumbuhan yang cepat akan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk penduduk miskin (Rumagit, 2016).

**Tabel 1.2 : Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2009-2015**  
(dalam Persen)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2
DKI Jakarta	3.62	3.48	3.75	3.70	3.72	4.09	3.61	3.71
Jawa Barat	11.96	11.27	10.65	9.89	9.61	9.18	9.57	10.30
Jawa Tengah	17.72	16.56	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32	15.19
DI Yogyakarta	17.23	16.83	16.08	15.88	15.03	14.55	13.16	15.54
<b>Jawa Timur</b>	<b>16.68</b>	<b>15.26</b>	<b>14.23</b>	<b>13.08</b>	<b>12.73</b>	<b>12.28</b>	<b>12.34</b>	<b>13.80</b>
Banten	7.64	7.16	6.32	5.71	5.89	5.51	5.75	6.28

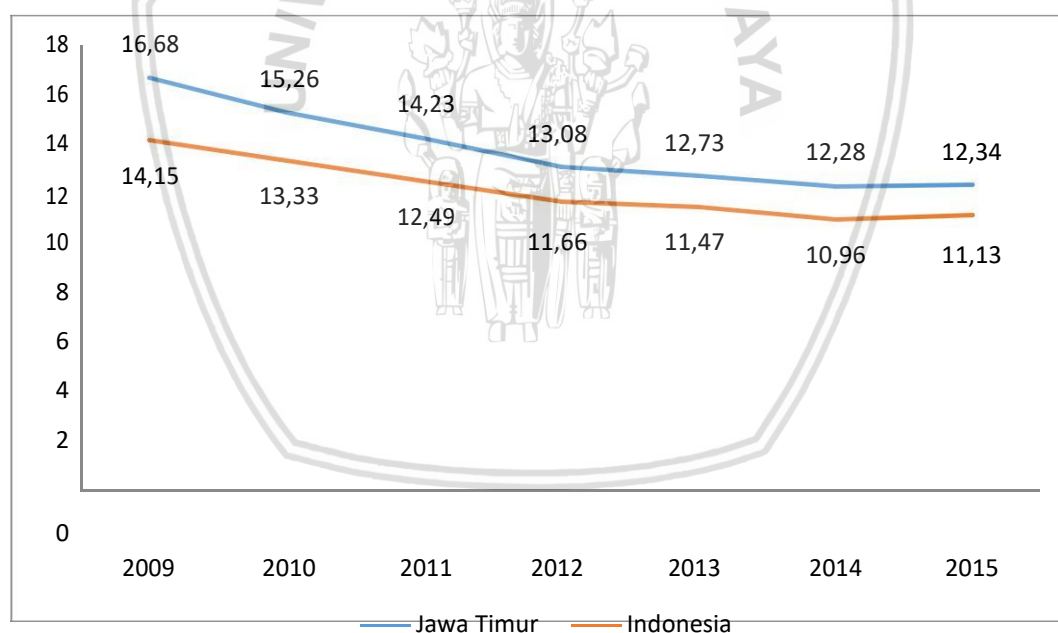
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Di tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur merupakan terbanyak se-Jawa bahkan se-Indonesia, yang jumlahnya mencapai 4,78 juta jiwa. Jawa Tengah menempati posisi kedua sebesar 4,51 juta jiwa, selanjutnya Jawa Barat sebesar 4,49 juta jiwa, kemudian Banten sebesar 691 ribu jiwa, DI Yogyakarta sebesar 486 ribu jiwa, dan yang terakhir DKI Jakarta sebesar 369 ribu jiwa (BPS,



2018). Jika dilihat dari persentasenya, rata-rata kemiskinan di Jawa Timur sebesar 13.79 persen, dan menempati urutan tertinggi ketiga se-Jawa setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terdapat perbedaan dalam hal ini, sebab ketika berbicara tentang persentase penduduk miskin, maka perlu membandingkan terlebih dahulu antara jumlah penduduk miskin dengan total penduduk di suatu wilayah tertentu. Pada Tabel 1.2 menunjukkan persentase kemiskinan Jawa Timur dari tahun 2009-2015 yang mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup berhasil dalam melaksanakan program-program dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

**Gambar 1.3 : Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



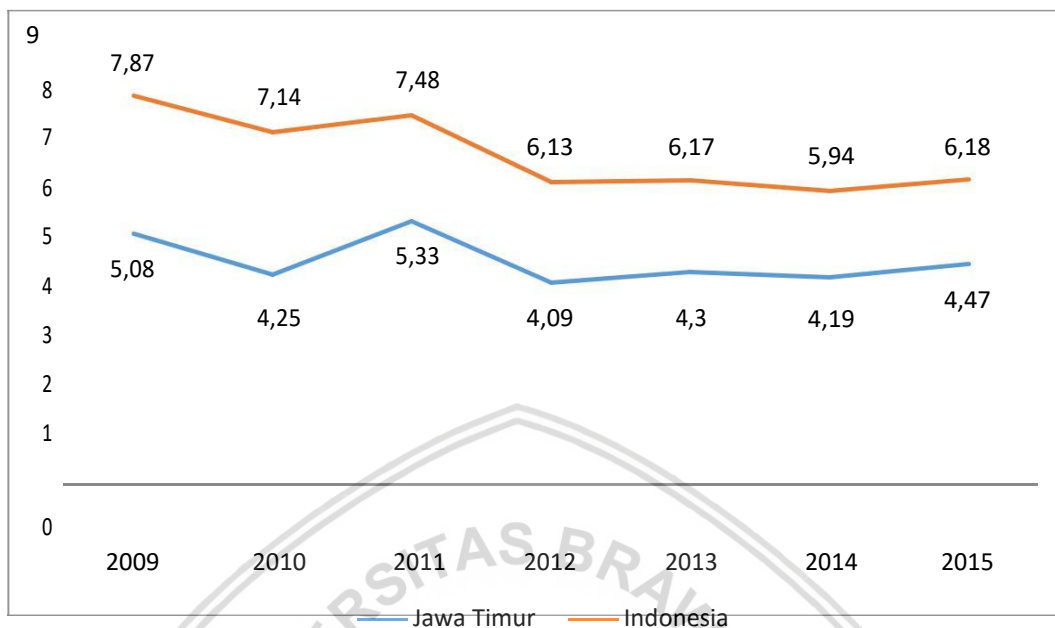
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018.

Akan tetapi jika dicermati lebih lanjut, meskipun persentase kemiskinan Jawa Timur selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Indonesia, selama kurun waktu 2009-2015, persentase kemiskinan Jawa Timur selalu lebih tinggi daripada

persentase kemiskinan nasional. Terlebih lagi pencapaian tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yang sebesar 12,34 persen, masih berada di atas target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 yaitu sebesar 11 persen. Dapat dikatakan bahwa program yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengentasan kemiskinan saat ini dirasa masih belum mampu membuat angka kemiskinan di Jawa Timur berada di bawah nasional. Oleh karena itu, perlu untuk lebih diperhatikan lagi dalam merumuskan serta menetapkan program maupun kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya di Jawa Timur yang terkait dengan cara dan langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi angka kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan nasional, sehingga persentase kemiskinan Jawa Timur bisa berada di bawah persentase kemiskinan nasional.

Tolok ukur lainnya untuk menilai tingkat kemakmuran suatu masyarakat dapat di lihat dari tinggi rendahnya pendapatan. Pendapatan masyarakat akan mencapai maksimum ketika berada pada kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Pada dasarnya, kemiskinan muncul karena adanya masalah pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat, sehingga nantinya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendahnya tingkat kesejahteraan, maka akan sangat memungkinkan timbulnya masalah-masalah lain, seperti kemiskinan. Adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Dimana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah permintaannya.

**Gambar 1.4 : Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016.

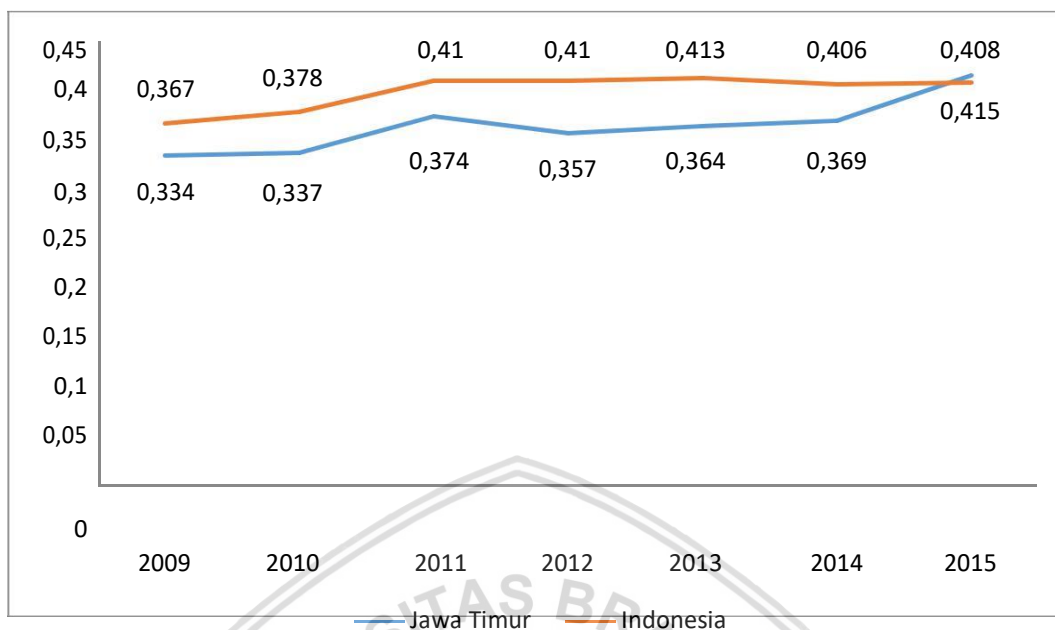
Dengan melihat Gambar 1.4, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015, memiliki tren yang fluktuatif di setiap tahunnya dan terlihat bahwa angkanya masih berada dibawah nasional. Sempat mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sekitar 1,27 persen di tahun 2012. Namun kembali meningkat sebesar 0,32 persen di tahun 2015. Angkanya yang berada jauh dibawah nasional mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup berhasil dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan masalah pengangguran.

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi yang termasuk di dalamnya pengentasan angka kemiskinan, tidak hanya mengupayakan agar pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal tersebut akan tercapai apabila peningkatan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada (Sukirno, 2006). Masalah kemiskinan sangatlah identik dengan besar kecilnya jumlah pengangguran yang ada pada

suatu wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan pengangguran akan secara langsung berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat apabila konsumsi saat ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan saat ini, namun ketika konsumsi saat ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini maka pengangguran tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka pendek (Tambunan, 2015).

Di samping itu, Pandangan Ekonomi Baru tentang pembangunan juga menyebutkan bahwa pertumbuhan saja tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai berhasil atau tidaknya proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Perlu adanya indikator lain seperti pemerataan distribusi pendapatan dan penurunan angka pengangguran (Todaro & Smith, 2011). Sejalan dengan itu, Sukirno menyatakan bahwa modernisasi bukan merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, tetapi yang terpenting yaitu bagaimana menciptakan distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata (Sukirno, 2006).

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menggunakan indeks Gini. Indeks Gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 sampai angka 1. Dimana koefisien tersebut menjelaskan seberapa besar tingkat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisiennya (mendekati angka nol) maka semakin merata, sedangkan semakin besar koefisiennya (mendekati angka satu) maka semakin timpang. Atau dengan kata lain, nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sudah sangat merata (kemerataan sempurna), sedangkan nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata (ketimpangan sempurna).

**Gambar 1.5 : Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016.

Pada Gambar 1.5 terlihat bahwa besarnya indeks Gini di Provinsi Jawa Timur Selama kurun waktu 2009-2014 berada dibawah indeks Gini nasional, artinya indeks Gini Jawa Timur cukup rendah. Akan tetapi angkanya selalu meningkat, dari tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 0,007, kemudian tahun 2014 meningkat sebesar 0,005, dan puncaknya di tahun 2015 yang meningkat sebesar 0,046. Bahkan peningkatan yang cukup tinggi tersebut membuat indeks Gini Jawa Timur pada tahun 2015 angkanya berada diatas indeks Gini nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, dinilai mampu memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, namun belum mendapat apresiasi penuh, sebab koefisien Gini masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Mengacu pada konsep *pro poor growth* yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sudah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, dimana peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan saja, melainkan juga mempersempit jurang kesenjangan antar golongan masyarakat (Grimm, *et. al.* dalam Suhartini, 2011). Menurunnya

ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat akan menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh penduduk kaya saja melainkan juga oleh penduduk miskin.

Hajiji (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2002-2008 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhasil mengentaskan kemiskinan di Riau, tetapi peningkatan ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan. Sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan.

Suhartini (2011) dalam penelitiannya yang menganalisis *Pro Poor Growth* Tingkat Provinsi di Indonesia selama tahun 2005 hingga tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009, rata-rata pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dengan kecenderungan deviasi yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan semakin timpang. Sebaliknya, rata-rata koefisien Gini cenderung meningkat dengan standar deviasi yang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan semakin tinggi. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi kemiskinan cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan akan menghasilkan kemiskinan di bawah rata-rata. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, produktivitas sektor pertanian dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.



Attibrizi (2016) dalam penelitiannya yang menganalisis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Hubungannya dengan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan; pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui perantara ketimpangan pendapatan; pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui perantara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran.

Jika ditinjau kembali, tingginya angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak sebanding dengan kondisi kemiskinan pada provinsi tersebut. Meskipun angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi ketika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, angkanya masih berada diatas nasional. Di samping itu, pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama tertinggi se-Indonesia. Ditambah pula dengan adanya fakta bahwa terjadi peningkatan indeks gini yang cukup signifikan pada tahun 2015 yang menunjukkan semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan menjadi penentu suatu wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti ***“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)”***. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, atau dapat

pula dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur agar kedepannya tidak kembali mengulang permasalahan yang sama.

## 1.2 Rumusan Masalah

Proses pembangunan ekonomi yang telah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, selayaknya mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk diantaranya masyarakat miskin, atau yang biasa dikenal dengan *pro-poor growth* (Departemen Sosial RI, 2005). Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, terdapat penekanan pada percepatan pembangunan wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi ketimpangan (Bappenas, 2010).

Namun realita saat ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur belum mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada penduduk miskin. Ditambah lagi dengan tingkat kesenjangan yang semakin lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Adanya perbedaan (*gap*) antara teori yang ada dengan realita saat ini. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
4. Bagaimana pengaruh sektor pertanian terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
5. Bagaimana pengaruh sektor industri terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terbentuklah beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
2. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
3. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
4. Untuk menganalisis pengaruh sektor pertanian terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?
5. Untuk menganalisis pengaruh sektor industri terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara konseptual maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan atau referensi, serta dapat pula dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan topik.
2. Bagi Pemerintah beserta Institusi terkait, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja terutama terkait dengan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur saat ini. Di samping itu, diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan juga sektor pertanian serta sektor industri.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi dan juga sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur.
4. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada dan sekaligus dijadikan sebagai bahan studi dan juga informasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pandangan Tradisional menganggap bahwa pembangunan ekonomi identik dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau sering disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pandangan ini menyebutkan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan ekonomi semata-mata hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita. Dalam hal ini, peningkatan pendapatan nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pandangan ini juga beranggapan bahwa pembentukan modal merupakan kunci keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan akumulasi modal dan industrialisasi (Kuncoro, 1997).

Paradigma Baru dalam Pembangunan menganggap bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*). Berbeda dengan Pandangan Tradisional, pandangan ini menyatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, dan distribusi pendapatan yang timpang, serta ketidakseimbangan struktural (Sjahrir dalam Kuncoro, 1997). Kuncoro mendefinisikan ulang terkait dengan pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Sejalan

dengan itu, Seers berpendapat terdapat tiga sasaran utama dalam proses pembangunan yaitu berorientasi pada kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok (Kuncoro, 1997).

Dalam bukunya, Kuncoro menyebutkan bahwa proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan perubahan (*growth plus change*) yaitu perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri ataupun sektor jasa, dan perubahan kelembagaan melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. Secara garis besar, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Yang termasuk dalam indikator ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, GNP dan GDP per kapita, serta paritas daya beli (*purchasing power parity*). Sedangkan yang termasuk dalam indikator sosial adalah HDI (*Human Development Index*) dan PQLI (*Physical Quality Life Index*) atau Indeks Mutu Hidup (Kuncoro, 1997).

### 2.1.2 Kemiskinan

Semua wilayah (negara) pasti mengharapkan dapat terbebas dari persoalan kemiskinan. Akan tetapi sangat mustahil apabila kemiskinan berada pada titik 0 (nol), atau dengan kata lain tidak ada satu pun masyarakat yang miskin pada wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah dituntaskan dengan menggunakan satu pengertian saja. Menurut Yustika, apabila kemiskinan di pandang sebagai masalah ekonomi, maka dapat diartikan sebagai rendahnya pendapatan per kapita dari suatu individu dan/atau keluarga. Namun apabila kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial, maka dapat dikatakan adanya keterbatasan kemampuan suatau individu untuk terlibat dalam proses pembangunan, baik diakibatkan oleh kurangnya keterampilan dan pendidikan, maupun pengucilan sosial (*social*



*exclusion*), sehingga membuat tingkat kesejahteraan individu tersebut menurun (Yustika, 2007). Lebih luas lagi, Friedman memandang kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi (Machmud, 2016).

Masalah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada tingkat konsumsi seseorang. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacu pada besarnya pengeluaran tiap orang per harinya. Kriteria statistik menurut BPS adalah sebagai berikut (Machmud, 2016):

- a) Tidak miskin, yaitu individu (keluarga) yang pengeluaran per bulannya lebih dari Rp350.610.
- b) Hampir tidak miskin, yaitu individu (keluarga) dengan pengeluaran per bulan antara Rp280.488 s/d Rp350.610.
- c) Hampir miskin, yaitu individu (keluarga) dengan pengeluaran per bulan antara Rp233.740 s/d Rp280.488.
- d) Miskin, dengan pengeluaran per individu (keluarga) per bulan kurang dari Rp233.740.
- e) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per individu dalam satu harinya, tidak diketahui secara pasti.

Masyarakat Uni Eropa memandang kemiskinan sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata)

pendapatan. Ketika rata-rata pendapatan meningkat, maka garis kemiskinan relatif juga akan meningkat. Dua ukuran kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia, sebagai berikut (Machmud, 2016):

- 1) US\$ 1 per kapita per hari. Diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk di dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut.
- 2) US\$ 2 per kapita per hari. Diperkirakan sebanyak 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*).

Secara lebih detail Laderich *et. al.*, mengklasifikasikan teori tentang kemiskinan ke dalam empat perspektif (Yustika, 2007). *Pertama*, pendekatan moneter (*the monetary approach*). Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk mencapai tingkat konsumsi (pendapatan) secara minimum, yang biasanya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kesejahteraan individu diukur dari total konsumsi seseorang, dengan melihat besarnya pendapatan dan pengeluaran dari individu tersebut, sehingga individu yang memiliki pendapatan dan/atau pengeluaran di bawah batas minimum (garis kemiskinan) maka tergolong sebagai penduduk miskin.

*Kedua*, pendekatan kemampuan (*the capability approach*). Amartya Sen menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilihat sebagai ekspansi dari kemampuan manusia (*human capabilities*), bukan sekedar memaksimalkan kegunaan (*utility*), yakni pendapatan. Dengan demikian, pendekatan ini menolak konsep pendekatan moneter dan lebih fokus pada indikator kebebasan, sebab ia menganggap bahwa hakikat dari pembangunan adalah kebebasan (*freedom*), dan mengatasi sumber-sumber utama penyebab ketidakbebasan (*unfreedom*), salah satunya yaitu kemiskinan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kegagalan individu dalam memenuhi kemampuan dasar (*basic capabilities*), yang

mencakup harapan hidup, kesehatan, ketangguhan tubuh, perasaan (imajinasi), emosi, dan afiliasi (interaksi sosial dan perlindungan dari diskriminasi).

*Ketiga*, pendekatan pengucilan sosial (*social exclusion*). Pendekatan ini populer di negara-negara maju untuk mendeskripsikan hilangnya hak-hak dasar ekonomi. Komunitas Uni Eropa misalnya, mendefinisikan pengucilan sosial ini sebagai proses dimana individu atau kelompok secara menyeluruh atau parsial dikucilkan dari keterlibatan penuh (*full participation*) oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran seperti pengangguran, akses terhadap perumahan, pendapatan minimum dan kontak sosial, serta keterbatasan kewarganegaraan atas hak-hak demokratis.

*Keempat*, perspektif metode partisipatif (*participatory methods*). Baik pendekatan moneter maupun pendekatan kemampuan yang melihat kemiskinan sebagai persoalan yang didefinisikan dari pihak luar (*externally imposed*), tanpa pernah melihat kemiskinan dari perspektif kaum miskin itu sendiri (*views of poor people themselves*). Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan penduduk miskin dalam pengambilan keputusan untuk mendefinisikan kaum miskin dan besaran kemiskinan. Pendekatan ini cukup lumayan rumit untuk diaplikasikan karena menyangkut berbagai aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Penyebab kemiskinan berasal dari tiga sumber, yakni struktural, kultural, dan sumber daya (Yustika, 2007). *Pertama*, kemiskinan struktural merupakan kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang masih belum memihak kepada penduduk miskin, atau dapat pula disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya. *Kedua*, kemiskinan kultural dikarenakan adanya sikap/mental dari penduduk miskin tersebut yang tidak ingin berubah, yang sebagian ditunjukkan dengan adanya sikap malas, tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, tidak kreatif, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, kemiskinan sumber daya disebabkan oleh ketidaktersediaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

Selanjutnya, ketiga penyebab kemiskinan tersebut akan berujung pada dua kondisi kemiskinan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Yustika, 2007). Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana penduduk miskin yang sudah berada di bawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana sebagian kelompok masyarakat memperoleh tingkat kesejahteraan (pendapatan) di bawah kelompok masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang masih belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan, atau dapat pula dikatakan bahwa orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat lainnya. Sejalan dengan Sudantoko yang menyatakan bahwa kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum, sedangkan kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan (Machmud, 2016).

Faktor penyebab kemiskinan menurut Suharto terbagi ke dalam empat mahzab, diantaranya (Machmud, 2016):

- 1) *Individual Explanation*. Diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri, seperti malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, dll.
- 2) *Familial Explanation*. Akibat faktor keturunan, di mana antargenerasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama dalam hal pendidikan.

- 3) *Subcultural Explanation*. Akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat.
- 4) *Structural Explanation*. Yang menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status ataupun hak.

Bank Dunia juga menyebutkan terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan, diantaranya (Machmud, 2016):

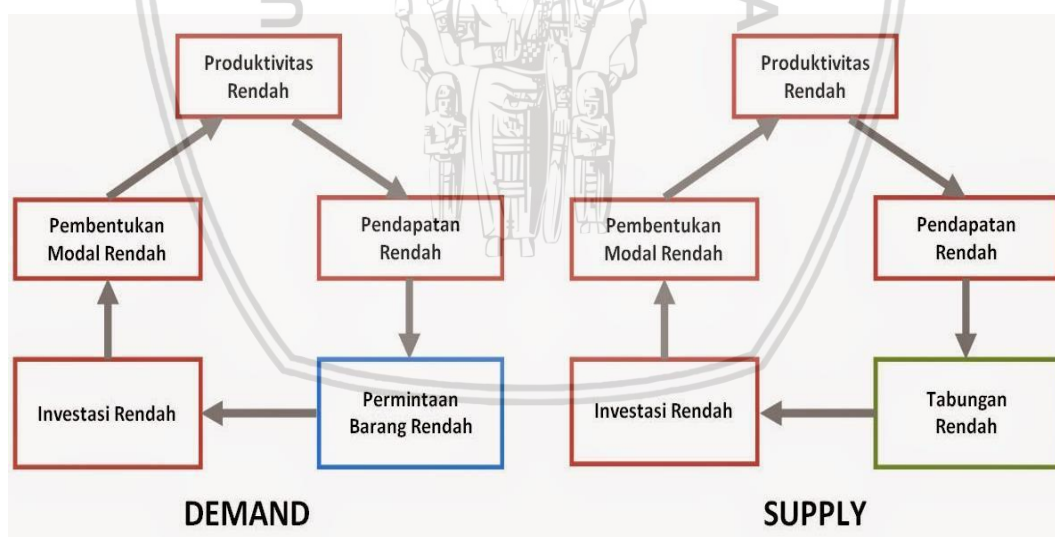
- a) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana.
- b) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- c) Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- d) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor-sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- e) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- f) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- g) Tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik (*good governance*).
- h) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi (Kuncoro, 1997). *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Umumnya penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh pendidikan yang

rendah, nasib yang kurang beruntung, dan diskriminasi, atau karena keturunan. Kualitas sumber daya yang rendah akan menyebabkan produktivitas yang rendah pula, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam pembentukan modal.

Pada dasarnya, ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse di tahun 1953 yang menyatakan bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena memang miskin) (Kuncoro, 1997). Lingkaran setan kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menempatkan suatu wilayah tetap berada dalam keadaan miskin. Yang bercirikan tingkat produktifitas yang sangat rendah akibat dari kurangnya modal yang dimiliki, kondisi pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian (Jhingan, 1996).

**Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan**



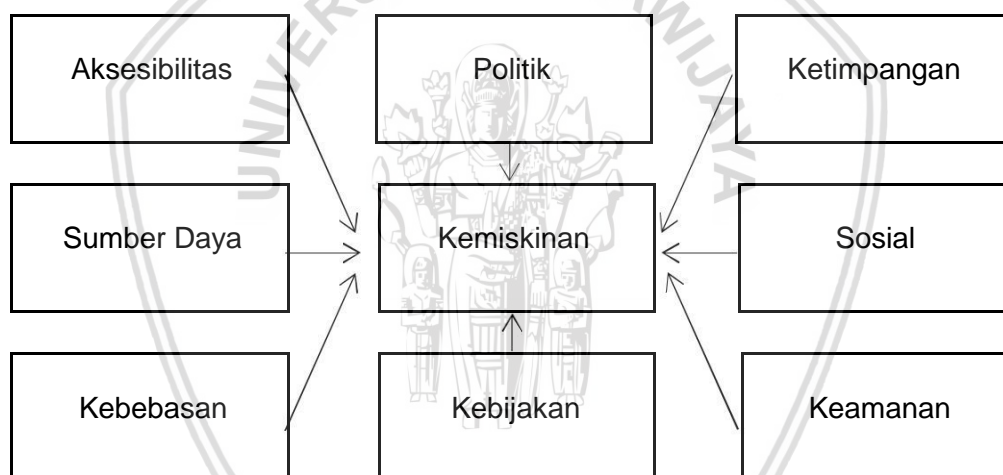
Sumber: Jhingan, 1996.

Kondisi tersebut dapat dilihat melalui dua sudut pandang, seperti yang tertera pada Gambar 2.1. *Pertama*, dari sudut pandang permintaan (*demand*), produktifitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan per kapita yang juga rendah. Rendahnya tingkat pendapatan akan menyebabkan turunnya jumlah



permintaan. Permintaan yang rendah pada gilirannya akan membuat tingkat investasi juga rendah. Rendahnya tingkat investasi akan membuat akumulasi modal yang rendah, dan modal yang rendah akan kembali menurunkan produktivitas seseorang. *Kedua*, dari sudut pandang penawaran (*supply*), rendahnya produktivitas akan membuat pendapatan yang semakin menurun. Pendapatan yang rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Rendahnya tabungan akan menyebabkan tingkat investasi berkurang dan akumulasi modal yang rendah. Kurangnya akumulasi modal akan kembali menurunkan produktivitas seseorang.

**Gambar 2.2 : Paradigma Baru Kemiskinan**



Sumber: Kuncoro (2000) dalam Rumagit (2016).

Paradigma kemiskinan baru (modern) merupakan perkembangan pemikiran kemiskinan, dimana definisi kemiskinan bukan hanya dilihat berdasarkan kondisi fisik seseorang saja, melainkan dari berbagai aspek. Aksesibilitas, penduduk yang tidak memiliki akses untuk menuju ke tempat dimana terdapat barang kebutuhan hidup, infrastruktur sosial, dan informasi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Politik, daerah dengan kondisi politik yang tidak baik dimana pada masing-masing pendukung hanya mementingkan kepentingan

golongannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dengan adanya kekacauan politik dan terbentuknya berbagai macam kubu. Ketimpangan, penduduk masyarakat dengan ketimpangan yang tinggi dimana tidak terjadi pemerataan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan relatif. Sosial, kondisi lingkungan sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi kemiskinan yang ada dalam masyarakat, apabila kondisi masyarakatnya buruk maka akan memperburuk kondisi sosial dan nantinya akan menimbulkan permasalahan kemiskinan. Keamanan, tenaga kerja akan bekerja secara produktif apabila lingkungan pekerjaannya aman (tidak terjadi perang atau kerusuhan) sehingga akan memperoleh pendapatan, selain itu lingkungan yang aman juga akan memungkinkan seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi kemiskinan yang ada, apabila kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan akan mengakibatkan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Kebebasan, tenaga kerja yang diberikan kebebasan dalam bekerja dan memilih pekerjaannya, akan lebih produktif dan lebih memungkinkan adanya inovasi, dibandingkan dengan yang bekerja dalam tekanan, sehingga dengan lebih produktifnya tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber Daya, daerah yang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi, akan tertinggal dengan daerah lain, sebab kurang mampu bersaing (Rumagit, 2016).

Terdapat beberapa indikator tingkat kemiskinan di Indonesia menurut (Bappenas, 2004), berikut diantaranya:

- a) Kurangnya sandang, pangan, serta perumahan yang tidak layak pakai;
- b) Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produksi;
- c) Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
- d) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;

- e) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
- f) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah;
- g) Akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas.

Bank Dunia (2006) menyebutkan terdapat tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tetapi dapat dikategorikan miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (Khomsan, et al., 2015).

Pendekatan yang umum dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar diukur dari pengeluaran (sebagai proksi dari pendapatan) rumah tangga atas sejumlah komoditas baik berupa makanan maupun non makanan. Dari sejumlah komoditas tersebut kemudian ditentukan ukuran kebutuhan minimumnya. Kemudian jumlah minimum dari komoditas tersebut dikalikan dengan harga komoditas yang bersangkutan. Dengan begitu diperoleh sejumlah angka yang menunjukkan harga dari sejumlah komoditas minimum yang diperlukan. Angka itulah yang dijadikan sebagai garis kemiskinan (*poverty line*) (Khomsan, et al., 2015). Dengan kata lain, penduduk miskin adalah penduduk

yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

$$GK = GKM + GKNM$$

### 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menganalisis terkait dengan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu perkonomian dalam menciptakan barang dan jasa, sehingga nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006). Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui peningkatan jumlah tabungan masyarakat (Jhingan, 1996).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses

pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Yang mana proses ini nantinya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dari pemilik faktor produksi akan meningkat. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat tahun lalu.

Dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu: (i) pertumbuhan output untuk menilai kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja dan modal; (ii) pertumbuhan output per pekerja sebagai indikator adanya perubahan daya saing pada suatu wilayah; (iii) pertumbuhan output per kapita sebagai indikator perubahan kesejahteraan. Mengacu pada poin ketiga, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah, yang merupakan pendapatan atau nilai total pasar dari seluruh barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga besaran PDRB pada masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut akan menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Menurut Sukirno, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno,

2006). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk menunjukkan kondisi perekonomian daerah di setiap tahunnya. Kegunaan dari data ini diantaranya (BPS, 2016):

- a) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu pula sebaliknya.
- b) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c) Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk.
- e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Secara garis besar, teori ini mengungkapkan beberapa pandangan sebagai berikut. *Pertama*, tingkat perkembangan masyarakat tergantung pada empat faktor utama yaitu jumlah penduduk, akumulasi modal, luas tanah, dan teknologi. *Kedua*, pendapatan masyarakat terbagi ke dalam tiga jenis pendapatan yaitu upah pekerja, laba pengusaha, dan sewa tanah. *Ketiga*, kenaikan upah akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. *Keempat*, akumulasi modal



ditentukan oleh besarnya keuntungan, apabila tidak memperoleh keuntungan maka tidak ada pembentukan modal dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*. Kelima, berlakunya *the law diminishing returns* atau hukum hasil yang semakin berkurang (Sukirno, 2006).

Para ahli ekonomi klasik, dalam menganalisis masalah pembangunan, yang utama ingin mengetahui tentang sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan corak proses pertumbuhannya (Sun'an, 2015). Terdapat beberapa penganut aliran Klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Meskipun mereka sama-sama menganut aliran Klasik, namun mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam membahas kedua persoalan tersebut.

a. Pandangan Adam Smith

Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Smith berpendapat bahwa ketika proses pembangunan sedang berlangsung, maka pasar akan berkembang dan akan ada spesialisasi (pembagian) kerja. Semua itu akan terjadi bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk, sehingga akan terjadi kenaikan produktivitas, tabungan yang semakin tinggi, dan menciptakan pendapatan nasional yang semakin meningkat. Seiring dengan berjalannya waktu, spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan inovasi (pembaruan) teknologi. Dengan adanya pembaruan teknologi ini nantinya akan dapat menciptakan pendapatan per kapita yang semakin meningkat.

b. Pandangan David Ricardo

Dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*, Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk

yang semakin besar hingga mencapai dua kali lipat, pada suatu saat akan menyebabkan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini akan mengakibatkan tingkat upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami stagnan (*stationary state*). Teori ini juga dipengaruhi oleh *the law of diminishing returns* (hukum hasil lebih yang makin berkurang).

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi bermula dari jumlah penduduk yang rendah dan kekayaan alam yang cukup tinggi. Hal ini akan mengakibatkan para pengusaha memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, karena pembentukan modal ditentukan oleh tingkat keuntungan. Laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan produksi sekaligus kenaikan permintaan tenaga kerja. Pada tahap selanjutnya, akibat adanya permintaan tenaga kerja yang terus meningkat, maka akan terjadi kenaikan upah. Kenaikan ini akan mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka semakin lama tanah yang digunakan adalah tanah dengan kualitas yang semakin rendah. Sebagai akibatnya, output tambahan yang dihasilkan oleh para pekerja akan menjadi semakin kecil, karena lebih banyak pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus menerus, akan menurunkan keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Dorongan untuk mengadakan pembentukan modal kurang dan selanjutnya akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Pada tahap akhir, tingkat upah kembali turun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tahap ini perekonomian akan mencapai kondisi stagnan (*stationary state*). Pembentukan modal baru

tidak akan terjadi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan para pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

c. Pandangan John Stuart Mill

John Stuart Mill sependapat dengan Adam Smith bahwa spesialisasi kerja akan meningkatkan keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi, dan menciptakan inovasi produk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan memperlancar proses pembangunan. Di sisi lain, terkait dengan perkembangan penduduk, Mill sependapat dengan David Ricardo, yakni adanya pertambahan penduduk secara terus menerus, sedangkan luas tanah terbatas, akan menyebabkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pada kondisi ini, Mill berpendapat bahwa pembangunan ekonomi akan mengalami kemuduran dan pada akhirnya akan mencapai *stationary state*.

## 2. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Dalam bukunya *The Theory of Economic Development*, Joseph Schumpeter memasukkan peran pengusaha dalam proses pembangunan. Schumpeter meyakini bahwa pembangunan ekonomi bermula dari golongan pengusaha yang inovatif dan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian ke arah yang lebih baik, dan pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kunci dalam proses inovasi adalah tersedianya lingkungan yang dapat menunjang terjadinya inovasi. Menurut Schumpeter, sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling efisien bagi timbulnya inovasi dan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat. Namun dalam jangka panjang sistem kapitalisme tidak akan berkembang (*stagnation*), karena adanya transformasi menuju ke arah sistem yang lebih bersifat sosialis.

### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Evsey Domar dan R.F.Harrod. Domar mengemukakan teori ini untuk pertama kalinya pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod mengemukakannya pada tahun 1937 dalam *Economic Journal*. Jadi sebenarnya teori ini dikembangkan oleh dua ekonom secara terpisah, namun karena inti dari teori ini sama, maka teori ini akrab dikenal dengan teori Harrod-Domar. Harrod-Domar berpendapat bahwa modal harus digunakan secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Dalam teori ini, penanaman modal memiliki fungsi ganda, yaitu (i) untuk menambah kapasitas barang modal; dan (ii) untuk meningkatkan pengeluaran masyarakat. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Teori ini juga menyebutkan bahwa rasio modal produksi adalah tetap, artinya hanya terdapat satu kombinasi input (modal dan tenaga kerja) tertentu dalam menghasilkan sejumlah output.

### 4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Teori Pertumbuhan Eksogen)

Teori ini didasarkan pada teori Klasik. Teori ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Robert Solow yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lain, diantaranya Edmund Phelps, Harry Johnson, dan J.E. Meade. Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat tidak berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Sama halnya dengan aliran Klasik, aliran ini juga beranggapan bahwa suatu perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan barang-barang modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa. Rasio modal produksi pada teori ini adalah fleksibel atau dapat

dengan mudah mengalami perubahan. Dengan kata lain, untuk memproduksi sejumlah output tertentu, dapat menggunakan kombinasi input (modal dan tenaga kerja) dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan yang diperlukan, tidak harus proporsional seperti pada teori Harrod-Domar. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian memiliki kebebasan dalam menentukan kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah output. Pada perekonomian terbelakang, dengan stok kapital per tenaga kerja yang kecil, dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dengan membangun stok modalnya. Selain itu, pandangan ini juga beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi ketika ada kemajuan teknologi.

## 5. Teori Pertumbuhan Endogen

Model Solow yang telah diuraikan tidak menjelaskan bagaimana perbaikan teknologi terjadi. Model tersebut mengasumsikan perubahan teknologi terjadi secara eksogen, sehingga disebut juga dengan model perubahan teknologi secara eksogen. Model yang lebih terkini memberlakukan perubahan teknologi secara endogen, yakni menjelaskan kemajuan teknologi yang masuk dalam model sebagai keluaran dari keputusan yang diambil oleh perusahaan atau individual (Elinur, 2012). Dalam model pertumbuhan endogen, hubungan antara kapital dan output dapat ditulis dalam bentuk  $Y = AK$ . Modal/kapital ( $K$ ) dalam model ini didefinisikan secara lebih luas dibandingkan dengan model Neoklasik, yaitu gabungan pabrik/mesin dan pengetahuan berbasis kapital. Sedangkan  $A$  adalah konstanta, dan pertumbuhan dapat terjadi tidak terhingga sebagai akumulasi dari modal. Kunci dari model pertumbuhan endogen terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk akumulasi modal yang berasal dari *research and development* (R&D). Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sifat khusus. *Pertama*, stok kapital tidak akan habis karena digunakan, yang mengimplikasikan

bahwa stok pengetahuan dapat dihasilkan sepanjang waktu, walaupun sedang digunakan. *Kedua*, menghasilkan eksternalitas positif dalam produksi dimana dengan melakukan R&D, perusahaan tersebut akan memperoleh benefit berupa pengetahuan baru dan perusahaan lainnya juga akan memperoleh manfaat. Akan ada *beneficial spillovers* (limpahan manfaat) bagi perekonomian dari proses R&D sehingga manfaat sosial dari inovasi melebihi manfaat swasta kepada inovator awal (Stern dalam Elinur, 2012).

Menurut Romer (1994) bahwa ide dasar dari teori pertumbuhan endogen adalah investasi modal/kapital baik dalam bentuk mesin maupun manusia yang mampu menciptakan eksternalitas positif. Artinya investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produktif dari perusahaan yang melakukan investasi tenaga kerja, tetapi juga kapasitas produktif dari perusahaan-perusahaan atau tenaga kerja lainnya yang terkait juga akan meningkat. Singkatnya, dalam model pertumbuhan endogen bahwa inovasi teknologi dan pembentukan modal manusia dilihat sebagai sumber utama dari pertumbuhan produktivitas, dan pertumbuhan tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*).

Sach dan Larrain pada tahun 1993 (dalam Elinur, 2012) menyatakan bahwa model pertumbuhan endogen memiliki asumsi *increasing return to scale*, bahwa skala hasil ekonomi yang meningkat tidak harus dicapai pada *steady state growth rate* yang sama dengan laju pertumbuhan penduduk ditambah dengan *labor augmenting technical progress*. Pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi harus bisa berlangsung secara berkesinambungan (*self-sustaining*). Teori pertumbuhan endogen juga menolak asumsi penyusutan imbalan marginal atas investasi modal (*diminishing marginal returns to capital investments*) yang dipegang teguh oleh teori Neoklasik.



Teori pertumbuhan endogen mengasumsikan hanya terdapat satu sektor produksi atau semua sektor bersifat simetris (Todaro M. P., 2000). Todaro menyatakan bahwa model pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia akan memperoleh eksternalitas ekonomi sekaligus peningkatan produktivitas yang melebihi keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi, dan keuntungan tersebut cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Selanjutnya, hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi baru yang nantinya juga akan membuahkan eksternalitas ekonomi, sehingga  $\alpha$  (alpha) pada persamaan Solow sama dengan 1. Dengan kata lain, persamaan pertumbuhan pada model Neoklasik  $Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha}$ , yang kemudian diubah menjadi sebuah persamaan pertumbuhan model endogen yaitu  $Y = AK$ . Hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Model pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya tabungan dan investasi modal manusia dalam rangka memacu pertumbuhan di berbagai negara berkembang. Namun teori ini mengemukakan beberapa implikasi tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertolak belakang dengan teori pertumbuhan Neoklasik. *Pertama*, teori pertumbuhan endogen menyatakan tidak ada kekuatan khusus yang menghadirkan suatu proses pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara, khususnya bagi negara-negara yang menganut sistem perekonomian tertutup. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara akan tetap konstan, dan satu sama lainnya akan tetap berbeda, dikarenakan sepenuhnya bergantung pada tingkat tabungan dan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Todaro (2000) juga beranggapan bahwa sekalipun memiliki tingkat tabungan yang sama besarnya, negara-negara miskin tidak akan mampu untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal pendapatan per kapita dari negara-negara kaya. Hal ini akan menimbulkan

konsekuensi yakni terjadinya resesi suatu negara akan mengakibatkan peningkatan permanen atas kesenjangan pendapatan antar negara yang bersangkutan dengan negara-negara lainnya yang lebih kaya.

*Kedua*, kemampuan untuk menjelaskan perilaku atas arus permodalan internasional yang cenderung memperlebar ketimpangan kesejahteraan antar negara. Bertolak dari model ini dapat diketahui bahwa potensi dari keuntungan investasi yang tinggi di negara berkembang yang rasio modal - tenaga kerja masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal sumber daya manusia (terutama melalui pengembangan fasilitas dan pendidikan, sarana infrastruktur, serta beragam kegiatan penelitian dan pengembangan). Negara-negara miskin juga tidak banyak yang memperoleh manfaat dari keuntungan-keuntungan sosial yang muncul dari penyediaan modal untuk menggarap bidang-bidang tersebut. Karena individu-individu di negara-negara miskin tidak memperoleh keuntungan personal dari serangkaian eksternalitas positif yang berasal dari investasi yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pemberlakuan mekanisme pasar bebas justru akan menjauhkan upaya pendayagunaan investasi komplementer dari tingkat yang optimal. Kontras dengan teori Neoklasik, model pertumbuhan endogen menyarankan peran aktif dari kebijakan pemerintah dalam mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam formasi mutu modal manusia dan mendorong investasi swasta dalam industri yang membutuhkan teknologi tinggi.

Dari beberapa keunggulan teori pertumbuhan endogen, muncul beberapa kritik terhadap model ini. *Pertama*, teori pertumbuhan endogen memiliki asumsi yang tidak cocok untuk diterapkan di negara berkembang. Sebagai contoh, teori pertumbuhan ini mengasumsikan hanya terdapat satu sektor produksi semua sektor bersifat simetri. Situasi ini tidak menghasilkan pertumbuhan yang

memunculkan realokasi tenaga kerja dan modal diantara sektor-sektor yang ditransformasikan selama proses perubahan struktural. *Kedua*, teori ini tidak mampu untuk menguraikan sebab-sebab modal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertumbuhan di negara berkembang terhambat oleh serangkaian inefisiensi yang bersumber dari kelemahan infrastruktur, struktur kelembagaan yang tidak memadai, serta pasar barang dan pasar modal yang jauh dari kata sempurna. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini ternyata kurang mendapat perhatian dari model pertumbuhan endogen. Itulah sebabnya aplikasi teori pertumbuhan endogen dalam studi pembangunan ekonomi sangat terbatas jumlahnya, terlebih jika studi tersebut melibatkan perbandingan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Struktur insentif yang lemah di negara berkembang merupakan penyebabnya. Struktur insentif yang buruk tidak memungkinkan terciptanya akumulasi tabungan dan investasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang senantiasa tersendat-sendat. Inefisiensi alokasi sumber daya ditemui di berbagai perekonomian yang tengah mengalami transisi dari pasar tradisional ke pasar komersial. Teori-teori ini terlalu banyak memberikan perhatian kepada faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Ketiga*, serangkaian studi empiris terhadap nilai atau bobot prediktif teori-teori pertumbuhan endogen tidak mampu memberikan prediksi yang cukup akurat.

Eksternalitas menciptakan momentum dalam proses pertumbuhan karena perusahaan-perusahaan memasang kapital baru. Pertumbuhan kapital berarti pertumbuhan dari gabungan stok kapital yang terpisah dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, output dapat meningkat dengan proporsi konstan (A) dari gabungan stok kapital, dan tidak terjadi *diminishing returns*. Jadi dalam model pertumbuhan endogen tingkat pertumbuhan dapat tetap tumbuh konstan dalam kondisi tingkat pengembalian kapital yang kian menurun sebagai dampak

eksternal dari pertumbuhan teknologi. Tingkat pertumbuhan secara permanen dipengaruhi oleh tingkat tabungan. Tingkat tabungan yang lebih tinggi akan meningkatkan pertumbuhan tidak hanya pada level keseimbangan pendapatan.

## 6. Teori Pertumbuhan Rostow

Walt Whitman Rostow (1916-1979) atau yang biasa dikenal dengan W.W, Rostow mengungkapkan suatu teori tentang pertumbuhan ekonomi di dalam bukunya yang berjudul *The Stage of Economic Growth*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian adalah suatu proses dari berbagai perubahan, yang meliputi: (i) perubahan reorientasi organisasi ekonomi; (ii) perubahan pandangan masyarakat; (iii) perubahan dalam akumulasi modal dari yang tidak produktif ke yang lebih produktif; (iv) perubahan pandangan terhadap faktor alam bahwa alam tidak menentukan kehidupan manusia, tetapi manusia yang seharusnya mampu mengendalikan kekayaan alam, sehingga kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara jangka panjang.

Menurut Rostow terdapat 5 (lima) tahapan dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya (Machmud, 2016):

### 1) Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan fungsi-fungsi produksi yang terbatas, yaitu belum adanya ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta adanya batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai.

### 2) Masyarakat Pra-kondisi untuk Periode Lepas Landas (*The Precondition for Take Off*)

Tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai menerapkan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.

### 3) Periode Lepas Landas (*The Take Off*)

Interval waktu yang diperlukan untuk menghilangkan semua penghalang pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih diperluas. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, serta tabungan yang bersifat produktif juga meningkat atau melebihi jumlah pendapatan nasional. Industri-industri baru mulai berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.

### 4) Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)

Perkembangan berlangsung secara terus-menerus/berkelanjutan dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan kerja bertambah luas dengan menerapkan teknologi yang lebih modern. Investasi yang efektif serta tabungan meningkat dari 10% menjadi 20% dari pendapatan nasional yang berlangsung secara cepat. Output dapat melampaui pertumbuhan jumlah penduduk. Barang yang dulunya impor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak yang melampaui kekuatan industri pada masa *trade off* dengan penerapan teknologi modern.

### 5) Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

Sektor industri merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) pergerakan ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa. Pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Kesempatan kerja banyak tersedia sehingga pendapatan nasional cukup tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi nantinya dapat memenuhi tingkat konsumsi yang juga tinggi.

#### 2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

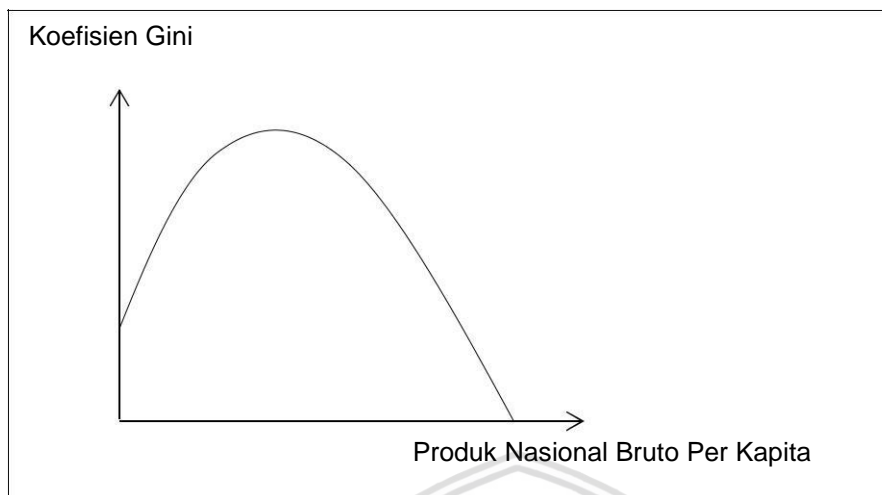
Ketimpangan atau kesenjangan (*disparitas*) merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan berarti terjadinya ketimpangan yang merupakan awal dari timbulnya masalah kemiskinan. Masalah kesenjangan ini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang saja, namun beberapa negara maju juga mengalaminya. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan yang terjadi, serta seringkali menemui kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya luas wilayah dan jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan negara berkembang, negara maju memiliki tingkat kesenjangan pendapatan yang relatif lebih kecil, ditambah pula dengan GNP dan GDP di negara maju relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang, sehingga tidak terlalu sulit dalam mengatasi angka kemiskinan di negara-negara maju.

Pada dasarnya, perbedaan pendapatan ini timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi yang lebih banyak, maka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Menurut pandangan Neoklasik, perbedaan pendapatan ini dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu penetapan hasil pembangunan ke bawah (*trickle down*) dan kemudian menyebar sehingga dapat menciptakan keseimbangan baru. Apabila proses tersebut belum mampu menurunkan tingkat pendapatan yang timpang, maka cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan sistem perpajakan dan subsidi (Machmud, 2016). Penetapan pajak pendapatan atau penghasilan ini nantinya akan mengurangi pendapatan penduduk yang berpenghasilan tinggi.



Sedangkan subsidi akan membantu penduduk berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya, cara ini cukup mampu dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu wilayah. Pajak yang telah dipungut dengan menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula tarif pajak yang harus dibayarkan) oleh pemerintah setempat digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, pemerintahan, subsidi, dan lain sebagainya. Dari sinilah akan terjadi proses redistribusi pendapatan yang dapat menurunkan angka ketimpangan.

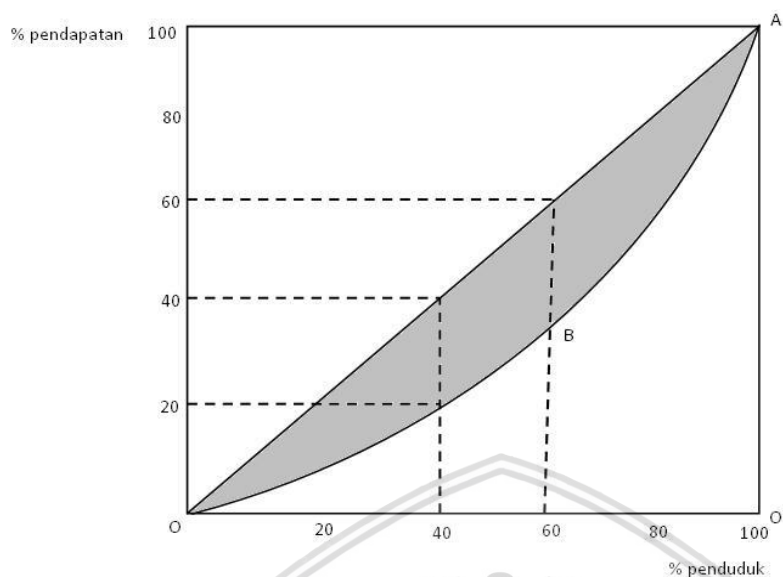
Beberapa ekonom telah memberikan perhatiannya terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah selama proses pembangunan berlangsung. Salah satunya adalah Simon Kuznets (1955) dengan membuat sebuah hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) yang menjelaskan bahwa mulanya ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata. Namun, setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, maka distribusi pendapatan akan menjadi semakin merata (Kuncoro, 1997). Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets yang terdapat pada Gambar 2.3 yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan disparitas distribusi pendapatan. Namun, dalam jangka panjang hubungan keduanya akan berkorelasi negatif.

**Gambar 2.3 : Kurva ‘U Terbalik’ Kuznets**

Sumber: Todaro, 2006.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan indeks Gini. Indeks Gini pertama kalinya dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi dari Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam makalahnya yang berjudul “*Variability and Mutability*” (Machmud, 2016). Indeks Gini merupakan koefisien yang berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), yang menjelaskan kadar pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisien Gini atau mendekati angka 0, maka semakin merata distribusi pendapatannya. Semakin besar koefisien Gini atau mendekati angka 1, maka semakin timpang distribusi pendapatannya. Jadi, tingkat pemerataan distribusi pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata atau dengan kata lain besarnya indeks Gini sama dengan 0 (nol). Machmud (2016) mengklasifikasikan tingkat ketimpangan pendapatan sebagai berikut:

- $G < 0,3$  artinya ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$  artinya ketimpangan sedang
- $G > 0,5$  artinya ketimpangan tinggi

**Gambar 2.4 : Kurva Lorenz**

Sumber: Todaro & Smith, 2011.

Indeks Gini dapat dihitung secara langsung melalui Kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Pada Gambar 2.4 sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan, sedangkan sumbu horisontal menunjukkan persentase jumlah penduduk. Garis diagonal OA merupakan garis pemerataan. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis OBA. Distribusi pendapatan dikatakan merata apabila garis lengkung OBA berada pada garis diagonal OA, pada posisi seperti ini 40% pendapatan diterima oleh 40% jumlah penduduk atau 60% pendapatan diterima oleh 60% jumlah penduduk. Jadi, apabila garis lengkung OBA semakin menjauhi garis diagonal OA, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Begitu pula sebaliknya, apabila garis lengkung OBA semakin mendekati garis diagonal OA, semakin merata distribusi pendapatannya.

Cara mengukur tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara luas daerah OBA yang diarsir dengan seluruh luas daerah yang berada di bawah garis diagonal (segitiga OO'A). Semakin melengkung artinya semakin meluas area yang dibagi, sehingga semakin

besar nilainya dan semakin besar pula tingkat ketimpangannya. Indeks Gini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (F_i + 1 - X_{i+1})^2$$

$$0 < G < 1$$

$$= 1 - \sum_{i=1}^n (F_i + 1 - X_{i+1})^2$$

Keterangan:

G : rasio Gini

F : proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas-i

X<sub>i+1</sub> : proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas-i

Y<sub>i+1</sub> : proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas-i

### 2.1.5 Pengangguran

Dalam proses pembangunan ekonomi di negara berkembang, jumlah pengangguran yang semakin bertambah akan memperparah masalah, terutama setelah adanya distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini dibuktikan dengan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perluasan kesempatan kerja berarti akan semakin mendorong tenaga kerja yang dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan, sehingga hal ini berdampak pula pada semakin banyaknya masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Artinya, dengan meluasnya kesempatan kerja selain akan memberikan penghasilan kepada masyarakat, sekaligus dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin dan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja semakin meningkat dan tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja, maka secara otomatis akan menjadi beban dalam proses pembangunan. Sebab peningkatan angka pengangguran akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita, meningkatkan angka kemiskinan, serta memperlebar jurang kesenjangan.

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tetapi tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha, yang bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau individu yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja. Berdasarkan cirinya pengangguran terbagi menjadi empat jenis, berikut diantaranya (Sukirno, 2006):

#### 1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran jenis ini muncul sebagai akibat dari timpangnya peningkatan jumlah pekerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tidak semua penawaran tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja mampu di serap seluruhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja namun belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, ataupun sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

## 2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran jenis ini terjadi pada sektor ekonomi yang dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi jumlah yang diperlukan. Artinya, tingkat produktivitas marjinal dari tenaga kerja adalah nol atau sangat rendah. Sehingga walaupun mereka bekerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan jumlah produksi mereka.

## 3) Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun, contohnya pada sektor yang membutuhkan tenaga kerja pada periode tertentu dalam satu tahun seperti pertanian, peternakan, ataupun perkebunan. Dimana kegiatan produksinya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan pada masa-masa lainnya.

## 4) Setengah Menganggur

Pengangguran jenis ini terjadi ketika suatu individu tidak dapat bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja, atau pekerja yang hanya memiliki jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Khusus di daerah-daerah perdesaan, pengangguran dibagi menjadi dua yaitu pengangguran terselubung (tersembunyi) dan pengangguran musiman. Sukirno mengatakan bahwa kedua jenis pengangguran tersebut sudah ada sejak sebelum Perang Dunia II. Setelah masa tersebut, masalah pengangguran terselubung, terutama di sektor pertanian menjadi semakin memburuk. Hal ini menyebabkan para pengangguran tersebut berpindah ke kota. Akan tetapi, perkembangan ekonomi di kota tidak mampu untuk menampung penduduk yang jumlahnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Akibatnya, saat ini tidak hanya daerah desa saja yang mengalami masalah pengangguran, tetapi daerah kota pun ikut mengalaminya (Sukirno, 2006).



Sama halnya dengan kemiskinan, pengangguran juga merupakan masalah yang cukup kompleks karena dipengaruhi dan mampu mempengaruhi faktor-faktor yang berhubungan terkait dengan aspek-aspek yang bersifat multidimensional. Badan Pusat Statistik beranggapan bahwa jika pengangguran tidak tertangani dengan baik dapat memicu kerentanan sosial dan dapat menyebabkan kemiskinan. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah angkatan kerja. Padahal tidak semua angkatan kerja dapat terserap sepenuhnya di pasar tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja akan menjadi pengangguran dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah setempat (Attibrizi, 2016).

Di negara sedang berkembang, permasalahan pengangguran disebabkan oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja meningkat dengan laju yang lebih pesat dibandingkan dengan perluasan lapangan kerja yang bersifat produktif penuh (bekerja 35 jam dalam seminggu). Pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (Sukirno, 2006):

- a) Tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja.  
Pengangguran akan terjadi jika jumlah angkatan kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia.
- b) Tidak seimbangnya struktur lapangan kerja.
- c) Tidak seimbangnya jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik yang tersedia di pasar tenaga kerja.
- d) Adanya peningkatan peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita pada seluruh struktur kerja di Indonesia.
- e) Tidak seimbangnya penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja di berbagai daerah.

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan (*demand*). Pengangguran tidak akan terjadi apabila kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat tertampung seluruhnya pada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah pengangguran pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran menjadi lebih kompleks. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah *supply* dan *demand* dari tenaga kerja, tetapi juga terdapat masalah lain seperti perubahan struktur umur penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan, dan lain sebagainya. Faktor lain yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang memadai, rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, dan adanya penduduk usia kerja yang masuk kategori angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka sering digunakan oleh pemerintah dalam menilai apakah kinerja di bidang ketenagakerjaan berjalan baik atau tidak. Konsep pengangguran terbuka secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengangguran yang pernah bekerja (memiliki pengalaman bekerja) dan pengangguran yang belum pernah bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja.

### 2.1.6 Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang mencerminkan kebutuhan dan pendukung aktivitas kehidupan. Salah satu sektor yang mendukung perekonomian Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan tersebut menyebabkan kegiatan pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor pertanian. Bahkan sebagian ahli ekonom menyatakan bahwa keberhasilan dari industrialisasi tergantung pada pembangunan pertanian yang dapat menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi (Rahardjo, 1986). Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan hasil produksi pertanian guna mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, peningkatan ekspor, peningkatan pendapatan para petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan dalam berusaha. Menurut Mubyarto, pertanian dalam arti luas mencakup pembudidayaan tanaman atau pertanian rakyat, perkebunan (termasuk perkebunan rakyat atau perkebunan besar), kehutanan, peternakan, dan juga perikanan (Machmud, 2016).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat di negara berkembang dan negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadikan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi (Arsyad, 1988). *Pertama*, dalam hal penyediaan input berupa tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor modern lainnya. Arsyad mengatakan jika perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor-sektor modern dibatasi, maka akan terjadi ketimpangan dalam proses pembangunan ekonomi. *Kedua*, sektor pertanian merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang dimaksud berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan yang berasal dari pendapatan. Arsyad menyatakan bahwa pendapatan pertanian

terhadap produk nasional di negara-negara miskin cukup tinggi, yaitu mencapai 50 persen dan sisanya disumbangkan oleh sektor-sektor non pertanian. Terbukti bahwa sejak tahun 1948 Indonesia mampu berswasembada beras. Peranannya dalam penyediaan lapangan kerja, sektor pertanian mampu menampung 37 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2015.

Mosher menyebutkan terdapat syarat-syarat dalam pembangunan pertanian, yang terdiri dari syarat mutlak dan syarat relatif. Syarat mutlak dari pembangunan pertanian meliputi: (i) adanya pasar untuk menampung hasil usaha tani; (ii) teknologi yang terus berkembang; (iii) tersedianya bahan-bahan serta peralatan produksi secara lokal; (iv) adanya perangsang produksi bagi petani; dan (v) tersedianya alat angkut yang lancar. Sedangkan syarat relatif dari pembangunan pertanian meliputi: (i) pendidikan; (ii) kredit produksi; (iii) kegiatan gotong royong para petani; (iv) perbaikan dan perluasan tanah pertanian; serta (v) perencanaan nasional dalam pembangunan sektor pertanian (Arsyad, 1988).

Kualitas pertumbuhan suatu sektor ekonomi dapat dinilai dari tingkat kompetisinya di pasar internasional. Hal ini dapat dilihat dari kinerja ekspor dan impor sektor yang bersangkutan. Untuk sektor pertanian sendiri, pertumbuhan ekspor masih belum diimbangi dengan penurunan impor komoditas sektor pertanian. Bahkan beberapa produk strategis pertanian yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, Indonesia masih saja mengimpor produk tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Setidaknya terdapat dua masalah mendasar pada sektor pertanian di Indonesia (Yustika, 2011). *Pertama*, kepemilikan lahan yang sangat kecil (sempit). Mengecilnya rata-rata kepemilikan lahan tersebut disebabkan oleh konversi lahan pertanian untuk kepentingan diluar pertanian, seperti pabrik, *real estate*, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. Hal semacam ini akan mengakibatkan menurunnya efisiensi dan produktivitas. *Kedua*, menyingkirkan kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian termasuk di

dalamnya para petani, yang selama ini masih dijadikan sebagai pihak yang selalu kalah dan tersingkirkan.

Rahardjo menyebutkan beberapa alasan terkait dengan pentingnya mengembangkan sektor pertanian (Rahardjo, 1986). *Pertama*, output dari sektor industri tentunya memerlukan dukungan daya beli masyarakat, karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk di negara berkembang, maka pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. *Kedua*, untuk menekan biaya produksi dari komponen upah diperlukan ketersediaan bahan makanan yang murah, sehingga upah yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya bagi para buruh. Hal ini dapat tercapai apabila produksi hasil pertanian, terutama pangan untuk dapat lebih ditingkatkan, sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. *Ketiga*, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, sehingga produksi bahan-bahan industri menjadi basis bagi pertumbuhan kedua sektor tersebut.

Pembahasan terhadap pembangunan pertanian di Indonesia, seringkali menyangkut-pautkan dengan transformasi struktural yang terjadi belakangan ini. Hal ini dibuktikan oleh semakin merosotnya kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB yang pada tahun 2015 sekitar 13,49 persen, sementara sektor industri pengolahan migas mencapai 20,99 persen dan industri pengolahan non migas mencapai 18,20 persen. Akan tetapi, menurunnya peranan sektor pertanian terhadap PDB tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan tenaga kerja yang semula bekerja di sektor pertanian ke sektor industri. Bahkan, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian di tahun 2015 mencapai 32,88 persen, sedangkan sektor industri hanya mencapai 13,53 persendari total angkatan kerja yang ada.

Meskipun kebijakan pemerintah daerah telah memprioritaskan sektor industri (industrialisasi) dalam proses pembangunannya, tetapi setidaknya sektor

pertanian tetap diperhatikan. *Pertama*, adanya keyakinan bahwa sektor pertanian memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal ini mungkin saja bisa terjadi jika produktivitas diperbesar sehingga dapat menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi, sehingga dapat memungkinkan mereka untuk menabung dan mengakumulasi modal. Di samping itu, dengan pendapatan yang lebih tinggi di kalangan petani, pemerintah bisa untuk menarik pajak tanah atau pajak pendapatan yang lebih tinggi. *Kedua*, apabila cara produksi pada sektor pertanian dapat lebih ditingkatkan, yaitu dengan teknologi, produktivitas akan menjadi lebih tinggi dan hasil pertanian menjadi lebih besar (khususnya di bidang pangan), maka sebagian beban tenaga kerja di sektor pertanian dapat di geser ke sektor industri. Dengan begitu, maka sektor pertanian dinilai sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor industri. Atas hal tersebut, seharusnya pembangunan pertanian dan pembangunan industri dapat dilakukan secara simultan atau bersama-sama, tanpa adanya fokus pada salah satu sektor (Rahardjo, 1986).

### **2.1.7 Peran Sektor Industri Dalam Pembangunan**

Proses pembangunan di Indonesia telah mengagendakan terjadinya pergeseran aktivitas ekonomi, dari yang semula fokus pada sektor pertanian kemudian beralih kepada sektor industri, atau sering dikenal dengan strategi industrialisasi. Dari waktu ke waktu proses industrialisasi memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti halnya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan per kapita, dan kesempatan kerja yang kian meningkat. Namun jika dilihat secara keseluruhan, jika pembangunan dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, maka pelaksanaannya harus ditekankan pada wilayah-wilayah perdesaan, khususnya pada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (Yustika, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat Rahardjo yang menyatakan bahwa industrialisasi dapat dinilai sebagai “kunci”



yang bisa membawa ke arah kemakmuran, setidaknya dapat dijadikan motor bagi pembangunan ekonomi (Rahardjo, 1986). Selain dapat meningkatkan produksi barang, industrialisasi diperkirakan pula dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin sempit di sektor pertanian.

Sadono Sukirno mendefinisikan industri ke dalam dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder (Sukirno, 2006). Sedangkan pengertian secara teori ekonomi dimana industri diartikan sebagai sekumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Machmud juga mendefinisikan industri ke dalam dua arti. Pertama, industri adalah himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, seperti industri kosmetik yang terdiri dari perusahaan penghasil produk kosmetik. Kedua, industri sebagai suatu sektor ekonomi yang melakukan kegiatan produktif untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, atau sering dikenal sebagai industri pengolahan (Machmud, 2016).

Sektor industri merupakan sektor yang cukup penting, sehingga harus terus dikembangkan karena produk-produk industri selalu memiliki “dasar tukar” (*term of trade*) yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan, serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sektor lainnya. Selain itu, sektor industri juga memiliki variasi produk yang cukup beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang lebih tinggi kepada pemakainya. Alasan lain adalah marjin keuntungan sektor industri lebih menarik dibandingkan dengan sektor lainnya. Keunggulan yang terakhir terkait dengan proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia.

Rahardjo menyebutkan beberapa alasan terkait dengan pentingnya mengembangkan sektor industri. *Pertama*, karena penanaman modal di sektor pertanian dirasa masih kurang menguntungkan atau dengan kata lain *marginal*

*rate of return* dari sektor pertanian yang masih rendah. *Kedua*, adanya perkembangan jumlah penduduk yang akan memunculkan hukum yang makin berkurang (*law of diminishing return*). *Ketiga*, pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung lambat, bahkan stagnan, yang disebabkan oleh adanya hambatan sosial dan institusional yang sulit diubah (Rahardjo, 1986). Terdapat empat argumentasi dalam konsep industrialisasi dan dua jenis pola dalam industrialisasi, yang masing-masing argumentasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut penjabarannya:

**Tabel 2.1 : Argumentasi Industrialisasi**

Jenis	Kelebihan	Kekurangan
Keunggulan Komparatif ( <i>comparative advantage</i> )	Industri akan unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasikan dengan baik	Jenis produk kurang diminati
Keterkaitan Industrial ( <i>industrial linkage</i> )	Mampu menggerakkan sektor lain	Kurang efisien
Kesempatan Kerja	Berbasis penciptaan lapangan kerja	Kurang dapat menggerakkan sektor-sektor lain
Loncatan Teknologi	Memacu perkembangan industri sektor lain	Boros devisa

Sumber: Machmud, 2016.

**Tabel 2.2 : Pola Strategi Industrialisasi**

Pola Strategi Industrialisasi	Kelebihan	Kekurangan
Pola Substitusi Impor	Industri akan tumbuh besar	Industri tidak kunjung dewasa (ketergantungan)
Pola Substitusi Ekspor	Menumbuhkan devisa negara	Tergantung pada pasar

Sumber: Machmud, 2016.

Sektor industri di Indonesia diharapkan mampu menjadi penggerak sektor-sektor lainnya. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia selalu diwarnai

dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Industrialisasi di Indonesia awalnya di dominasi oleh argumentasi keterkaitan industrial (*industrial linkage*), namun sekarang berubah menjadi argumentasi loncatan teknologi. Pola strategi industrialisasi di Indonesia awalnya mengembangkan pola substitusi impor, namun seiring dengan berkembangnya zaman berubah menjadi pola substitusi ekspor.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak berbeda jauh dengan kasus antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Mengacu pada hipotesis Kuznets, dimana pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat. Namun, ketika telah mendekati tahap akhir dari suatu proses pembangunan, maka jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang (Tambunan, 2015).

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menurut Todaro dan Smith dapat diidentifikasi sebagai berikut. *Pertama*, pertumbuhan yang cepat akan berakibat buruk pada masyarakat miskin, sebab mereka akan semakin terabaikan karena adanya perubahan struktural pertumbuhan modern. *Kedua*, kalangan pembuat kebijakan yang mengatakan bahwa pengeluaran publik dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan akan mengurangi dana yang digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan. *Ketiga*, kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan, dengan alasan sebagai berikut (Todaro & Smith, 2011).

- a) Kemiskinan akan membuat kaum miskin tidak mempunyai akses sumber modal, tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak memiliki peluang untuk

berinvestasi dan mempunyai banyak anak sebagai investasi di masa tua.

Berbagai faktor ini akan menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil.

- b) Data empiris menunjukkan kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung dan berinvestasi di negara mereka sendiri, walaupun sumber kekayaan mereka berasal dari negara mereka sendiri.
- c) Kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas. Strategi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin, selain akan memperbaiki kesejahteraan mereka, juga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.
- d) Peningkatan pendapatan kaum miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan investasi lokal.
- e) Penurunan kemiskinan secara masal akan menciptakan stabilitas sosial dan memperluas partisipasi publik dalam proses pertumbuhan.

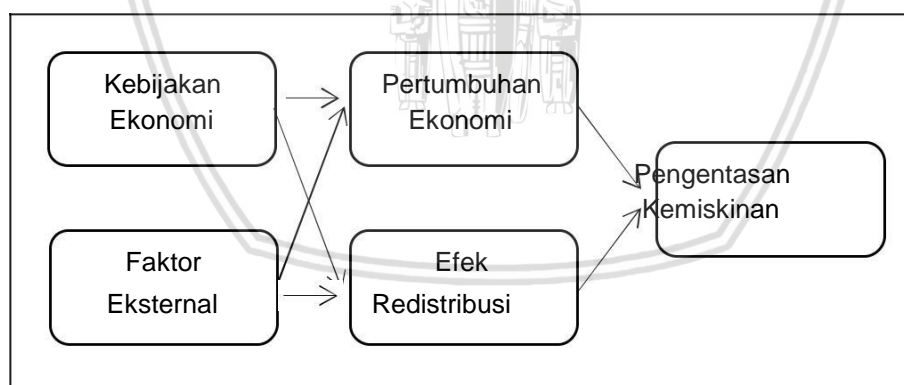
Telah banyak studi empiris yang menguji relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Seperti yang dilakukan oleh Hasan dan Quibria (2002) yang meneliti dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data panel pada 45 negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Kariba, serta Afrika Sub-Sahara. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kemiskinan memiliki korelasi yang negatif signifikan. Yang artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinannya (Tambunan, 2015).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yaitu efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau dalam bentuk

peningkatan dan pengurangan upah dari penduduk miskin. Dengan asumsi bahwa adanya mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi kepada penduduk miskin, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

War (2006) meneliti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi, atau dapat pula dicapai dengan redistribusi pendapatan. Kebijakan ekonomi dan faktor eksternal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, dengan semakin besarnya kapasitas perekonomian, maka pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur akan menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu pula dengan semakin meratanya distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, maka akan memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan (Hajiji, 2010).

**Gambar 2.5 : Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**

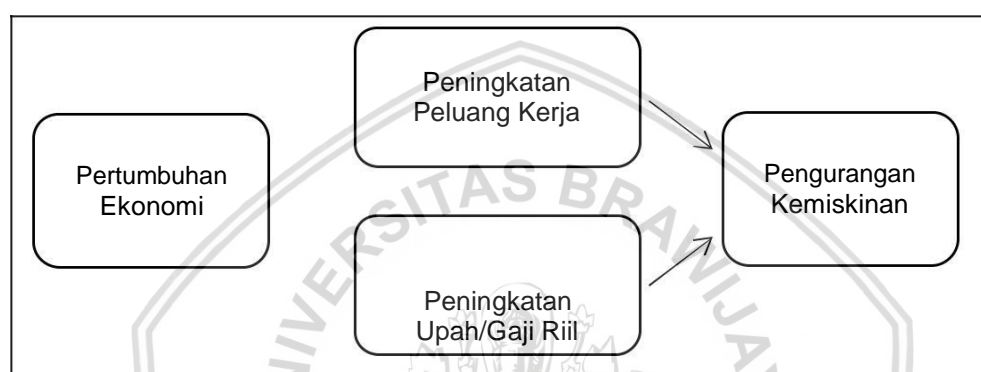


Sumber: Hajiji, 2010.

Menurut studi yang dilakukan oleh Sumarto terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Kuncoro, 1997). Yang artinya, ketika perekonomian tumbuh maka kemiskinan akan berkurang, dan ketika perekonomian menurun maka kemiskinan akan tumbuh kembali. Pertumbuhan yang berkelanjutan sangat penting dalam rangka

pengantasan kemiskinan. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Dollar dan Kraay menyatakan bahwa pertumbuhan PDB berhubungan positif dengan pendapatan per kapita penduduk miskin (Tambunan, 2015). Jika pertumbuhan rata-rata output meningkat sebesar 1 persen, maka akan membuat 1 persen peningkatan pendapatan penduduk miskin.

**Gambar 2.6 : Kerangka Pemikiran Teoritis: Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemsikinan**



Sumber: Tambunan, 2015.

### 2.2.2 Keterkaitan Antara Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Khomsan, et al., 2015). Ketimpangan identik dengan standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Semakin besar ketimpangan antar golongan masyarakat, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin. Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Menurut studi yang dilakukan oleh Sumarto penurunan ketimpangan akan mengurangi tingkat kemsikinan secara signifikan (Kuncoro, 1997). Salah satu indikator dari kemiskinan adalah ketimpangan, sebab pada dasarnya distribusi



pendapatan merupakan ukuran dari kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh masih terdapatnya hasil dari suatu pembangunan yang belum terdistribusi merata, sehingga belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata hanya akan menciptakan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat tertentu saja, sebaliknya distribusi pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 2.2.3 Keterkaitan Antara Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan saling berkaitan erat dan keduanya merupakan masalah yang cukup sulit untuk dipecahkan. Pengangguran pada akhirnya akan berujung pada kondisi miskin, sebab masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung memiliki akses yang terbatas untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Menurut Sukirno, dampak terburuk dari suatu pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan seseorang, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan orang tersebut (Sukirno, 2006). Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan seseorang akibat menganggur, tentu akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan. Ketika pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan berbagai kekacauan politik dan sosial, yang pada gilirannya akan berdampak buruk pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut Tambunan, pengangguran mempengaruhi kemiskinan melalui dua cara (Tambunan, 2015). *Pertama*, apabila konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka pengangguran akan secara langsung berdampak pada peningkatan kemiskinan dan dalam jangka waktu yang cukup singkat. *Kedua*, apabila konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat

ini, maka pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

#### **2.2.4 Keterkaitan Antara Sektor Pertanian dan Kemiskinan**

Sektor pertanian dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Peningkatan *share* sektor pertanian dalam struktur PDRB di suatu wilayah mengindikasikan bahwa *value added* (nilai tambah) sektor pertanian meningkat. Peningkatan nilai tambah ini menunjukkan produktivitas rata-rata per pekerja juga mengalami peningkatan. Selanjutnya hal ini akan berimplikasi pada tingkat upah yang lebih besar. Sebab nilai produksi marginal tenaga kerja menjadi patokan dalam pembayaran upah, atau dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan sama dengan nilai produksi tambahan yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Sehingga pendapatan petani meningkat dan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka hingga keluar dari garis kemiskinan (Fitri, 2016).

#### **2.2.5 Keterkaitan Antara Sektor Industri dan Kemiskinan**

Sektor industri dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Perkembangan sektor industri dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori Lewis, yang beranggapan bahwa adanya penambahan tenaga kerja pada sektor industri akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena fungsi produksi di sektor industri belum mencapai titik optimal atau masih berada pada wilayah *increasing return* (Todaro & Smith, 2011). Kondisi ini pada akhirnya akan membuat tingkat upah di sektor industri relatif tinggi. Tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan peningkatan pendapatan pada tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut. Semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap oleh sektor industri berarti semakin banyak pula tenaga kerja yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi empiris yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para ahli di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.3 : Penelitian Terdahulu**

No.	Judul & Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
1	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan : Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010-2013  Ririn Indah Safitri (2015)	Persentase Penduduk Miskin, Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.	Regresi Data Panel	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2.	<i>Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth</i>	Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan (Gini) dan Pertumbuhan Ekonomi.	Regresi Data Panel	Pertumbuhan dan redistribusi pendapatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan selama tahun 2000-2006. Setelah 2006, penurunan pendapatan per kapita ditambah dengan ketimpangan yang semakin tinggi

	Alberto Javier Iniguez-Montiel (2014)			akan kembali meningkatkan angka kemiskinan.
3.	Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin  Hermanto Siregar, Dwi Wahyunarti (2007)	Jumlah penduduk miskin, PDRB, <i>Share</i> Pertanian, <i>Share</i> Industri, Jumlah Populasi, Inflasi, Persentase lulusan SMP, Persentase lulusan SMA, Persentase lulusan Diploma, <i>Dummy</i> (krisis dan non krisis).	Regresi Data Panel	Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, <i>share</i> pertanian dan <i>share</i> industri berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan inflasi dan populasi penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
4.	<i>Pro Poor Growth</i> Tingkat Provinsi di Indonesia  Atik Mar'atis Suhartini (2011)	Jumlah Penduduk Miskin, Sektor Pertanian, RLS Laki2, RLS Perempuan, Pengeluaran Investasi Pemerintah, Jumlah Penduduk, Ketimpangan.	Regresi Data Panel  <i>Poverty</i> <i>Equivalent</i> <i>Growth Rate</i> (PEGR)	Sektor pertanian dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
5.	Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Sektor Pertanian, Industri, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Perdagangan,	Regresi Data Panel  <i>Pro Poor</i> <i>Growth Index</i> (PPGI)	Pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka kemiskinan. Tetapi peningkatan ketimpangan pendapatan menjadi penghambat.

	Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008  Ajid Hajji (2010)	Hotel dan Restoran, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa.		Sektor industri dan pertanian, listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan.
6.	Analisis Transformasi Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur  Tsalatsatun Masfiatul Fitri (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, <i>Share</i> Industri Pengolahan, <i>Share</i> Pertanian, Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan.	<i>Treatment Effect</i> (model probit dan model <i>least square</i> )	Transformasi ekonomi Jawa Timur memperburuk tingkat kesejahteraan yang diukur dari tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan. <i>Share</i> industri akan menurunkan ketimpangan. <i>Share</i> pertanian akan menurunkan kemiskinan.
7.	Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara 2000-2010  Anton Tri Wijayanto (2016)	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Gini, PDRB	Regresi Data Panel (dua persamaan)  <i>Pro Poor Growth Index</i> (PPGI)	Pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara telah bersifat pro kemiskinan (ppg) yang ditandai dengan indeks ppg sebesar 0,66. Sektor yang berpengaruh dominan dalam pengentasan kemiskinan sektor

				bangunan dan konstruksi; sektor angkutan dan komunikasi.
8.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Hubungannya dengan Keberpihakan Kepada Masyarakat Miskin di Indonesia  Ali Attibrizi (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan, IPM, dan Pengangguran.	Regresi Data Panel dengan menggunakan Metode <i>Path</i> <i>Analysis</i>  <i>Pro Poor</i> <i>Growth Index</i> (PPGI)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran Pertumbuhan ekonomi tergolong <i>pro poor</i> .

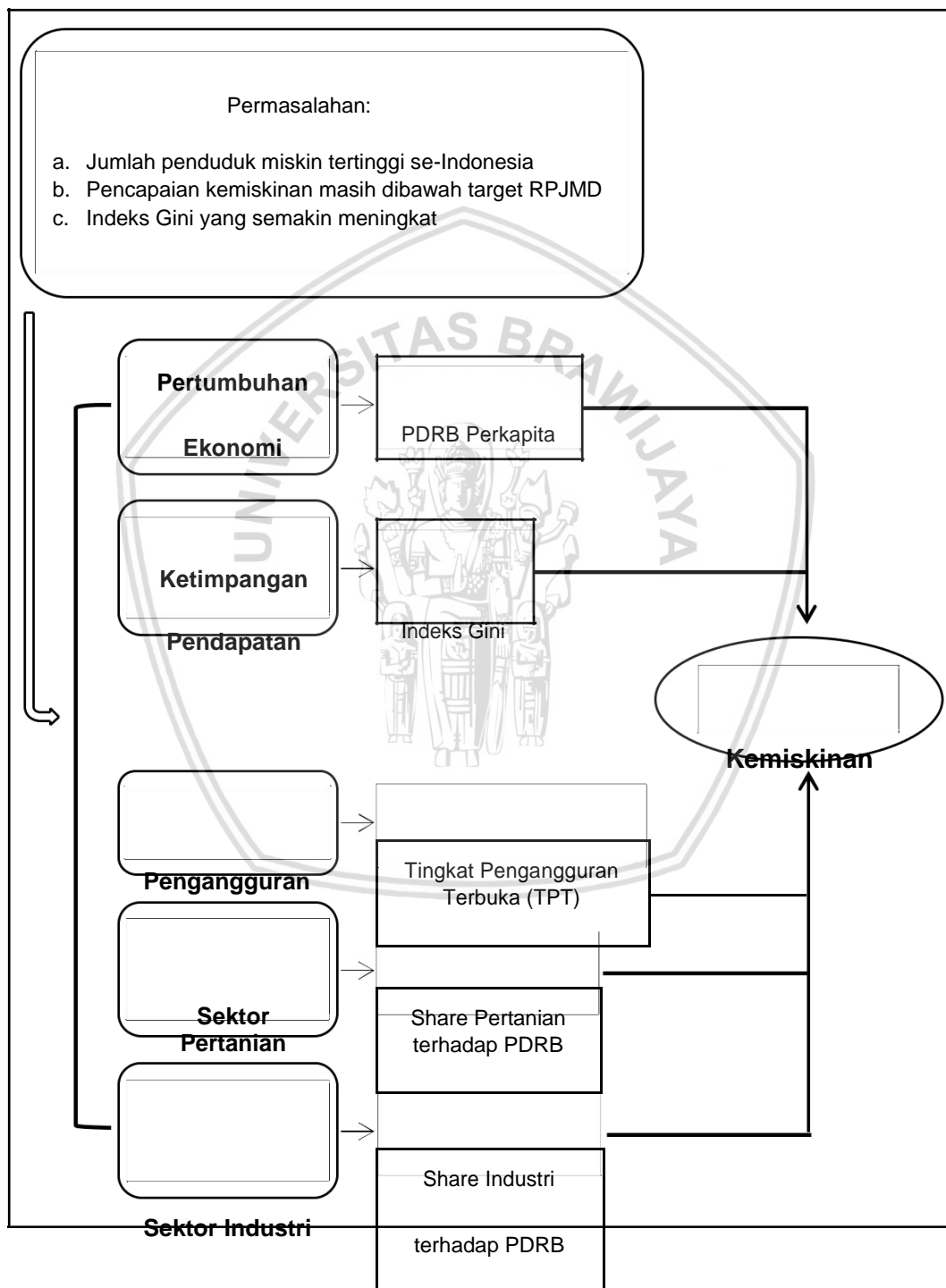
Sumber: Penulis, 2018.



## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat dilihat melalui bagan berikut:

**Gambar 2.7 : Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis, 2018.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab suatu permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis masih harus di uji terlebih dahulu karena hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Di duga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.
- 2) Di duga variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.
- 3) Di duga variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.
- 4) Di duga variabel sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.
- 5) Di duga variabel sektor industri berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian diklasifikasikan menjadi dua, penelitian dasar/murni dan penelitian terapan. Penelitian dasar semata-mata bertujuan untuk pengembangan dan perbaikan teori yang sudah ada, bukan untuk tujuan penerapan teori. Sedangkan penelitian terapan (*applied research*), merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu (Kuncoro, 2013). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan dengan proses pengumpulan data yang kemudian di analisis secara sistematis guna memilih keputusan tertentu.

Berdasarkan metode yang digunakan, penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimental. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimental aktivitas atau karakteristik yang di percaya menyebabkan perubahan maka disebut sebagai variabel bebas, sedangkan perubahan atau akibat yang diperhitungkan akan terjadi atau tidak terjadi disebut variabel terikat, peneliti mengendalikan setidaknya satu variabel bebas dan mengamati akibat yang terjadi pada satu atau lebih variabel terikat. Sehingga penelitian ini merupakan studi yang menyelidiki hubungan sebab-akibat, menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel bebas kepada variabel terikat (Kuncoro, 2013).

### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dijelaskan. Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel penjelas. Ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan sektor pertanian, serta sektor industri terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 (selama 7 tahun). Alasan dari pemilihan periode penelitian didasarkan pada anggapan bahwa selama periode tersebut, variabel-variabel bebas diharapkan mampu menjelaskan sekaligus memberikan informasi dengan tepat terkait dampaknya terhadap variabel terikat. Di samping itu dikarenakan adanya pertimbangan atas faktor ketersediaan data.

### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan data rasio adalah data yang diukur dengan suatu proporsi, contohnya seperti persentase kemiskinan.

Berdasarkan dimensi waktu, data diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu data runtut waktu (*time series*), data silang tempat (*cross-section*), dan data panel (*pooling*). Data runtut waktu (*time series*) merupakan data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Kemudian data silang tempat (*cross-section*) merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu.

Yang terakhir data panel (*pooling*) adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section*. Pada kasus ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data *pooling*, yang menggabungkan data dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai data *cross-section*, dan menggunakan periode 2009 sampai 2015 sebagai data *time series*.

Berdasarkan sumbernya, pada umumnya data bersumber dari data interval (berasal dari dalam organisasi tertentu), data eksternal (berasal dari luar organisasi), data primer (diperoleh dari survei lapangan yang dilakukan), dan data sekunder (biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari publikasi pada situs resmi berbagai instansi, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dan lain sebagainya.

Alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini yaitu efektivitas dan penghematan waktu. Di samping itu, Kuncoro juga menyebutkan kelebihan menggunakan data sekunder, diantaranya (Kuncoro, 2013):

- 1) Melalui pemantauan data sekunder, secara kontinu dapat mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi. Jika perubahan yang terjadi bersifat negatif, maka dapat dengan mudah mengantisipasi perubahan tersebut.
- 2) Melalui data sekunder, peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari permasalahan yang dihadapi.
- 3) Sebelum menentukan keputusan, perlu menyusun terlebih dahulu beberapa alternatif keputusan. Tersedianya informasi yang akurat dan relevan dari data sekunder dapat membantu dalam penyusunan alternatif keputusan.

**Tabel 3.1 : Jenis Data, Sumber Data, dan Variabel Data**

No	Jenis	Sumber	Variabel
1	Persentase Penduduk Miskin pada 38 Kab/Kota di Jawa Timur (%)	BPS	Kemiskinan (POV <sub>it</sub> )
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	BPS	Pertumbuhan Ekonomi (GRO <sub>it</sub> )
3	Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Koefisien Gini)	BPS	Ketimpangan Pendapatan (GINI <sub>it</sub> )
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	BPS	Pengangguran (UNP <sub>it</sub> )
5	Share Pertanian (%)	BPS	Sektor Pertanian (AGR <sub>it</sub> )
6	Share Industri (%)	BPS	Sektor Industri (IND <sub>it</sub> )

Sumber: Penulis, 2018.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam suatu penelitian, serta pengukuran dari variabel-variabel tersebut. Definisi operasional sangat berguna untuk memudahkan dalam memahami variabel-variabel yang di teliti.

#### 1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari segi ekonomi suatu individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015 dan dinyatakan dalam satuan persen (%).



## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDRB dasar harga konstan dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Berikut rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi:

$$(-1) = \frac{\text{PDRB}_{t+1} - \text{PDRB}_t}{\text{PDRB}_t} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita merupakan PDRB yang telah di bagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil penduduk suatu negara. Berikut rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi per kapita:

$$= \frac{\text{PDRB}_{t+1} - \text{PDRB}_t}{\text{PDRB}_t} \times 100\%$$

## 3. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Indeks Gini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Apabila Indeks Gini bernilai 0, maka terjadi “kemerataan sempurna”. Namun jika nilai dari Indeks Gini bernilai 1, maka terjadi “ketimpangan sempurna”. Semakin tinggi nilai rasio gini, maka semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara, begitu pula sebaliknya.

Ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan ketidakmerataan rendah berkisar antara 0.20-0.35 (Yustika, 2004). Berikut rumus untuk menghitung indeks gini:

$$= 1 - \sum_{i=1}^n (1 + \dots - i)]$$

#### 4. Pengangguran

Pengangguran merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai untuk bekerja. Pada penelitian ini, untuk mengukur variabel pengangguran menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$= \frac{\dots}{\dots} \times 100\%$$

#### 5. Sektor Pertanian dan Sektor Industri

*Share* sektor pertanian dan *share* sektor industri merupakan kontribusi kedua sektor tersebut (pertanian dan industri) dalam menyumbang PDRB Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah distribusi PDRB dari sektor pertanian dan sektor industri pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2015). Pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dilakukan dengan mencatat dan mengkaji data diperoleh dari jurnal-jurnal, *website* instansi, maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

### 3.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang jumlah keseluruhannya sebanyak 38 Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini tidak dilakukan metode sampling dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi riil yang ada.

### 3.7 Metode Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan data panel. Secara umum, analisis regresi berkaitan dengan studi ketergantungan dari suatu variabel, yaitu variabel terikat (*depenedent variable*), pada satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*). Sedangkan arti dari model regresi berganda (*multiple regression model*), yaitu suatu model di mana variabel tak bebas (terikat) tergantung pada dua atau lebih variabel bebas (Firdaus, 2011).

Menurut Wibisono (2005), data panel memiliki beberapa keunggulan diantaranya sebagai berikut (Ajija, 2011):

- 1) Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
- 2) Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- 3) Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- 4) Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom-df*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- 5) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- 6) Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dari keunggulan-keunggulan data panel yang telah disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model data panel tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik (Verbeek, 2000; Gujarati, 2003; Aulia, 2004; Wibisono, 2005; dan Kurnia, 2013).

### 3.7.1 Penentuan Model

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Regresi data panel merupakan teknik analisis yang menggabungkan *cross section* (data beberapa objek) dan *time series* (data tahunan). Beberapa metode analisis data panel dalam penelitian ini diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$= + + + + + + e$$

Keterangan:

$ROV_{it}$  : Kemsikinan (%)

$GRO_{it}$  : Pertumbuhan Ekonomi (%)

$GINI_{it}$  : Ketimpangan Pendapatan (indeks gini)

$UNP_{it}$  : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

$AGR_{it}$  : *Share* Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)

$IND_{it}$  : *Share* Sektor Industri terhadap PDRB (%)

$\alpha$  : Intersep

$\beta_1 - \beta_5$  : Koefisien variabel bebas

$e_{it}$  : Error term

$i$  : Data *Cross Section* 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

$t$ : Data *Time Series* tahun 2009-2015

### 3.7.2 Pemilihan Model Estimasi

Dalam analisis data panel, terdapat model-model estimasi yang dapat dilakukan, yaitu *fixed effect* dan *random effect*. Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model tersebut maka harus melakukan serangkaian pengujian. Sebelumnya, akan dijelaskan secara lebih rinci macam-macam dari model estimasi tersebut:

#### 1. Model *Common Effect*

Pendekatan ini hanya mengkombinasikan data *time series* dengan *cross section* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan antar individu. Pada model *common effect* ini, diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu, sehingga bisa menggunakan metode OLS (*Ordinary Least*

*Square*) untuk mengestimasi model *common effect* ini. Persamaan regresi yang digunakan dalam metode OLS dapat dituliskan sebagai berikut:

$$= \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \dots$$

## 2. Model *Fixed Effect*

Pendekatan *common effect* yang mengasumsikan bahwa intersep maupun koefisien regresi (*slope*) adalah sama antar individu maupun antar waktu, namun kondisi seperti ini sangat berbeda dari realita sebenarnya. Karakteristik antar individu jelas berbeda. Karena itu pendekatan *fixed effect* mengestimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk mengatasi adanya perbedaan intersep tersebut. Pendekatan *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu, tetapi intersepnya sama antar waktu (*time variant*). Di samping itu, model *fixed effect* ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu. Untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut, maka digunakan metode atau teknik variabel *dummy*, sehingga teknik ini seringkali disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Yang diformulasikan sebagai berikut:

## 3. Model *Random Effect*

Dimasukkannya variabel *dummy* di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktauan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Masalah ini bisa diatasi dengan memasukkan parameter-parameter yang berbeda antar individu maupun antar waktu ke dalam *error* yang dikenal sebagai metode *random effect*. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu.



Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan  $v_{it}$  terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh  $\varepsilon_{it}$  yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu  $\mu_{it}$ . Dalam hal ini variabel gangguan  $\mu_{it}$  adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Karena itu model *random effect* juga sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM).

### 3.7.3 Pengujian Kesesuaian Model

Dari ketiga model diatas, yaitu model kuadrat terkecil (*pooled least square model*), model tetap (*fixed effect model*), atau model acak (*random effect model*), maka di pilih salah satu model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Untuk memilih salah satu diantara ketiga model tersebut, perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa metode. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Uji Chow (*chow test*)

*Chow test* merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM), dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Pooled Least Square Model (Restricted)*

$H_1$  : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Apabila nilai *chow statistic* (F statistik) lebih kecil dari alpha 5 persen (0,05) maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Ketika hasilnya menolak  $H_0$ , maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

## 2. Uji Hausman (*hausman test*)

Hausman Test merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model* (REM)

$H_1$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari *Chi Square*, atau bisa juga dengan menggunakan nilai probabilitas (*p-value*). Jika *p-value* lebih kecil dari alpha 5 persen (0,05) maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Ketika hasilnya menolak  $H_0$ , maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

## 3. Uji Lagrange Multiplier (*LM test*)

Uji *Lagrange Multiplier* berguna untuk memilih apakah model *Random Effect* (REM) lebih baik daripada model *Pooled Least Square* (PLS). Hipotesis dalam uji *Lagrange Multiplier* adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Pooled Least Square* (PLS)

$H_1$  : *Random Effect Model* (REM)

Apabila nilai Cross-section Breusch-Pagan kurang dari alpha 5 persen (0,05) maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Ketika hasilnya menolak  $H_0$  maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

### 3.7.4 Pengujian Statistik

#### 1. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Secara garis besar, uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial atau individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  terhadap nilai

$t_{\text{tabel}}$  pada tingkat kepercayaan  $\alpha$  (alpha) yang digunakan ( $\alpha = 1\%$ ;  $5\%$ ; atau  $10\%$ ).

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Jika nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

$H_1$  : Jika nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

## 2. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) secara simultan atau bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $F_{\text{hitung}}$  dan  $F_{\text{tabel}}$  pada tingkat kepercayaan  $\alpha$  (alpha) tertentu. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  :  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  ( $\alpha = 0,05$ ), maka variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

$H_1$  :  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $\alpha = 0,05$ ), maka variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

## 3. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Uji  $R^2$  digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) yang dimasukkan ke dalam model yang dapat mempengaruhi variabel terikat (*dependent variable*). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mempunyai nilai antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Sebaliknya, semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Koefisien determinasi, akan semakin besar apabila kita terus menambah variabel bebas ke dalam model, meskipun penambahan variabel bebas tersebut belum tentu memiliki pembenaran dari teori ekonomi. Karena

adanya kelemahan ini, maka para ahli ekonometrika telah mengembangkan alternatif lain agar  $R^2$  tidak merupakan fungsi dari variabel bebas, yakni  $R^2$  yang disesuaikan (*adjusted- $R^2$* ).

### 3.7.5 Pengujian Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam asumsi klasik pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) memiliki tujuan untuk menguji apakah sebaran data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak normal. Upaya yang dapat dilakukan untuk menguji normal atau tidaknya sebuah data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-bera. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi distribusi data dapat dilakukan melalui perbandingan antara nilai probabilitas Jarque-bera dengan tingkat toleransi kesalahan ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu sebesar 5 persen.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan antar variabel bebas dalam suatu regresi. Apabila terdapat masalah tersebut, maka akan melanggar salah satu asumsi dalam metode OLS yaitu tidak ada hubungan linear antar variabel bebas (*independent variable*). Akibat adanya multikolinearitas ini akan sulit untuk mendapatkan estimasi yang tepat dari regresi yang dilakukan. Terdapat tiga cara untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas pada sebuah model, diantaranya:

- a) Nilai  $R^2$  yang terlalu tinggi (lebih dari 0,8) tetapi t-statistik tidak ada atau hanya sedikit yang signifikan.
- b) Nilai F-statistik yang signifikan, tetapi t-statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan.

- c) Dengan melihat matriks korelasi. Jika nilai koefisien korelasi antar variabel independen dibawah 0,8 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas, begitu pula sebaliknya.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam persamaan regresi adalah bahwa parameter dalam model regresi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka semua residual atau *error* harus mempunyai varian yang sama, kondisi ini disebut dengan homokedastisitas dan bila asumsi tersebut tidak dipenuhi maka muncul masalah heterokedastisitas (varian tidak konstan). Heterokedastisitas akan sering ditemui pada data *cross-section*, sementara data *time series* jarang mengandung unsur ini. Heterokedastisitas masih menghasilkan estimator yang linear dan tidak bias namun tidak lagi efisien karena tidak memiliki varian yang minimum. Untuk mendeteksinya dapat menggunakan metode *Generalised Least Square (Cross-section Weight)* yakni dengan membandingkan *sum square resid* pada *Weighted Statistic* dengan *sum square resid* pada *Unweighted Statistic*. Jika *sum square resid* pada *Wighted Statistic* lebih kecil dari *sum square resid* pada *Unweighted Statistic*, maka terjadi heterokedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi dari metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain. Autokorelasi umumnya terjadi pada data *time series* sedangkan pada data *cross section* masih jarang ditemui. Uji autokorelasi yang dilakukan tergantung pada jenis data dan sifat

model yang digunakan. Autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dari estimatornya. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dapat dilakukan dengan melakukan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Atau dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai *Durbin Watson (DW)* dengan nilai *DW*-tabel. Kerangka identifikasi autokorelasi terangkum dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Kerangka Identifikasi Autokorelasi**

Nilai DW	Hasil
$0 < DW < dL$	Terdapat autokorelasi positif
$dL < DW < dU$	Hasil tidak dapat ditentukan
$dU < DW < 2$	Tidak terdapat autokorelasi
$2 < DW < 4-dL$	Tidak terdapat autokorelasi
$4-dU \leq DW \leq 4-dL$	Hasil tidak dapat ditentukan
$dU < d < 4-dU$	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Gujarati, 2004.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, sekaligus merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa. Dikarenakan letaknya berada di bagian timur Pulau Jawa - Indonesia dan berbatasan langsung dengan Selat Bali, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan memiliki lokasi yang strategis dan cukup baik untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan maupun perdagangan. Sebagai buktinya, Provinsi Jawa Timur telah dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi sekitar 14,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak pada  $110.0^{\circ}$  -  $114.4^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7.12^{\circ}$  -  $8.48^{\circ}$  Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur secara langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, Selat Bali di sebelah timur, Selat Jawa di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas daratan Provinsi Jawa Timur mencapai  $47.799,75 \text{ km}^2$ , sedangkan luas lautan mencapai  $110.764,28 \text{ km}^2$ . Secara umum, Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Jawa Timur daratan memiliki proporsi hampir mencapai 90% atau sekitar  $43.019,775 \text{ km}^2$ , sementara Kepulauan Madura memiliki luas sebesar 10% dari keseluruhan luas wilayah Jawa Timur atau sekitar  $4.779,975 \text{ km}^2$ .

Berdasarkan topografinya, Provinsi Jawa Timur dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) dataran, diantaranya dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian 15-45 meter di atas permukaan laut. Dataran sedang merupakan daerah dengan ketinggian 45-100

meter di atas permukaan laut. Sementara dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Secara umum, topografi Jawa Timur berupa pegunungan, perbukitan, dan kepulauan. Oleh karena itu, Jawa Timur kaya akan sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, dan potensi pertambangan iklim di daerah Jawa Timur termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Rata-rata suhu di Provinsi ini berkisar antara 21°C - 34°C, dan curah hujan rata-rata mencapai 1.900 mm per tahunnya, dengan musim hujan yang berlangsung selama 100 hari.

Secara administratif, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, dengan total keseluruhan mencapai 38 kabupaten/kota, yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Kota Surabaya dijadikan sebagai ibukota provinsi. Di samping itu, Jawa Timur memiliki 287 pulau, 662 kecamatan, dan 8.523 desa. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), diantaranya sebagai berikut:

- Bakorwil I Madiun, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Nganjuk.
- Bakorwil II Bojonegoro, yang meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan.
- Bakorwil III Malang, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.

- Bakorwil IV Pamekasan, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Dari sisi demografis, Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, yang jumlahnya mencapai 38.847.561 jiwa pada tahun 2015. Yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 19.172.610 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 19.674.951 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama kurun waktu 2010-2015 mencapai 0,67% per tahun. Sementara jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2.848.583 jiwa, dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebesar 125.706 jiwa.

Jumlah penduduk yang tinggi tentu saja menandakan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur juga semakin meningkat. Kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 812,72 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan luas lahan menjadi berkurang, khususnya yang diperuntukkan bagi pemukiman yang juga semakin sempit. Keterbatasan lahan pemukiman menjadi permasalahan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Timur. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya pengefektifan program keluarga berencana. Kawasan perkotaan pada umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Pada tahun 2010, wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Surabaya yaitu sebesar 8.353 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 381 jiwa/km<sup>2</sup>. Perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dimana Kota Surabaya memiliki tingkat kepadatan sebesar 21,92 kali lipat jika dibandingkan

dengan Kabupaten Pacitan, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk lebih memilih untuk tinggal di daerah perkotaan yang merupakan pusat aktivitas ekonomi. Banyaknya aktivitas ekonomi di daerah perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Namun di sisi lain, tingkat kepadatan kota yang sangat tinggi akan menjadi masalah yang besar jika daya dukung kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk sehingga timbul pemukiman-pemukiman kumuh, yang akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan.

Mayoritas penduduk Jawa Timur merupakan Suku Jawa yang menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Pada umumnya, penduduk di Provinsi Jawa Timur menganut agama Islam, tetapi sebagian ada pula yang menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jawa Timur memiliki beragam kesenian yang khas. Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya, Jawa Timur juga memiliki kebudayaan yang beragam, seperti halnya karapan yang ada di Madura, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kondisi sosial dapat digambarkan melalui kondisi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk kemudian dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 7,05 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,14 tahun pada tahun 2015. Selain itu, persentase angka melek huruf penduduk Jawa Timur dari 92,23 persen pada tahun 2014

menjadi 92,30 persen pada tahun 2015. Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Berikut rincian pencapaian pembangunan indikator pendidikan selama Tahun 2014-2015.

**Tabel 4.1 : Pencapaian Pembangunan Indikator Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan 2015**

Sasaran / Indikator	2014	2015
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut kelompok umur (%)		
a. Sekolah Usia SD/MI (7-12 tahun)	105,86	108,64
b. Sekolah Usia SMP/MTs (13-15 tahun)	90,31	91,31
c. Sekolah Usia SMA/MA (15-18 tahun)	62,67	80,02
2. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut kelompok umur (%)		
a. Sekolah Usia SD/MI (7-12 tahun)	96,98	97,38
b. Sekolah Usia SMP/MTs (13-15 tahun)	80,94	81,16
c. Sekolah Usia SMA/MA (15-18 tahun)	60,00	60,31
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,05	7,14
4. Angka Melek Huruf umur 15 tahun ke atas	92,23	92,30
5. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar		
a. Jenjang SD/MI Sederajat	29,15	29,97
b. Jenjang SMP/MTs Sederajat	17,89	18,75
c. Jenang SMA/MA Sederajat	13,86	13,96
d. Perguruan Tinggi	5,41	5,88

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah

Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 105,86 pada tahun 2014 menjadi 108,64 pada tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan dari 90,31 pada tahun 2014 menjadi 91,31 pada tahun 2015. Demikian pula dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat yang juga mengalami peningkatan cukup besar yaitu dari 62,67 pada tahun 2014 menjadi 80,02 pada tahun 2015.

**Tabel 4.2 : Pencapaian Pembangunan Indikator Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dan 2015**

Sasaran / Indikator	2009	2015
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	31,41	24,00
2. Angka Harapan Hidup (tahun)	69,35	70,68
3. Banyaknya Pondok Bersalin Desa (Polindes)	5.775	4.398
4. Banyaknya Posyandu	45.310	46.016
5. Banyaknya Puskesmas	948	960
6. Banyaknya Rumah Sakit		
a. Rumah Sakit Pemerintah	55	56
b. Rumah Sakit Swasta	159	160

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur, selain ditempuh melalui sektor pendidikan juga dilakukan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur dalam bidang kesehatan. Pembangunan dalam bidang kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan



sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran utamanya adalah: (1) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatkan pengendalian penyakit; (3) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Berikut rincian pencapaian pembangunan indikator kesehatan selama Tahun 2014-2015.

## **4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **4.2.1 Kondisi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur**

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah dituntaskan dengan menggunakan satu pengertian saja. Menurut Yustika (2007) apabila kemiskinan di pandang sebagai masalah ekonomi, maka dapat diartikan sebagai rendahnya pendapatan per kapita dari suatu individu dan/atau keluarga. Namun apabila kemiskinan di pandang sebagai masalah sosial, maka dapat dikatakan adanya keterbatasan kemampuan suatu individu untuk terlibat dalam proses pembangunan, diakibatkan oleh kurangnya keterampilan dan pendidikan, bahkan pengucilan sosial (*social exclusion*), sehingga membuat tingkat kesejahteraan individu tersebut menurun.

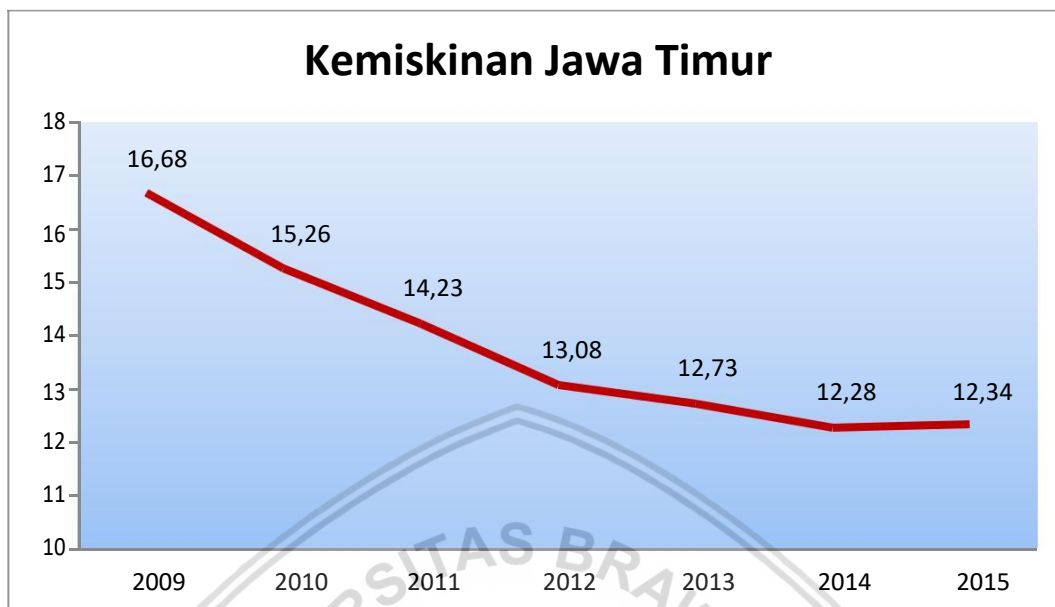
Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan guna bertahan hidup dan bekerja (BPS, 2009). Kemudian, berbagai kebutuhan pokok minimum tersebut diukur berdasarkan finansial yang dinyatakan

dalam bentuk uang, atau dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pengentasan kemiskinan termasuk dalam tujuan utama pembangunan ekonomi, melalui peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Sering kali kemiskinan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi dan kualitas faktor produksi. Selain itu, disebabkan pula oleh kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah pembangunan kurang dan/atau belum sesuai dengan kemampuan dari pada masyarakatnya, sehingga sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh atau merasakan manfaat dari proses pembangunan yang dihasilkan.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 4,78 juta jiwa di tahun 2015. Meskipun secara umum tingkat kemiskinan Jawa Timur menurun mengikuti *trend* nasional, namun angka kemiskinan Jawa Timur masih berada di atas rata-rata nasional. Jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2009 hingga 2014, kemiskinan Jawa Timur selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Di tahun 2009, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 16,68 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 12,28 persen di tahun 2014, dengan kata lain selama kurun waktu 2009-2014, tingkat kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan kurang lebih sebesar 1 persen di setiap tahunnya. Semakin rendahnya persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Jawa Timur semakin bertumbuh secara berkelanjutan dan di dukung dengan pemerataan hasil pembangunan.

**Gambar 4.1 : Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



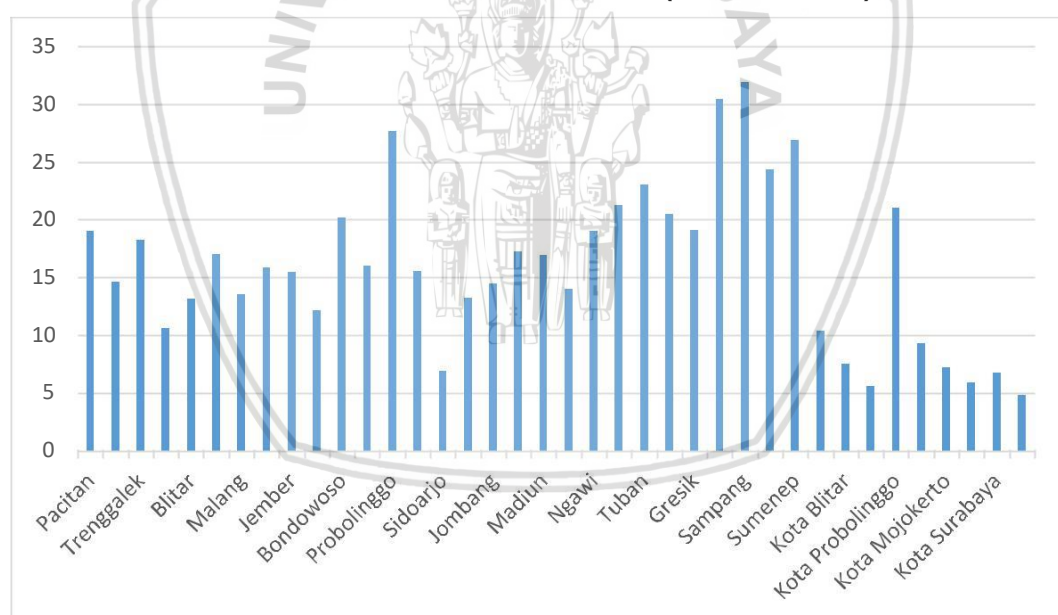
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Akan tetapi, pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Jawa Timur mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,6 persen, dari 12,28 persen di tahun 2014 menjadi 12,34 persen di tahun 2015. Kenaikan tingkat kemiskinan Jawa Timur di tahun 2015 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kenaikan harga BBM, kenaikan harga beras, dan terjadinya inflasi. Tepatnya pada bulan November 2014, Presiden Indonesia telah mengumumkan kenaikan harga BBM, seperti jenis Premium mengalami kenaikan harga dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, sedangkan Solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Kemudian pada 1 Januari 2015, Presiden Indonesia resmi menghapus subsidi BBM untuk jenis Premium saja, dan untuk Solar tetap diberikan subsidi sebesar Rp1.000. pencabutan subsidi BBM jenis Premium cukup memberatkan masyarakat, karena bahan bakar jenis ini banyak di konsumsi oleh masyarakat wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Selain kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun 2015, harga beras di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan. Hal ini

disebabkan terjadinya musim kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan panen yang terjadi kurang optimal. Di tambah pula dengan adanya peningkatan harga BBM yang membuat biaya distribusi meningkat dan mengakibatkan harga beras juga meningkat. Adapun penyebab lainnya yaitu terjadinya inflasi. Inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2014 dan 2015 terdapat pada bulan Desember 2014 hingga Januari 2015, secara berturut-turut sebesar 7,77 persen dan 6.86 persen. Hal ini menyebabkan harga berbagai komoditas mengalami kenaikan. Selanjutnya akan disajikan lebih terperinci terkait persentase penduduk miskin setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dan tahun 2015.

**Gambar 4.2 : Persentase Penduduk Miskin Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (dalam Persen)**

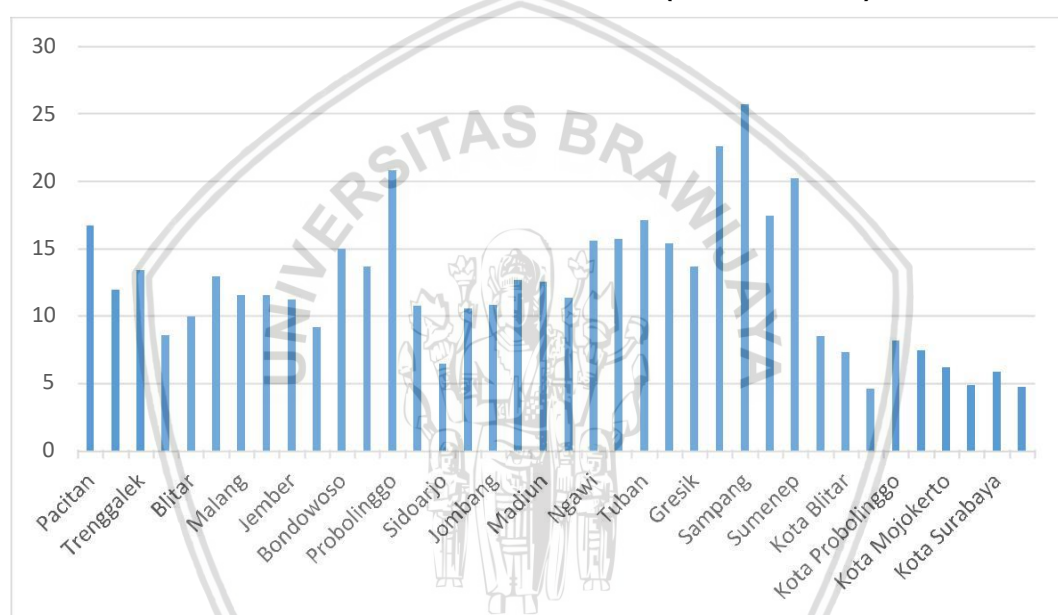


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009, terdapat 18 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase penduduk miskin yang berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sementara 20 Kabupaten/Kota lainnya berhasil mempertahankan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata persentase

penduduk miskin dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kemudian, di tahun 2015 persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami peningkatan. Hal yang serupa juga terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, rata-rata persentase penduduk miskin dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 juga menunjukkan angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009.

**Gambar 4.3 : Persentase Penduduk Miskin Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (*dalam Persen*)**

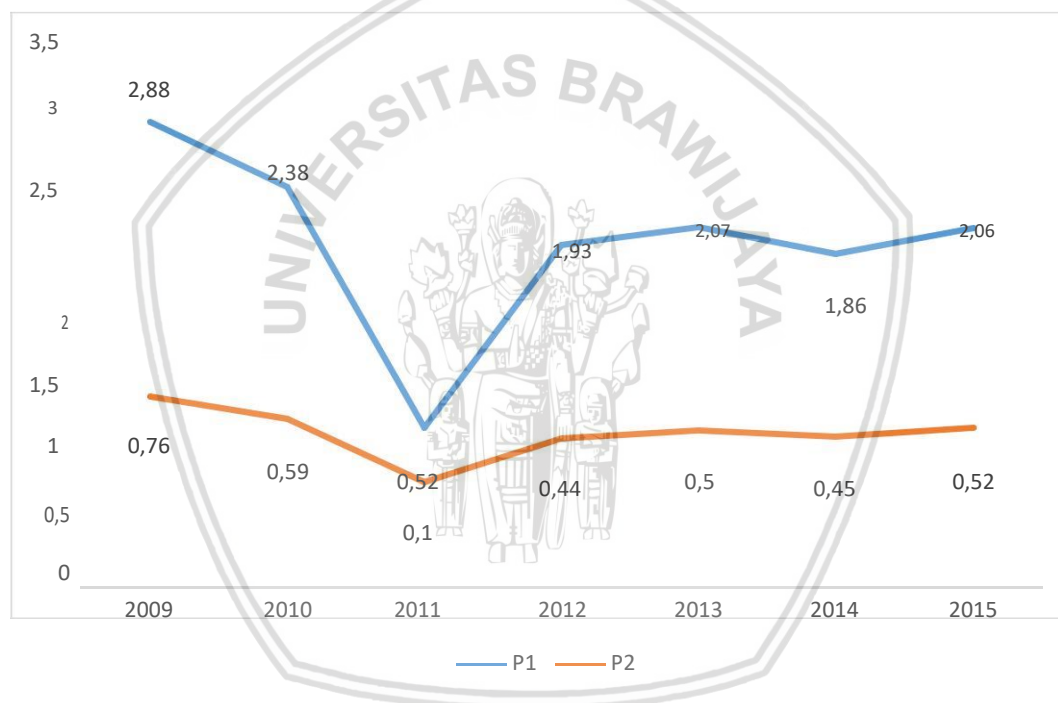


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Sampang dengan struktur perekonomian yang di dominasi oleh sektor pertanian. Sebaliknya, wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil adalah Kota Batu dengan struktur perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selain dari persentasenya, tingkat kemiskinan juga dapat di nilai dari besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan

*trend* yang fluktuatif dan cenderung menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 2,88 pada tahun 2009 menjadi 2,06 pada tahun 2015. Pola ini diikuti pula angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,76 pada tahun 2009 menjadi 0,52 pada tahun 2015. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin mengecil.

**Gambar 4.4 : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015**



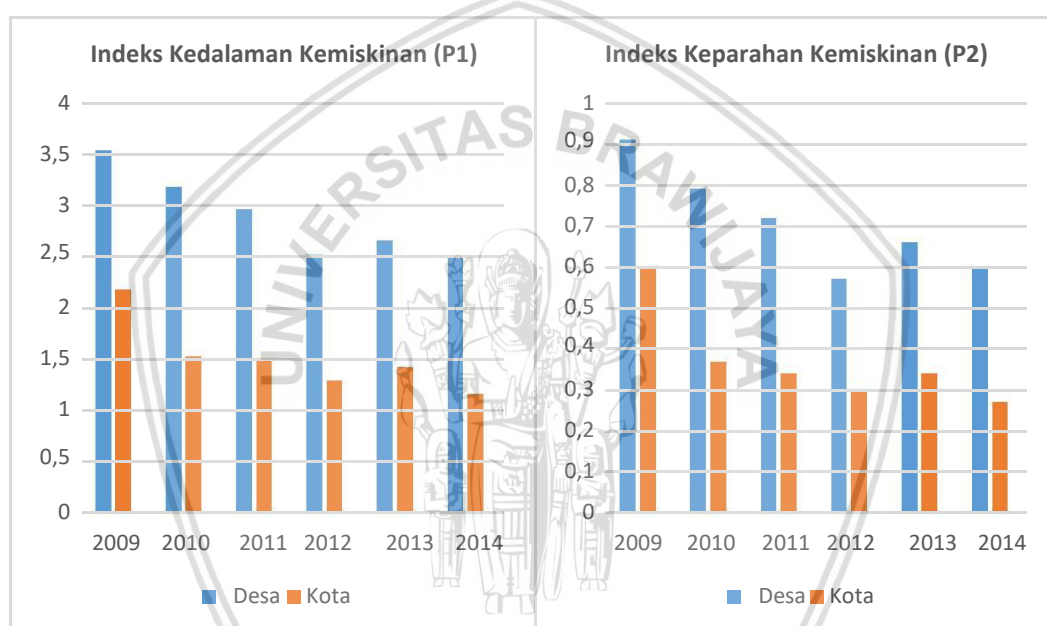
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pada tahun 2014, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk wilayah perkotaan hanya 1,16 sementara di wilayah perdesaan mencapai 2,49. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk wilayah perkotaan sebesar 0,27 sementara di wilayah perdesaan sebesar 0,60. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih parah daripada wilayah perkotaan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan percepatan upaya



perbaikan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dari besaran penurunan kedua angka tersebut dari tahun sebelumnya pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah perkotaan menurun sebesar 0,26 poin untuk P1 dan 0,07 poin untuk P2 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk wilayah perdesaan menurun sebesar 0,17 poin untuk P1 dan 0,06 poin untuk P2 dari tahun sebelumnya.

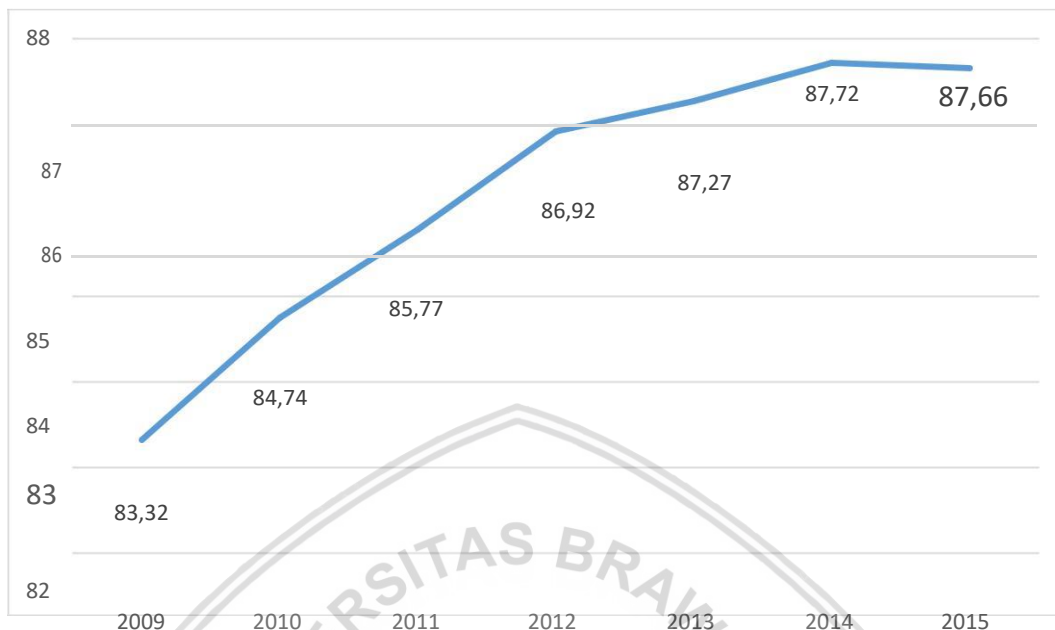
**Gambar 4.5 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
Kemiskinan Desa dan Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2014**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2006, komposisi penduduk yang sudah berada di atas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Timur sudah mampu mengurangi angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Angka kemiskinan yang semakin berkurang menunjukkan bahwa sudah terdapat pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 4.6 : Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (*dalam Persen*)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

#### **4.2.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang cukup penting terkait dengan pembangunan ekonomi pada suatu negara, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan pendapatan yang dapat di lihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan wilayah berdasarkan peningkatan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan, ataupun dengan pendekatan rumah tangga berdasarkan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita keluarga dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

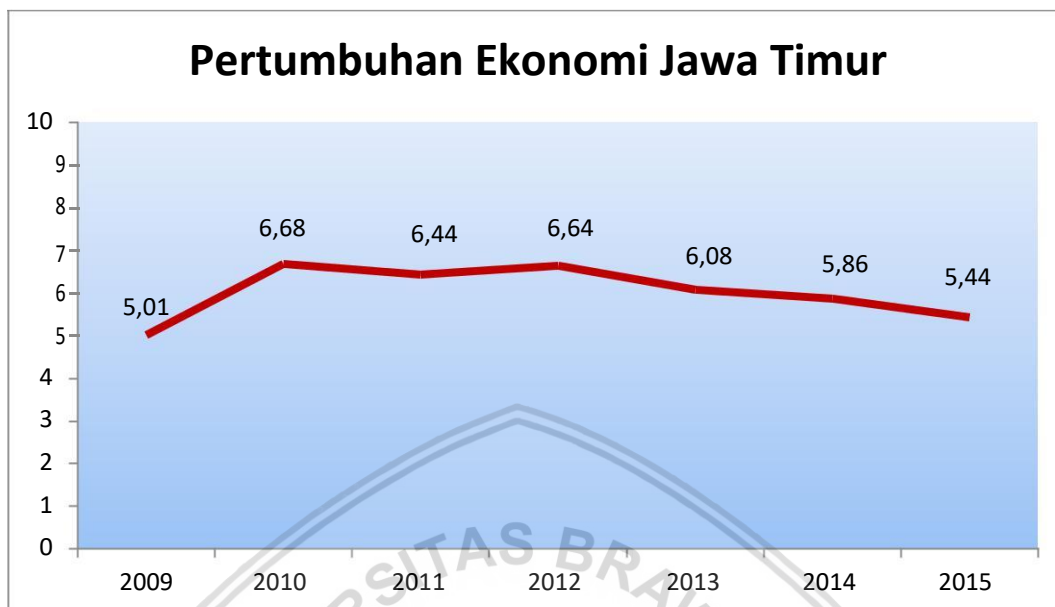
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, yang mana PDRB Jawa Timur merupakan tertinggi kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selalui mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan yang

mengalami peningkatan selama kurun waktu 2009-2015. Pada tahun 2009, PDRB Jawa Timur sebesar Rp686,85 miliar; Rp990,65 miliar tahun 2010; Rp1,05 triliun tahun 2011; Rp1,12 triliun tahun 2012; Rp1,19 triliun tahun 2013; Rp1,26 triliun tahun 2014; dan Rp1,33 triliun tahun 2015.

Akan tetapi, jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, selama kurun waktu 2009-2015 menunjukkan *trend* yang fluktuatif dan cenderung menurun. Meskipun cenderung mengalami penurunan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih cukup tinggi, angkanya mencapai 6,02 persen. Bahkan ketika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur berkembang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga menjadikan provinsi tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan nasional. Terbukti bahwa pada tahun 2015, kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap PDB nasional mencapai 14,52 persen.

Pada Gambar 4.7 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan *trend* yang fluktuatif dan cenderung menurun. Peningkatan tertinggi selama kurun waktu 2009-2015 terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,67 persen, dari 5,01 persen pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 6,68 persen pada tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang mulai membaik, khususnya di wilayah Asia sehingga berimplikasi pada peningkatan ekspor di Provinsi Jawa Timur.

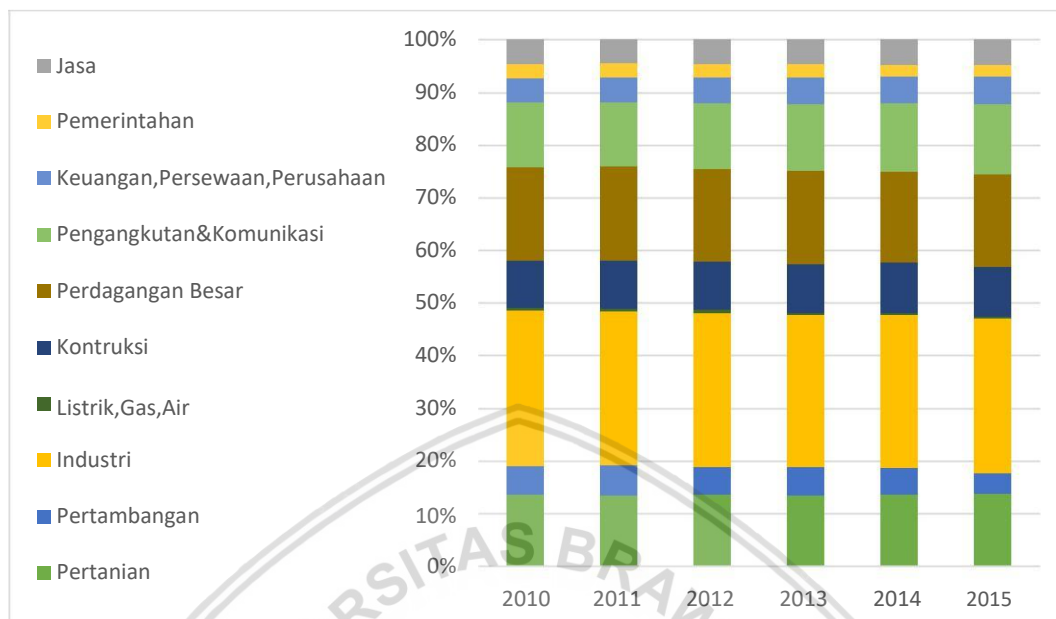
**Gambar 4.7 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor tersebut yang selama enam tahun terakhir (tahun 2010 hingga tahun 2015) mengalami peningkatan hingga mencapai 29,28 persen pada tahun 2015, dan menjadikan sektor tersebut sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi dalam PDRB Jawa Timur. Sektor lainnya yang juga menjadi penopang dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sektor perdagangan yang jumlahnya mencapai 17,58 persen pada tahun 2015. Sedangkan sektor yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja tinggi, yaitu sektor pertanian, justru hanya berkontribusi sebesar 13,72 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur lebih didominasi oleh sektor yang bersifat padat modal (*capital intensive*) dibandingkan dengan sektor yang bersifat padat karya (*labor intensive*).

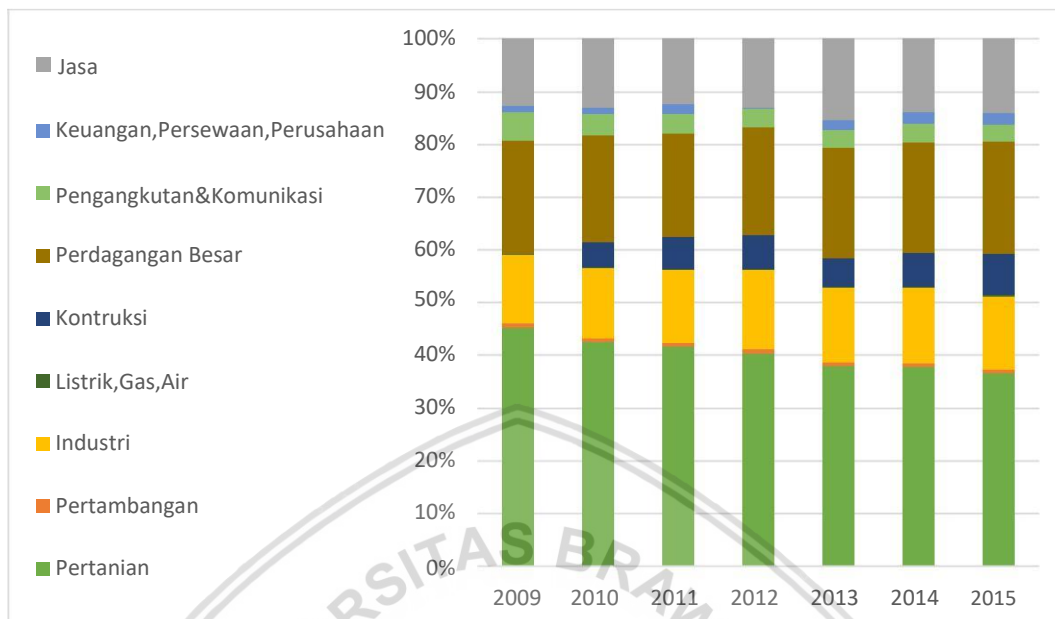
**Gambar 4.8 : Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Jawa Timur Tahun 2010-2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Jika ditinjau dari ketersediaan lapangan kerja berdasarkan sektoral, sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Jawa Timur adalah sektor pertanian. Di tahun 2015, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 36,57 persen. Sektor dengan serapan tenaga kerja yang terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan sebesar 21,28 persen dan sektor industri sebesar 13,94 persen. Ketika dikaitkan dengan kontribusi sektoral terhadap PDRB, dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor industri dan sektor perdagangan memang memiliki kontribusi yang lebih besar, akan tetapi sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri dan juga sektor perdagangan, meskipun kontribusi sektor pertanian hanya menempati urutan ketiga dalam sumbangannya terhadap PDRB Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

**Gambar 4.9 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

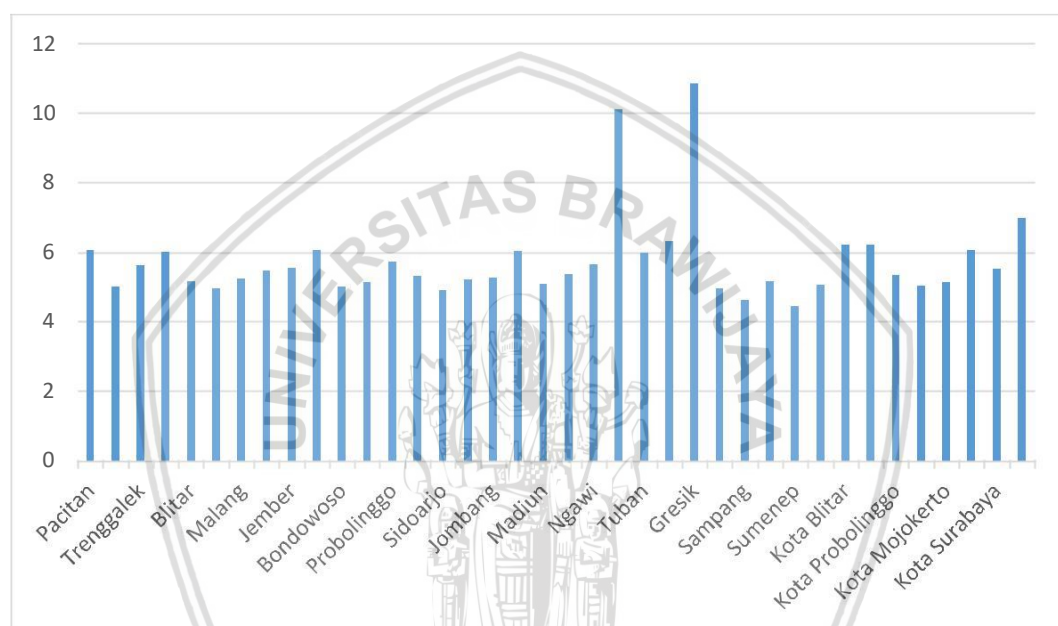
Selanjutnya akan disajikan secara lebih terperinci pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dan tahun 2015. Di tahun 2009, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Bojonegoro memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2009, yakni mencapai 10,10 persen. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan adanya perkembangan hasil pertambangan. Dan sebaliknya, wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sumenep. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh struktur perekonomian di Kabupaten Sumenep yang masih didominasi oleh sektor



pertanian. Dimana pertumbuhan dari sektor pertanian cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri ataupun dengan sektor perdagangan. Selain itu, banyaknya masalah-masalah di sektor pertanian, seperti gagal panen, meningkatnya biaya produksi, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya, sehingga membuat sumbangannya terhadap PDRB menjadi rendah.

**Gambar 4.10 : Pertumbuhan Ekonomi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 (dalam Persen)**

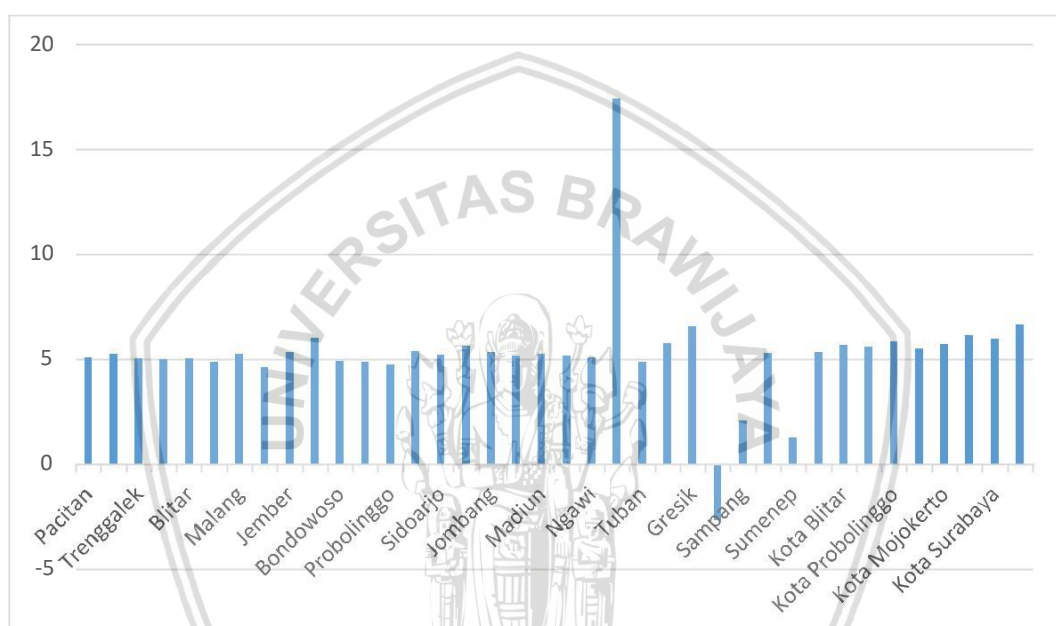


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2015, terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dari yang semula 5,86 persen pada tahun 2014 menjadi 5,44 persen pada tahun 2015. Perlambatan ini juga terjadi pada hampir sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat terlihat dari bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hanya 13 Kabupaten/Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dan sisanya sebanyak 25 Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan ekonomi dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Timur. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan hanya sebesar -2,66 persen, dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Bojonegoro, yaitu mencapai 17,42 persen.

**Gambar 4.11 : Pertumbuhan Ekonomi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (dalam Persen)**



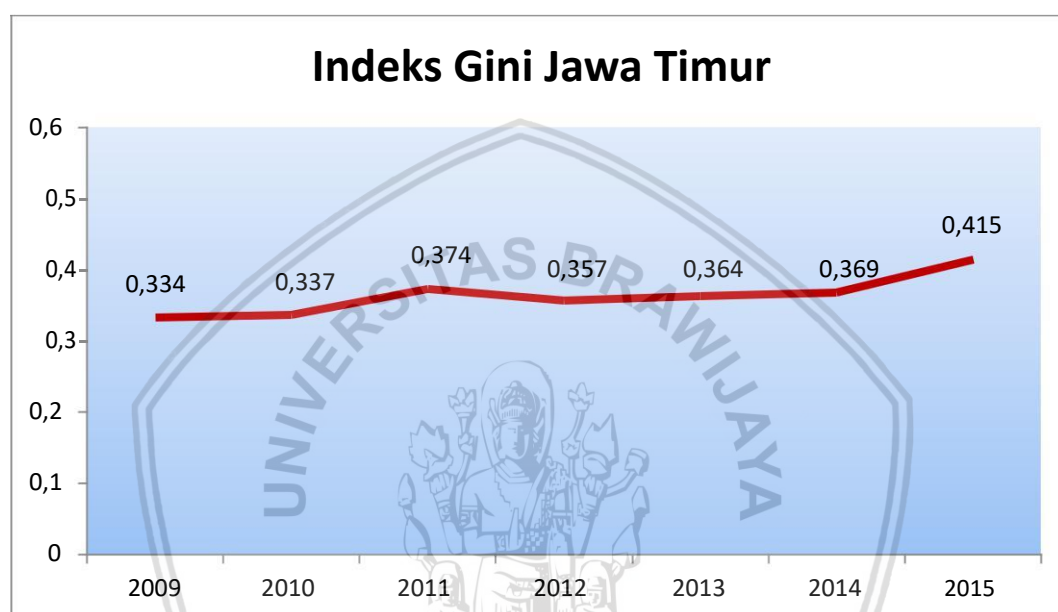
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

#### 4.2.3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan Jawa Timur

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan adalah indeks Gini (*gini ratio*). Indeks Gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 hingga angka 1. Dimana koefisien tersebut menjelaskan seberapa besar tingkat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisiennya (mendekati angka nol) maka semakin merata, sedangkan semakin besar koefisiennya (mendekati angka satu) maka semakin

timpang. Atau dengan kata lain, nilai 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sudah sangat merata (kemerataan sempurna), sedangkan nilai 1 (satu) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata (ketimpangan sempurna).

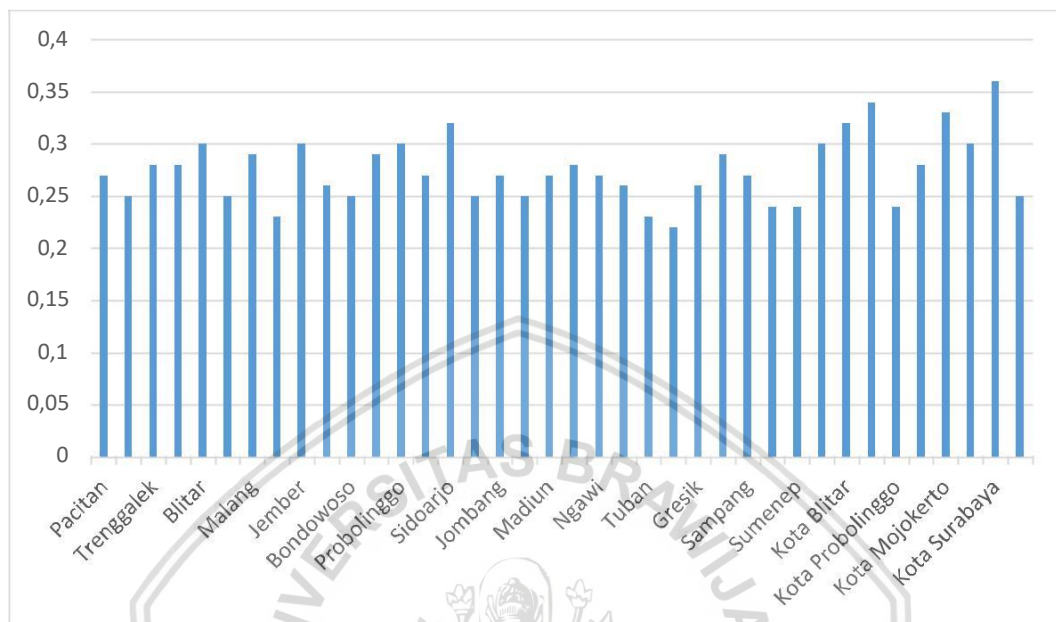
**Gambar 4.12 : Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015 menunjukkan *trend* yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,046 dari tahun sebelumnya, dari 0,369 pada tahun 2014 menjadi 0,415 pada tahun 2015. Angka tersebut sekaligus menjadi indeks Gini tertinggi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015. Begitu pula dengan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di masing-masing Kabupaten/Kota Jawa Timur yang sebagian besar juga mengalami peningkatan di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya akan disajikan secara lebih terperinci indeks Gini setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 dan tahun 2015.

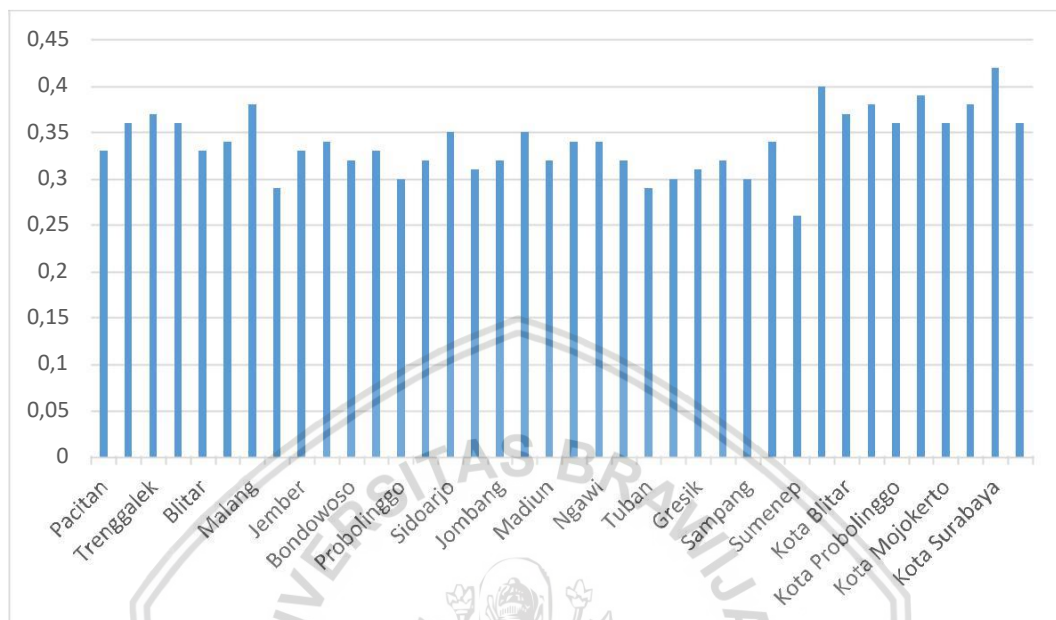
**Gambar 4.13 : Indeks Gini Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2009, hanya terdapat 2 Kabupaten/Kota yang memiliki indeks Gini diatas indeks Gini Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kota Malang dan Kota Surabaya. Kemudian di tahun 2015 berkurang menjadi 1 Kabupaten/Kota yang memiliki indeks Gini diatas indeks Gini Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Akan tetapi, selama kurun waktu 2009-2015 sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki *trend* indeks Gini yang cenderung meningkat, kecuali Kabupaten Probolinggo. Wilayah dengan angka indeks Gini tertinggi di tahun 2009 yaitu Kota Surabaya dengan indeks Gini sebesar 0,36. Kemudian di tahun 2015, Kota Surabaya kembali menjadi wilayah dengan indeks Gini tertinggi yaitu sebesar 0,42. Sebaliknya, wilayah dengan angka indeks Gini terendah di tahun 2009 yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lumajang, dengan indeks Gini sebesar 0,23. Kemudian di tahun 2015, Kabupaten Sampang berhasil menjadi wilayah dengan indeks gini terendah yaitu sebesar 0,26.

**Gambar 4.14 : Indeks Gini Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, tak heran jika angka imigran masuk di kota ini cukup tinggi. Jumlah imigran masuk di Kota Surabaya mengalami kenaikan di tahun 2015 mencapai 3,64 persen. Hal tersebut menyebabkan jumlah penduduk di Kota Surabaya selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kota Surabaya sebesar 2,77 juta jiwa dan meningkat sebesar 2,85 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan kata lain, jumlah penduduk Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 14 hingga 15 ribu jiwa di setiap tahunnya.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang selalu meningkat di setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tentunya hal ini akan menyebabkan masalah seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan

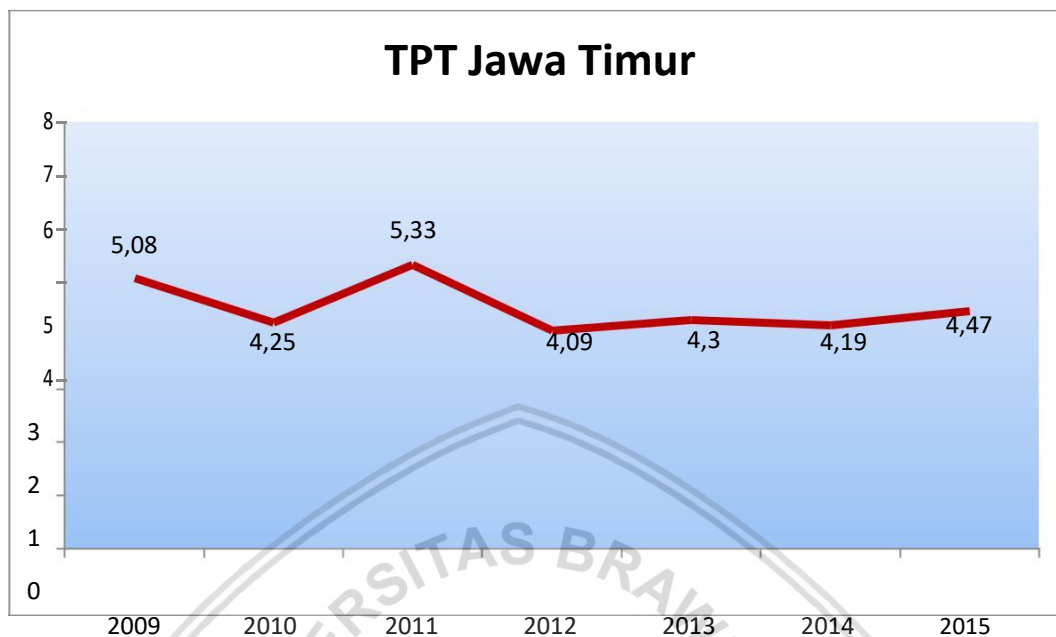
memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Itulah alasan mengapa dari tahun 2009 hingga tahun 2015, indeks Gini Kota Surabaya selalu yang tertinggi. Ini merupakan tugas bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya agar mampu menurunkan angka kesenjangan tanpa harus memperlambat laju perekonomian Kota Surabaya.

#### **4.2.4 Kondisi Pengangguran Provinsi Jawa Timur**

Sejatinya, kemiskinan muncul karena adanya masalah pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat, sehingga nantinya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan telah mampu menurunkan jumlah pengangguran yang di nilai berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat bahwa hingga tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Jawa Timur adalah sebesar 20.274.681 orang. Angka tersebut meningkat kurang lebih sebesar 124.682 orang dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 20.149.998 orang. Dari angkatan kerja yang ada, jumlah penduduk yang bekerja sekitar 95,53 persen atau sebanyak 19.342.610 orang, sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar tenaga kerja sekitar 4,47 persen atau sebanyak 932.071 orang.



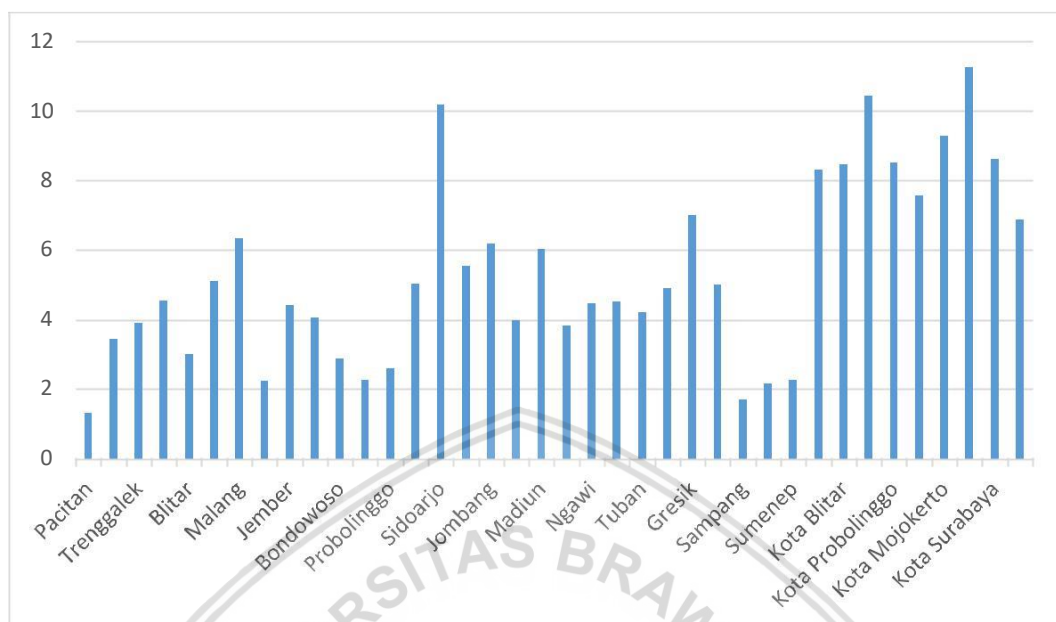
**Gambar 4.15 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015, memiliki *trend* yang fluktuatif dan cenderung menurun, serta angkanya masih berada di bawah nasional. Sempat mengalami penurunan yang cukup besar yaitu kurang lebih sekitar 1,27 persen pada tahun 2012. Namun kembali meningkat sebesar 0,32 persen pada tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan karena masih didominasinya pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan dari tingginya jumlah pekerja yang berpendidikan rendah mencapai 67,59 persen atau sekitar 13,38 juta orang, sementara pekerja dengan pendidikan tinggi hanya sebesar 8,80 persen atau sekitar 1,74 juta orang. Akan tetapi, tingkat pengangguran Jawa Timur yang angkanya berada jauh di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup berhasil dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan masalah pengangguran.

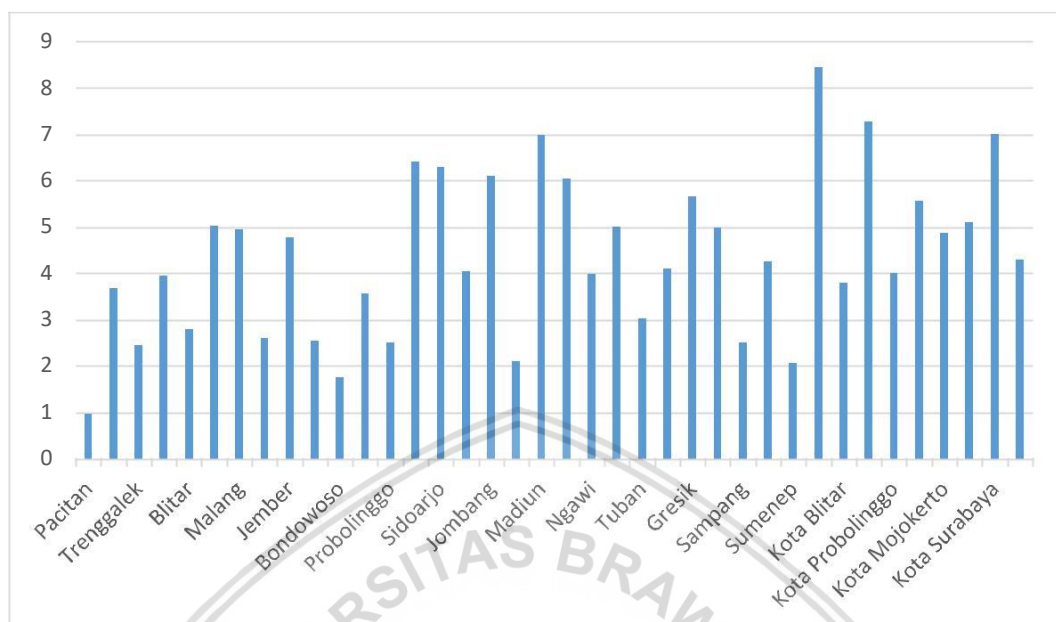
**Gambar 4.16 : Tingkat Pengangguran Terbuka Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Di tahun 2009, wilayah yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah yaitu Kabupaten Pacitan sebesar 1,32 persen, sementara wilayah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi yaitu Kota Madiun sebesar 11,27 persen. Kemudian di tahun 2015, Kabupaten Pacitan kembali menjadi wilayah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah sebesar 0,97 persen, sedangkan wilayah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi yaitu Kota Kediri sebesar 8,46 persen. Rendahnya angka pengangguran di Kabupaten Pacitan bukan disebabkan oleh bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan, melainkan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja yang lebih memilih untuk bekerja ke luar kota atau bahkan ke luar provinsi. Hal ini dikarenakan hanya ada 130 perusahaan saja di Kabupaten Pacitan, sekitar 7 perusahaan besar dan sisanya merupakan perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang. Rendahnya serapan tenaga kerja akibat minimnya industri membuat masyarakat di Kabupaten Pacitan lebih memilih untuk meninggalkan kampung halamannya.

**Gambar 4.17 : Tingkat Pengangguran Terbuka Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015**

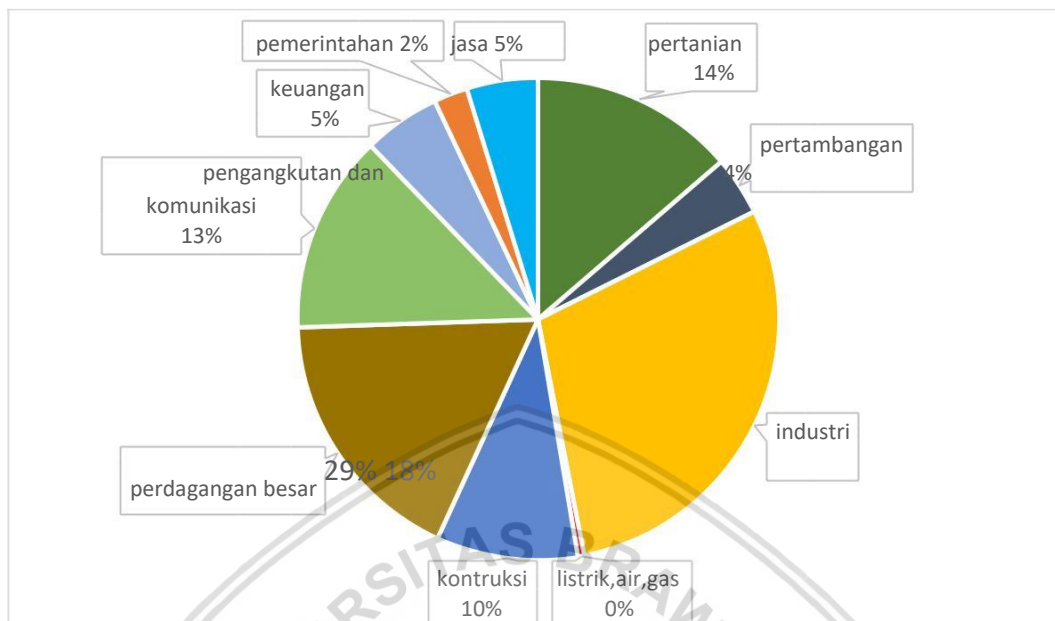


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

#### 4.2.5 Kondisi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut dapat di lihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian yang cukup dominan dan mengingat bahwa daya serap tenaga kerja pada sektor pertanian yang tinggi, maka sektor pertanian dapat dikatakan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Di tahun 2015, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur menduduki peringkat ketiga, yaitu sebesar 13,72 persen dari total PDRB Jawa Timur. Sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,28 persen masih menduduki peringkat pertama dan sektor perdagangan besar dengan kontribusi sebesar 17,58 persen berada di posisi kedua dalam hal peranannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.

**Gambar 4.18 : Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Meskipun hanya mampu menduduki peringkat ketiga dalam struktur perekonomian Jawa Timur, namun upaya pembangunan pertanian tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Hal ini dikarenakan masalah utama di Jawa Timur adalah semakin besarnya angka kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur harus terintegrasi ke dalam sektor pertanian. Sebab sektor pertanian mampu menampung lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor lainnya karena sektor tersebut masih bersifat padat karya (*labor intensive*). Selain itu, sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur bekerja di sektor pertanian. Sehingga, ada atau tidaknya pembangunan pada sektor pertanian akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan angka kemiskinan Jawa Timur. Selama sektor pertanian tidak ditangani dengan baik, mustahil kemiskinan di Jawa Timur dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian, khususnya di Provinsi Jawa Timur harus selalu dilakukan baik dalam bentuk monitoring maupun evaluasi.

**Gambar 4.19 : Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (*dalam Persen*)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Besarnya peranan yang dimiliki sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, membuat sektor pertanian harus terus dikembangkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama kurun waktu 2009-2015, kontribusi sektor pertanian pada pembentukan PDRB Jawa Timur memiliki *trend* yang fluktuatif dan cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011. Penyebab utama terjadinya penurunan pada sektor pertanian adalah pertumbuhan produksi pertanian yang masih terlalu berbasis pada ketersediaan lahan pertanian. Selain itu, alokasi dan kombinasi dari faktor produksi pertanian yang digunakan masih belum mampu untuk mengimbangi penurunan yang sedang terjadi.

Kemudian di tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bappeda Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri atau agrobisnis di Jawa Timur, dengan berbagai tujuan diantaranya

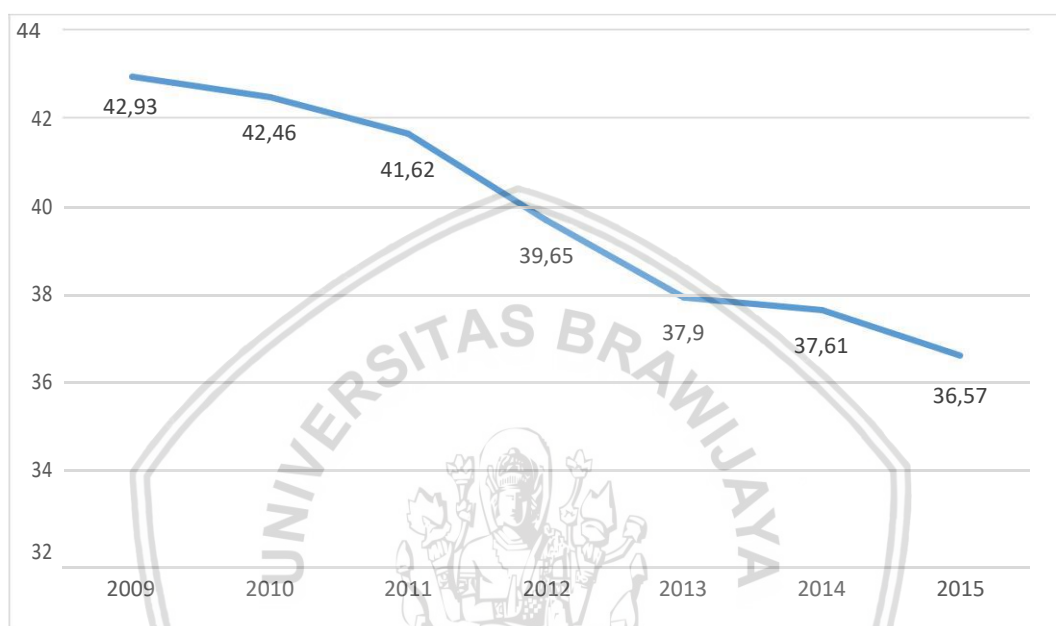
peningkatan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan. Kebijakan tersebut di buat agar lebih berfokus pada





pengembangan sektor pertanian secara efisien, salah satunya dengan menetapkan komoditas unggulan. Komoditas unggulan ini nantinya dapat dijadikan potensi bagi pembangunan masyarakat di wilayah tersebut.

**Gambar 4.20 : Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (*dalam Persen*)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Akan tetapi, jika di lihat dari peranan sektor terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2015 menunjukkan *trend* yang selalu menurun setiap tahunnya, meski angkanya tetap menjadi yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Seperti halnya luas lahan pertanian yang semakin berkurang, gagal panen, pendapatan yang rendah, penanaman modal di sektor pertanian yang di nilai kurang menguntungkan, serta terjadinya perkembangan teknologi yang membuat tenaga manusia digantikan dengan mesin dan secara otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.

#### 4.2.6 Kondisi Sektor Industri Provinsi Jawa Timur

Sektor industri merupakan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, angkanya mencapai 29 persen pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kawasan industri yang tersebar pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur, diantaranya satu kawasan di Kota Surabaya, tiga kawasan di Kabupaten Gresik, satu kawasan di Kabupaten Sidoarjo, satu kawasan di Kabupaten Mojokerto, dan satu kawasan di Pasuruan.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur, sektor industri di Provinsi Jawa Timur telah menyumbang sebanyak 29 persen terhadap PDRB Jawa Timur, dan sebesar 21,18 persen di tingkat nasional. Tingginya kontribusi industri terhadap PDRB tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan *share* industri di atas 20 persen, selain Jawa Barat. Sektor industri di Jawa Timur di topan oleh industri kecil menengah atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, dengan semakin berkembangnya sektor industri di Jawa Timur, maka secara tidak langsung akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat menengah kebawah.

Dalam mengembangkan sektor industri di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperluas dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Sebab diyakini bahwa peranan teknologi terhadap sektor industri mampu meningkatkan daya saing, biaya produksi menjadi lebih murah, dan produk yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di sektor industri agar produktivitas meningkat sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

### 4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang sudah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Yang mana terkait dengan seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independent variable*) yang mencakup pertumbuhan ekonomi (GRO), ketimpangan distribusi pendapatan (GINI), pengangguran (UNP), *share* sektor pertanian (AGR), dan *share* sektor industri (IND) terhadap variabel dependen (*dependent variable*) yaitu tingkat kemiskinan (POV) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015.

Dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program/aplikasi *E-views* 8.1. Adapun kriteria pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Dengan kata lain, tingkat toleransi kesalahan atau alpha ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0.05.

#### 4.3.1 Pemilihan Model Regresi Panel

Seperti yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Dalam mengestimasi data panel, digunakan 3 model yang berbeda yaitu *Pooled Least Square (Common Effect Model)*, Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*), dan Model Efek Acak (*Random Effect Model*). Untuk menentukan model yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) uji, diantaranya Uji Chow (*chow test*), Uji Hausman (*hausman test*), dan Uji Lagrange Multiplier (*LM test*).

##### 1. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow (*chow test*) digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi regresi panel, dengan memilih antara *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat

digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow adalah:

$H_0$  : Model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS)

$H_1$  : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) Penentuan keputusan terhadap hipotesis tersebut adalah dengan

membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0.05). Apabila nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Begitu pula sebaliknya, ketika nilai probabilitas *F-statistic* lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$ .

**Tabel 4.3 : Hasil Uji Chow**

<i>Effect Test</i>	<i>Prob. F-statistic</i>	<b>Keputusan</b>
<i>Cross-section F</i>	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

Sebagaimana tertera pada Tabel 4.3, diperoleh hasil *F-statistic* pada uji Chow bernilai 52.577388 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.0000 < 0.05$ , sehingga menolak  $H_0$ . Dengan demikian berdasarkan uji Chow dalam mengestimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dibanding *Pooled Least Square* (PLS).

## 2. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman (*hausman test*) digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi regresi panel, dengan memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang paling

tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah:

$H_0$  : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

$H_1$  : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) Penentuan keputusan terhadap hipotesis tersebut adalah dengan

membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0.05). Apabila nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Begitu pula sebaliknya, ketika nilai probabilitas *F-statistic* lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$ .

**Tabel 4.4 : Hasil Uji Hausman**

<i>Effect Test</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	Keputusan
<i>Cross-section random</i>	0.0038	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, diperoleh hasil *Chi-Square Statistic* pada uji Hausman bernilai 17.420017 dengan probabilitas sebesar 0.0038. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.0038 < 0.05$ , sehingga menolak  $H_0$ . Dengan demikian berdasarkan hasil uji Hausman dalam mengestimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dibanding *Random Effect Model* (REM).

### 3. Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*)

Uji Lagrange Multiplier (*LM test*) digunakan untuk menentukan efek individu dalam model estimasi regresi panel, dengan memilih antara *Pooled Least Square* (PLS) atau *Random Effect Model* (REM) yang

paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji Lagrange Multiplier adalah:

$H_0$  : Model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS)

$H_1$  : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)

Penentuan keputusan terhadap hipotesis tersebut adalah dengan membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5% (0.05). Apabila nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Begitu pula sebaliknya, ketika nilai probabilitas *F-statistic* lebih besar ( $>$ ) dari  $\alpha$ , maka menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$ .

**Tabel 4.5 : Hasil Uji Lagrange Multiplier**

<i>Effect Test</i>	<b>Probabilitas</b>	<b>Keputusan</b>
<i>Breusch-Pagan</i>	0.0000	<i>Random Effect Model</i> (FEM)

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, diperoleh hasil *Cross-section Breusch-Pagan* pada uji Lagrange Multiplier bernilai 525.9564 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.0000 < 0.05$ , sehingga menolak  $H_0$ . Dengan demikian berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier dalam mengestimasi regresi panel lebih tepat menggunakan *Random Effect Model* (REM) dibanding *Fixed Effect Model* (FEM).



#### 4.4 Hasil Pengujian Regresi Panel

Dari hasil pengujian kesesuaian model yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, memberikan kesimpulan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya akan dijabarkan terkait dengan hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

**Tabel 4.6 : Hasil Uji Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)**

Variabel Dependen : POV				
Variabel Independen	Koefisien	t-statistic	Prob.	Keterangan
C	-14.96872	-3.788959	0.0002	
GRO	0.232393	3.520344	0.0005	Signifikan
GINI	19.58729	6.634462	0.0000	Signifikan
UNP	0.215234	2.272777	0.0240	Signifikan
AGR	0.484720	4.535600	0.0000	Signifikan
IND	0.391817	2.060645	0.0705	Tidak Signifikan
R-square	0.947788			
Adjusted R-square	0.937955			
F-statistic	96.38246			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

Hasil pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan data panel yang ditampilkan pada tabel menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independent variable*) yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (GRO), ketimpangan distribusi pendapatan (GINI), pengangguran (UNP), sektor pertanian (AGR), dan sektor industri (IND) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu tingkat kemiskinan (POV) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015, yang terbentuk dalam model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = C + X_{1it} + X_{2it} + X_{3it} + X_{4it} + X_{5it} + e_{it}$$

$$\text{POV} = -14.96872 + 0.232393 \text{ GRO}_{it} + 19.58729 \text{ GINI}_{it} + 0.215234 \text{ UNP}_{it} + 0.484720 \text{ AGR}_{it} + 0.391817 \text{ IND}_{it} + e_{it}$$

Selanjutnya hasil dari model persamaan regresi linear berganda tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Konstanta (C)
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (GRO)

Dari uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0.232393, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 0.232393 persen.

3. Variabel Ketimpangan Pendapatan (GINI)

Dari uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 19.58729, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 19.58729 persen. Atau dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan sebesar 0.1 satuan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 1.958729 persen.

4. Variabel Pengangguran (UNP)

Dari uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel pengangguran dalam penelitian ini memiliki koefisien yang

bernilai positif sebesar 0.215234, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 0.215234 persen.

#### 5. Variabel Sektor Pertanian (AGR)

Dari uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel sektor pertanian dalam penelitian ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0.484720, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada sektor pertanian sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 0.484720 persen.

#### 6. Variabel Sektor Industri (IND)

Dari uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil bahwa variabel sektor industri dalam penelitian ini memiliki koefisien yang bernilai positif sebesar 0.391817, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada sektor industri sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 0.391817 persen.

### 4.5 Hasil Pengujian Signifikansi

#### 4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas (*independent variable*) yang mencakup pertumbuhan ekonomi (GRO), ketimpangan distribusi pendapatan (GINI), pengangguran (UNP), sektor pertanian (AGR), dan sektor industri (IND) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu tingkat kemiskinan (POV) pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara

simultan (serentak atau bersama-sama). Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 5%.

#### 4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) secara parsial. Kriteria pengujian menyatakan ketika nilai probabilitas kurang dari ( $<$ ) tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0.05, begitu pula sebaliknya. Intinya, uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan atau tidaknya pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan, pangangguran terhadap kemiskinan, sektor pertanian terhadap kemiskinan, dan sektor industri terhadap kemiskinan secara parsial (individu atau terpisah).

##### 1. Uji Signifikansi Parsial Pertumbuhan Ekonomi (GRO) Terhadap Kemiskinan (POV)

Pengujian signifikansi secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 3.520344 dengan probabilitas sebesar 0.0005. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5%, atau dengan kata lain  $0.0005 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

##### 2. Uji Signifikansi Parsial Ketimpangan Pendapatan (GINI) Terhadap Kemiskinan (POV)

Pengujian signifikansi secara parsial variabel ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 6.634462

dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi atau  $\alpha$  sebesar 5%, atau dengan kata lain  $0.0000 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **3. Uji Signifikansi Parsial Pengangguran (UNP) Terhadap Kemiskinan (POV)**

Pengujian signifikansi secara parsial variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 2.272777 dengan probabilitas sebesar 0.0240. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi atau  $\alpha$  sebesar 5%, atau dengan kata lain  $0.0240 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **4. Uji Signifikansi Parsial Sektor Pertanian (AGR) Terhadap Kemiskinan (POV)**

Pengujian signifikansi secara parsial variabel sektor industri terhadap tingkat kemiskinan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 4.535600 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi atau  $\alpha$  sebesar 5%, atau dengan kata lain  $0.0000 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **5. Uji Signifikansi Parsial Sektor Industri (IND) Terhadap Kemiskinan (POV)**

Pengujian signifikansi secara parsial variabel sektor industri terhadap tingkat kemiskinan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 2.060645 dengan probabilitas sebesar 0.0705. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa

nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5%, atau dengan kata lain  $0.0705 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel sektor industri berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### 4.5.3 Koefisien Determinasi (*R-squared* atau $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen (variabel terikat), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Menurut Ghozali (2005), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen (variabel bebas) yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen (variabel bebas), maka  $R^2$  pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R-square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *adjusted R-square* sebesar 0.937955 atau 93.8%. Artinya kontribusi terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu tingkat kemiskinan mampu dijelaskan sebesar 93.8% oleh variabel independen (variabel bebas) diantaranya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, dan sektor industri. Sedangkan sisanya sebesar 6.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.



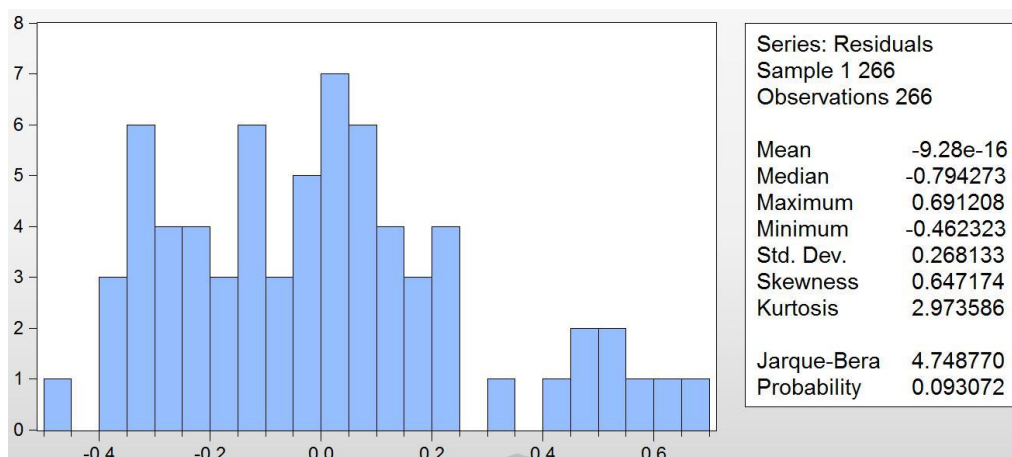
#### 4.6 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda yang dibentuk dalam penelitian ini merupakan sebuah model yang sesuai, oleh karena itu diperlukan uji asumsi klasik sebagai syarat penggunaan model regresi linear dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan hasil dari pengujian asumsi klasik pada model regresi linear berganda yang telah dibentuk dalam penelitian ini:

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam asumsi klasik pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) memiliki tujuan untuk menguji apakah sebaran data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak normal. Upaya yang dapat dilakukan untuk menguji normal atau tidaknya sebuah data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-bera*. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendeteksi distribusi data dapat dilakukan melalui perbandingan antara nilai probabilitas *Jarque-bera* dengan tingkat toleransi kesalahan ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu sebesar 5%.

Apabila probabilitas *Jarque-bera* lebih besar ( $>$ ) dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka dapat disimpulkan bahwa *error*-nya terdistribusi normal atau model yang dibentuk terbebas dari masalah normalitas. Begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas *Jarque-bera* lebih kecil ( $<$ ) dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah terjadi ketidaknormalan pada sebaran data, atau dengan kata lain model yang dibentuk mengandung masalah masalah normalitas.

**Gambar 4.21 : Hasil Uji Asumsi Normalitas**

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

Pada penelitian ini, setelah dilakukan uji normalitas memberikan nilai probabilitas *Jarque-bera* sebesar 0.093072. Artinya dengan membandingkan hasil pengujian normalitas dan kriteria pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-bera* menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena bernilai lebih besar dari alpha 5%, maka menerima  $H_0$ . Dengan demikian sebaran data (*error*) dalam penelitian ini terdistribusi normal sehingga tidak terdapat masalah normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam asumsi klasik memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya yang digunakan dalam model penelitian. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2005). Untuk mengetahui kemungkinan adanya korelasi antar variabel bebas pada model dalam suatu penelitian, dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil (<) dari 10 maka model penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas. Begitu pula sebaliknya,

apabila nilai VIF lebih besar ( $>$ ) dari 10 dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki masalah multikolinearitas.

Sesuai dengan kriteria pengujian multikolinearitas diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model dalam penelitian ini secara keseluruhan memiliki nilai lebih kecil atau kurang dari 10, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini, sehingga terbebas dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 4.7 : Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)	Keterangan
C	NA	-
POV	1.029453	Tidak Terjadi Multikolinearitas
GINI	1.333506	Tidak Terjadi Multikolinearitas
UNP	1.063593	Tidak Terjadi Multikolinearitas
AGR	1.801208	Tidak Terjadi Multikolinearitas
IND	1.423900	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Ketidaksamaan maupun kesamaan variansi (data) *error* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam model regresi dapat diketahui melalui sebuah pengujian yakni uji heterokedastisitas. Apabila hasil dari pengujian diketahui bahwa (data) *error* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Begitu pula sebaliknya, ketika (data) *error* memiliki ketidaksamaan varian maka disebut sebagai heterokedastisitas.

Model regresi dalam penelitian yang baik adalah yang homokedastisitas. Pengujian untuk mengetahui kemungkinan adanya

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *Uji Glejser*. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:  $H_0$  : Homokedastisitas

$H_1$  : Heterokedastisitas

Kriteria pengujian yang ditetapkan apabila probabilitas *obs\*R-square* lebih kecil ( $<$ ) dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau 0.05 maka keputusan yang diambil adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ , atau dengan kata lain tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

**Tabel 4.8 : Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas**

<i>Heteroskedasticity Test: Glejser</i>			
<i>F-statistic</i>	7.417458	Prob. F	0.6358
<i>Obs*R-squared</i>	33.20647	Prob. Chi-square	0.6242

Sumber: Data diolah pada Eviews 8.1, 2018.

#### 4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini ( $t$ ) dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Secara sederhana bahwa tujuan dari dilakukannya pengujian regresi panel adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga tidak boleh ada korelasi antara data observasi tahun ini dengan data observasi sebelumnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi pada model dalam penelitian, maka dilakukan pengujian *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Dari model yang terbentuk dalam penelitian ini, hasil analisis dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi-square* sebesar 0.5155, atau lebih

besar dari alpha ( $\alpha$ ) 5% atau 0.05, maka diperoleh kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdapat masalah autokorelasi.

**Tabel 4.9 : Hasil Uji Asumsi Autokorelasi**

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</i>			
<i>F-statistic</i>	257.8627	Prob. F	0.6181
<i>Obs*R-squared</i>	177.3019	Prob. Chi-square	0.5155

Sumber: Data diolah, 2018.

#### 4.7 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada sub bab pembahasan dan analisis hasil penelitian, akan dijabarkan secara rinci hasil output regresi linear berganda yang telah dilakukan sebelumnya dalam melihat serta menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian, dan sektor industri terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

##### 4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan yang dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan wilayah yang didasarkan pada peningkatan PDB, ataupun pendekatan rumah tangga yang didasarkan pada peningkatan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Berdasarkan estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0.0005, dan jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau

alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% maka nilai probabilitas lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 5%, atau dengan kata lain  $0.0005 < 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.232393 dan bertanda positif, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.232393 persen. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibentuk pada penelitian ini, dimana dalam hipotesis tersebut menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Trio Ardianto pada tahun 2016 yang meneliti 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2007-2013 yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.236983.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *trickle down effect* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah, dimana akan ada bagian dari pertumbuhan ekonomi yang menetes kebawah dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan semakin mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Namun sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi semakin memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin maka akan terjadi suatu proses pengkutuban (*polarization effect*).

Proses pengkutuban (*polarization effect*) terjadi ketika setiap sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak memiliki keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor yang bersifat padat modal (*capital intensive*) mengalami kemajuan yang cukup pesat, dan berhasil memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu



daerah. Sedangkan sektor-sektor yang bersifat padat karya (*labor intensive*) yang merupakan sumber kehidupan masyarakat perdesaan cenderung lebih lambat dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Akibatnya, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok kaya, yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri. Sedangkan sebagian besar masyarakat perdesaan yang ekonominya di tunjang oleh sektor pertanian akan semakin miskin, akibat dari masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Walaupun pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan *trend* yang meningkat, namun masih belum bisa dikatakan berkualitas. Hal ini dicerminkan oleh relatif besarnya ketimpangan aktivitas antar wilayah di Jawa Timur. Bahkan Kota Surabaya mampu menyumbang 14 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Pada Tabel 4.10 menjelaskan bahwa penyumbang paling besar terhadap tingginya angka PDRB di Jawa Timur berasal dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kota Kediri. Perekonomian kelima kabupaten/kota tersebut, semuanya di topang oleh sektor industri maka tak heran jika sektor industri memiliki peranan yang cukup penting dalam perkeekonomian Jawa Timur.

**Tabel 4.10 : 5 Kabupaten/Kota dengan Rata-Rata Kontribusi PDRB Tertinggi Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015**

Kabupaten/Kota	Share PDRB	Dominasi Sektoral
Kota Surabaya	13.72	Industri
Kabupaten Sidoarjo	8.32	Industri
Kabupaten Pasuruan	6.25	Industri
Kabupaten Gresik	5.99	Industri
Kota Kediri	5.58	Industri

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa struktur perekonomian di Jawa Timur di dominasi oleh sektor-sektor yang bersifat padat modal (*capital intensive*), seperti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar. Sementara sektor pertanian yang merupakan sektor dengan serapan jumlah tenaga kerja tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, tetapi hanya berkontribusi sedikit terhadap PDRB Jawa Timur. Dengan kata lain, perekonomian Jawa Timur hanya di topang oleh sektor-sektor yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja, sehingga hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

**Tabel 4.11 : Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (*dalam Persen*)**

Sektor	Share PDRB	Share Tenaga Kerja
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.72	32.88
Pertambangan dan Penggalian	3.93	1.15
Industri Pengolahan	29.28	13.53
Pengadaan Listrik, Gas, dan Air	0.44	0.41
Konstruksi	9.48	7.15
Perdagangan Besar	17.58	18.59
Pengangkutan, Infokom, Akom. Mamin	13.30	9.05
Keuangan dan Asuransi	2.74	1.45
<i>Real Estate</i>	1.63	0.25
Pemerintahan	2.31	3.51
Jasa-Jasa	5.58	12.01

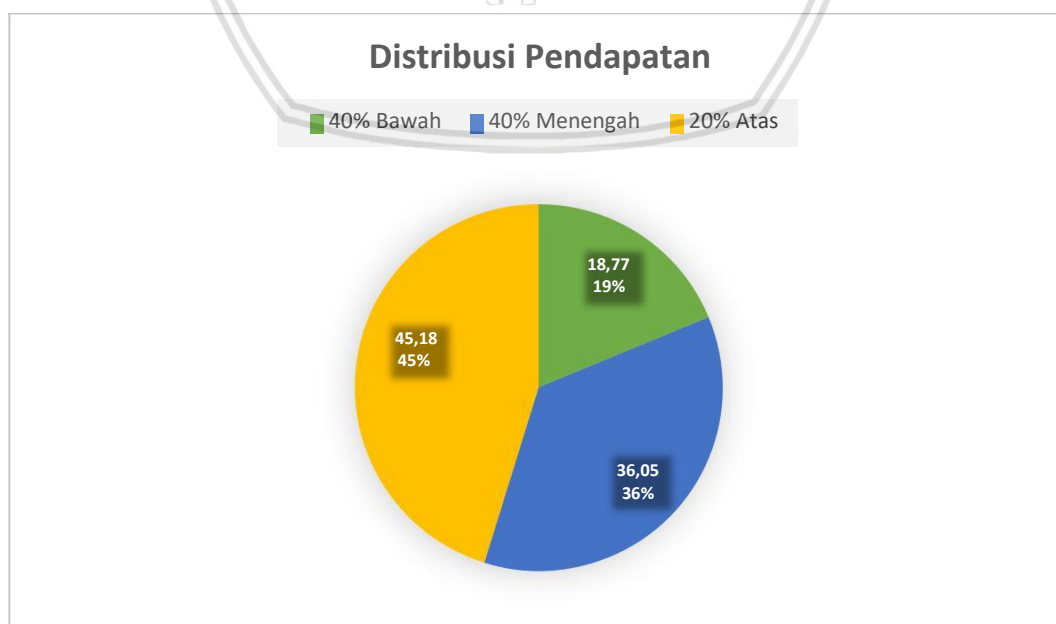
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah dapat menunjukkan semakin baiknya kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi

belum dikatakan baik jika tidak dibarengi dengan pemerataan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi melainkan yang mampu dinikmati oleh setiap elemen masyarakat, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin.

Pengaruh positif hubungan dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan hasil dari capaian pertumbuhan ekonomi cukup tinggi hanya dinikmati oleh penduduk golongan kaya dan hanya sedikit bagian yang dinikmati oleh penduduk golongan miskin, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Jhingan, 2013). Pada Gambar 4.22 terlihat bahwa 20% penduduk kelompok berpendapatan tinggi (*upper income*) menikmati pendapatan hampir setengah dari kue pendapatan, atau sebesar 45 persen. Sementara 36 persen dari kue pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk kelompok berpendapatan menengah (*middle income*). Sedangkan sisanya yang hanya sebesar 19 persen dinikmati oleh 40% penduduk kelompok berpendapatan rendah (*lower income*).

**Gambar 4.22 : Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur.

Ketika hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yang dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan dari masyarakat golongan menengah dan golongan kaya. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan atas berbagai barang maupun jasa juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika permintaan meningkat maka akan terjadi peningkatan harga-harga. Kemudian terjadi percepatan laju inflasi yang membuat biaya-biaya, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang semakin mahal. Oleh karena itu ketimpangan pendapatan yang semakin meluas akan semakin menyulitkan akses kesejahteraan bagi penduduk miskin, serta berpotensi membuat kondisi dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Menurut Purnamasari (dalam Safitri, 2015) pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan arus urbanisasi. Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk miskin untuk pindah ke daerah tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi dibanding di daerah asalnya. Meskipun suatu wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun itu bukan menjadi jaminan bahwa daerah tersebut mampu menyerap tambahan jumlah angkatan kerja dari luar daerahnya. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum tentu mampu menyerap semua angkatan kerja dari luar daerah, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka, sehingga adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut justru akan meningkatkan jumlah pengangguran, dan nantinya akan menambah jumlah penduduk miskin.

Dapat disimpulkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjamin terjadinya penurunan angka kemiskinan, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Ketika ditinjau lebih lanjut, peran daripada masyarakat miskin dalam menyumbang perekonomian masih rendah, sehingga wajar apabila pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan dalam mengembangkan sektor yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat miskin agar sektor tersebut mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada dalam lingkup sektor tersebut mampu menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang ada.

#### **4.7.2 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan**

Ketimpangan atau kesenjangan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ini timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi dalam jumlah banyak, serta sumber daya yang melimpah, cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat dengan faktor produksi yang minim dan sumber daya yang masih kurang memadai.

Berdasarkan estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0.0000, dan jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% maka nilai probabilitas lebih kecil

dari alpha ( $\alpha$ ) 5%, atau dengan kata lain  $0.0000 < 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dari variabel ketimpangan pendapatan sebesar 19.58729 dan bertanda positif, artinya apabila ketimpangan pendapatan meningkat 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 19.58729 persen. Atau dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan sebesar 0.1 satuan maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 1.958729 persen. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dibentuk pada penelitian ini, dimana dalam hipotesis tersebut menyebutkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Atik M. Suhartini pada tahun 2011 yang meneliti 33 Provinsi di Indonesia periode 2005-2009 yang menyatakan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak signifikan pada taraf 5 persen. Artinya, peningkatan pendapatan yang dinyatakan dengan peningkatan indeks Gini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin, meskipun penurunan indeks Gini bukan berarti akan menurunkan kemiskinan.

Indeks Gini di Jawa Timur sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, menunjukkan *trend* yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Angka indeks Gini yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa hasil dari capaian pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan pada indeks Gini. Salah satunya adalah karena adanya pembangunan yang tidak inklusif, yaitu manfaat dari capaian pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata pada seluruh kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dari peningkatan pendapatan riil pada masyarakat kelompok bawah yang jauh lebih sedikit dibandingkan peningkatan pendapatan riil pada masyarakat kelompok atas. Pada Tabel 4.11 terlihat bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan



pendapatan pada masyarakat kelompok bawah sebesar 0.14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, peningkatan yang terjadi tidak sebanding dengan peningkatan yang terjadi pada masyarakat kelompok menengah yang mengalami peningkatan sebesar 0.83 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.12 : Perkembangan Pemerataan Pendapatan di Jawa Timur**

Tahun	40% Bawah	40% Menengah	40% Atas
2013	19.82	34.55	45.63
2014	18.63	35.22	46.15
2015	18.77	36.05	45.18

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2016.

Penyebab lainnya adalah pemerintah hanya terpusat pada sektor-sektor tertentu yang di rasa mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Terfokusnya pembangunan hanya di salah satu sektor akan membuat sektor tersebut menjadi lebih unggul dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Alhasil akan memunculkan ketimpangan antar sektor. Kesenjangan diantara sektor-sektor ini nantinya akan membuat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi tidak merata, sebab manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai hanya akan dirasakan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat yang berada di dalam sektor-sektor tertentu (sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB).

Faktor lainnya datang dari kebijakan pemerintah yang semakin memperburuk kondisi ketimpangan di Jawa Timur. Seperti halnya, subsidi BBM yang lebih menguntungkan penduduk kaya. Sekitar 84 persen manfaat dari adanya subsidi BBM dinikmati oleh rumah tangga golongan menengah keatas, dan sisanya yang hanya sebesar 16 persen dinikmati oleh rumah tangga golongan

menengah kebawah (Bank Dunia, 2014). Di samping itu, bantuan sosial yang datang dari pemerintah seringkali tidak tepat sasaran seperti beras miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya yang membuat kebijakan yang di bentuk menjadi kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan bahkan memperparah kondisi ketimpangan antar kelompok masyarakat. Selain itu, masalah ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh beragam faktor lainnya, seperti kondisi infrastruktur, jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia (yang didasarkan pada mutu pendidikan dan kesehatan), dan lain sebagainya.

Adanya ketidakmerataan pada distribusi pendapatan akan menyebabkan turunnya derajat kesejahteraan pada kelompok masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Untuk itu, masalah ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan. Perlu adanya pembangunan pada semua sektor (tidak hanya terfokus di satu sektor), serta meningkatkan keterkaitan antar sektor untuk menghasilkan pembangunan yang lebih merata, sehingga tidak hanya wilayah yang bergerak di sektor industri dan perdagangan saja yang memiliki tingkat kemiskinan rendah. Selain itu, dapat pula dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada, penyediaan faktor produksi, memperbaiki kondisi infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **4.7.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Tingginya angka pengangguran akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika angkatan kerja semakin meningkat dan tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja, maka secara otomatis akan menjadi beban bagi proses

pembangunan. Sebab peningkatan pengangguran akan berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, serta memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0.0240, dan jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% maka nilai probabilitas lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 5%, atau dengan kata lain  $0.0240 < 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dari variabel pengangguran sebesar 0.215234 dan bertanda positif, artinya apabila pengangguran meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.215234 persen. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah di bentuk pada penelitian ini, dimana dalam hipotesis tersebut menyebutkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Istifaiyah pada tahun 2015 yang meneliti Gerbangkertasusila Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013 yang menyatakan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.697321 (Ardianto, 2016).

Angka pengangguran di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, dimana jumlah penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permintaannya, sehingga jumlah angkatan kerja yang ada tidak dapat terserap seluruhnya pada lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Meningkatnya jumlah pengangguran

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan upah minimum, dan masih banyak yang lainnya.

Pengangguran dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sesuai dengan hasil pada penelitian ini bahwa tingginya jumlah pengangguran akan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat yang menganggur tidak memiliki penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya pendapatan menjadi penyebab seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin. Wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Untuk itu, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah adalah dengan cara meningkatkan peluang kerja, meningkatkan upah minimum, memperbaiki kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tingkat pengangguran berangsur-angsur akan menurun, dan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Kabupaten/kota di Jawa Timur yang penduduknya lebih banyak bekerja di sektor informal cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah yang penduduknya lebih banyak bekerja di sektor formal seperti di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan pada sektor informal tidak terdapat sistem upah minimum dan jam kerja yang tidak teratur. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto dimana angka kemiskinan di wilayah tersebut cenderung rendah karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor formal.

Tingginya tingkat kemiskinan pada daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal membuat sektor informal menyumbang jumlah TKI lebih besar dibandingkan sektor formal. Sebesar 26.993 jiwa dari total TKI Jawa Timur,

atau sekitar 56 persen berasal dari sektor informal, sedangkan 44 persen sisanya berasal dari sektor formal atau sebesar 21.319 jiwa dari total TKI Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014, persentase TKI Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 3 persen, dari 53 persen di tahun 2013 dan 2014 menjadi 56 persen di tahun 2015. Oleh karena itu, tak heran jika tingkat kemiskinan daerah dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor formal.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2015, jumlah TKI yang berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 48.312 jiwa, 35 persen laki-laki atau sebesar 16.895 jiwa dan 65% perempuan atau sebesar 31.417 jiwa. Berdasarkan persentase, Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2013 sebesar 61 persen, kemudian tahun 2014 sebesar 63 persen, dan 65 persen di tahun 2015, atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 2 persen di setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka memang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sebesar 9.051 (18,73 persen) berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan 22.893 (47,39 persen) berasal dari lulusan SMP. Hanya 374 (0,77 persen) yang berasal dari lulusan Diploma dan 268 (0,55 persen) berasal dari lulusan Sarjana. Kemudian, apabila ditinjau berdasarkan status perkawinan, sebanyak 28.891 (60 persen) sudah menikah, 15.554 (32 persen) belum menikah, dan 3.867 (8 persen) berstatus cerai. Selama kurun waktu 2013 hingga 2015 penyumbang jumlah TKI terbesar di Jawa Timur berasal dari Kabupaten Ponorogo, yang jumlahnya mencapai 25.806 jiwa. Kabupaten Ponorogo mampu mengirimkan kurang lebih sekitar 2.000 jiwa TKI setiap tahunnya ke luar negeri.

#### 4.7.4 Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, sebab sebagian besar masyarakat di negara berkembang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Pembangunan pada sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan hasil produksi pertanian guna mencukupi kebutuhan pangan, peningkatan ekspor, peningkatan pendapatan para petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan dalam berusaha. Terlebih lagi sektor pertanian mampu menyerap jumlah tenaga kerja tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Di samping itu, sektor pertanian dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat miskin, sebab tidak adanya standar kualifikasi tenaga kerja yang diterapkan oleh sektor tersebut sehingga masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun dapat dengan mudah memasuki sektor tersebut.

Berdasarkan estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel sektor pertanian berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0.0000, dan jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% maka nilai probabilitas lebih kecil dari alpha ( $\alpha$ ) 5%, atau dengan kata lain  $0.0000 < 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dari variabel sektor pertanian sebesar 0.484720 dan bertanda positif, artinya apabila sektor pertanian meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.484720 persen. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibentuk pada penelitian ini, dimana dalam hipotesis tersebut menyebutkan bahwa variabel sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ajid Hajiji pada tahun



2010 yang meneliti Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2002-2008 yang menyatakan bahwa variabel sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.777811.

Adanya pengaruh yang signifikan variabel sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Jawa Timur bekerja di sektor pertanian. Ditambah pula dengan tingginya sektor pertanian dalam menyerap jumlah tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya sehingga membuat sektor pertanian memiliki keterkaitan yang cukup besar dalam pengentasan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Akan tetapi, pengaruh yang positif dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan sebelumnya, dirasa sektor pertanian masih kurang menguntungkan bagi masyarakat perdesaan, khususnya bagi para petani. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2015, pertumbuhan output yang hanya sebesar 0,16 persen di sektor pertanian, dijadikan tumpuan penghidupan sekitar 33 persen tenaga kerja di Jawa Timur. Hal ini tentu berakibat pada lambannya peningkatan kesejahteraan para petani dibandingkan dengan kesejahteraan pekerja di luar sektor pertanian.

Salah satunya terkait lahan pertanian yang semakin sempit, yang disebabkan oleh semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya bangunan baru seperti gedung dan perumahan akibat dari adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan arus urbanisasi yang membuat semakin banyaknya pendatang baru di kota-kota besar. Kemudian yang menjadi fokus terkait hal ini bahwa para kontraktor dalam mendirikan sebuah tempat hunian (misalnya perumahan), akan lebih memilih lahan subur dibandingkan lahan tidak subur. Hal ini dikarenakan pada lahan subur mengandung kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan non subur. Di sisi lain, seringkali para petani akan menjual lahan pertanian mereka dengan harga yang menurut mereka tinggi, dengan harapan hasil dari penjualan tersebut dapat

mereka jadikan sebagai modal usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Untuk itu, rendahnya lahan pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan proses produksi menjadi tidak efisien.

Penyebab lainnya yaitu harga jual produk yang rendah, terutama saat musim panen terjadi. Peningkatan produk pertanian akan menyebabkan turunnya harga apabila tidak disertai dengan peningkatan permintaan. Terlebih lagi para tengkulak akan lebih mudah menekan harga produk sehingga laba yang diterima oleh para petani belum mampu menutup biaya produksi. Selain itu, kurangnya kepemilikan faktor produksi di kalangan petani, misalnya seperti lahan pertanian. Ketika mereka memiliki lahan pertanian artinya mereka bekerja untuk diri mereka sendiri sehingga hasil dari proses produksi yang mereka terima lebih besar. Namun apabila mereka bekerja untuk orang lain, atau biasa disebut sebagai buruh tani, maka pendapatan yang mereka terima akan lebih rendah.

Kebanyakan dari para petani mengalami keterbatasan akses permodalan, mereka kesulitan dalam penyediaan modal untuk biaya produksi. Seringkali mereka lebih mengandalkan jasa para tengkulak untuk persediaan modal mereka dengan tingkat pengembalian yang kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam menjangkau informasi terkait dengan permodalan. Di tambah lagi minimnya informasi dan teknologi yang membuat proses produksi menjadi kurang efisien.

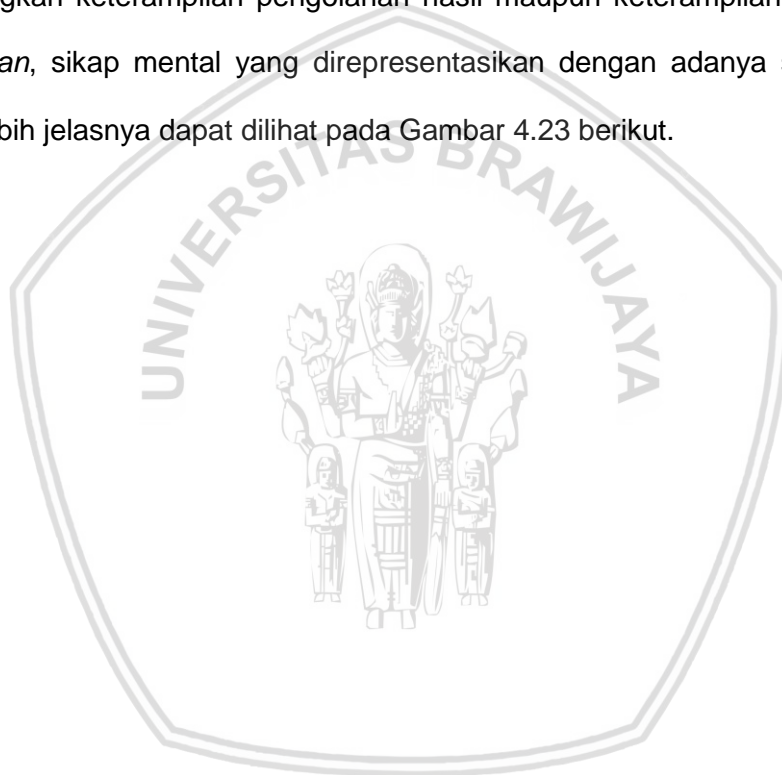
Terdapat 9 (sembilan) faktor yang mempengaruhi lambannya pembangunan pertanian di Indonesia (Sukino, 2014). *Pertama*, masalah yang terjadi di sektor pertanian tidak melulu terjadi pada proses produksi, melainkan juga pelaksanaan pasca panen. Pada umumnya para petani menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah yang belum diolah, akibatnya nilai tambah yang dihasilkan kecil. Hingga saat ini hasil pertanian Indonesia masih diekspor ke negara-negara konsumen untuk keuntungan industri-industri di luar negeri.

*Kedua*, pembangunan infrastruktur diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan. Untuk itu, perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah masih belum seimbang, karena pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan yang ada di kota dibandingkan di desa. Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk dimanfaatkan, guna menunjang proses produksi dan proses pembangunan sektor pertanian, diantaranya: (a) prasarana pendidikan; (b) prasarana pengairan; (c) agroindustri; (d) transportasi hasil pertanian; (e) fasilitas kelembagaan pertanian; dan (f) lembaga penyalur sarana pertanian.

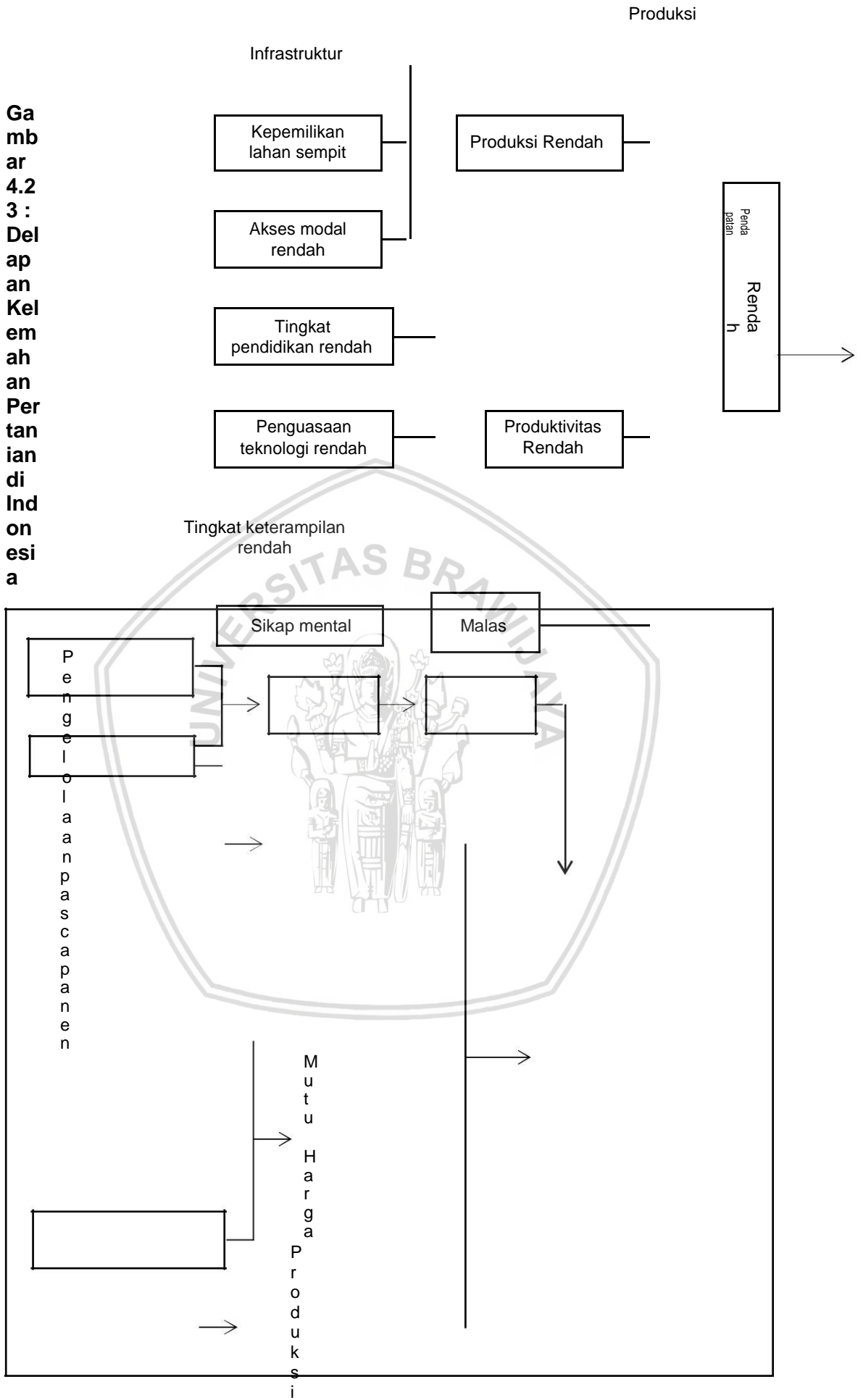
*Ketiga*, luas kepemilikan lahan merupakan salah satu faktor produksi, yang menjadi penting sebab ketika lahan sempit, produksi pertanian tidak akan mampu untuk mencukupi biaya hidup keluarga tani. Lahan yang sempit akan menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi (*high cost*) baik dari segi tenaga kerja, penggunaan bibit, pemupukan, biaya penanggulangan hama, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Selain itu, lahan yang sempit juga akan mengurangi lahan efektif. Banyaknya pematang merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi jumlah lahan efektif. *Keempat*, akses modal yang sulit. Para investor lebih mengutamakan pengusaha non pertanian dalam berinvestasi sebab mereka beranggapan bahwa sektor pertanian lebih rawan gagal dibandingkan sektor non pertanian. Sulitnya akses permodalan akan menghambat pembangunan di sektor pertanian. Untuk itu, perlu adanya lembaga khusus untuk menangani permodalan bagi para petani dalam pengembangan usaha tani.

*Kelima*, tingkat pendidikan yang masih rendah. Salah satu faktor utama dalam pembangunan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui pendidikan, pemerintah secara konsisten berupaya

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *Keenam*, masih rendahnya dalam hal penguasaan teknologi. Hal ini dikarenakan perilaku petani yang masih menolak resiko, keterbatasan biaya, dan lain sebagainya. *Ketujuh*, rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki para petani. Terdapat minimal tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh para petani, yaitu keterampilan budidaya, keterampilan pengolahan hasil-hasil pertanian, dan keterampilan pemasaran. Umumnya, keterampilan budidaya lebih banyak dikuasai oleh sebagian besar para petani dibandingkan keterampilan pengolahan hasil maupun keterampilan pemasaran. *Kedelapan*, sikap mental yang direpresentasikan dengan adanya sikap malas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.23 berikut.



Gambar 4.23 : Delapan Kelahiran Pertanian di Indonesia



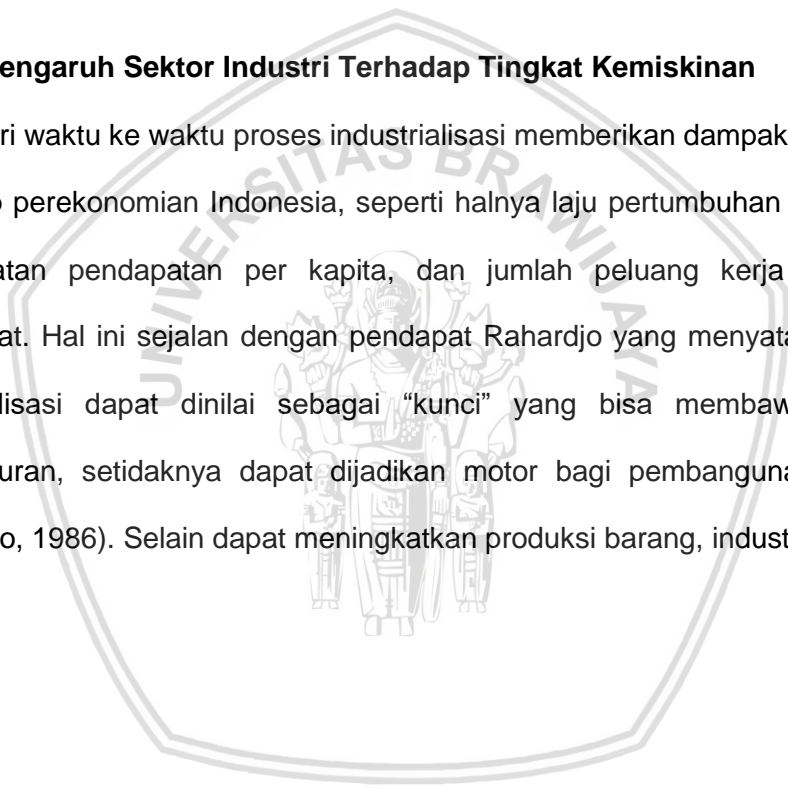
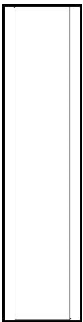
Produksi

## KEMISKINA

Sumber: Sukino, 2014.

### 4.7.5 Pengaruh Sektor Industri Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari waktu ke waktu proses industrialisasi memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti halnya laju pertumbuhan yang tinggi, peningkatan pendapatan per kapita, dan jumlah peluang kerja yang kian meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahardjo yang menyatakan bahwa industrialisasi dapat dinilai sebagai “kunci” yang bisa membawa ke arah kemakmuran, setidaknya dapat dijadikan motor bagi pembangunan ekonomi (Rahardjo, 1986). Selain dapat meningkatkan produksi barang, industrialisasi





diperkirakan pula dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin sempit di sektor pertanian.

Berdasarkan estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa variabel sektor industri berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0.0705, dan jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% maka nilai probabilitas lebih besar dari alpha ( $\alpha$ ) 5%, atau dengan kata lain  $0.0705 > 0.05$ . Sedangkan nilai koefisien dari variabel sektor industri sebesar 0.391817 dan bertanda positif, artinya apabila tingkat pengangguran meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.391817 persen. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibentuk pada penelitian ini, dimana dalam hipotesis tersebut menyebutkan bahwa variabel sektor industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ajid Hajiji pada tahun 2010 yang meneliti Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2002-2008 yang menyatakan bahwa variabel sektor industri berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar 0.351389.

Sektor industri memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Jawa Timur. Terbukti bahwa pada tahun 2015 sektor industri mampu menyumbang sebesar 29.28 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 28.85 persen. Perkembangan sektor industri salah satunya disebabkan oleh meningkatnya permintaan output dari sektor industri. Peningkatan permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi produksi. Dalam meningkatkan produksinya tentunya perusahaan membutuhkan lebih banyak input, salah

satunya adalah tenaga kerja. Sehingga adanya peningkatan peranan sektor industri mampu menurunkan kemiskinan.

Akan tetapi, adanya standar kualifikasi tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor industri membuat penduduk miskin sulit memasuki sektor tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Sehingga hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil dari peningkatan *share* industri. Dengan demikian, perkembangan sektor industri tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan angka kemiskinan di Jawa Timur. Perlu adanya peran dari pemerintah di dalam pendistribusian hasil perkembangan sektor industri yang terjadi saat ini agar manfaat tersebut dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat kelompok menengah ke atas melainkan juga oleh masyarakat kelompok menengah ke bawah. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan mendistribusikan pajak yang telah dibebankan kepada industri terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, manfaat dari perkembangan sektor industri dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mempersempit jurang kesenjangan antar kelompok masyarakat serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sektor pertanian dan sektor industri terhadap tingkat kemiskinan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum terdistribusi secara merata pada setiap kelompok masyarakat, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih terfokusnya pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu, sehingga membuat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat menjadi semakin timpang.
3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja dimana jumlah penawaran tenaga kerja selalu melebihi jumlah permintaannya. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang turut serta dalam menyumbang angka pengangguran yang dianggap sebagai pemicu meningkatnya kemiskinan.
4. Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik alih fungsi lahan pertanian, rendahnya harga jual produk, keterbatasan

faktor produksi, sulitnya akses permodalan, dan minimnya teknologi dalam proses produksi yang membuat sektor pertanian mengalami perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

5. Sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan tingginya standar kualifikasi tenaga kerja yang ditetapkan di sektor industri sehingga membuat penduduk miskin mengalami kesulitan untuk memasuki sektor tersebut, khususnya dari segi pendidikan dan keterampilan.

## 1.2 Saran

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang merupakan sebuah prestasi bagi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diyakin dapat menganggulangi masalah kemiskinan. Akan tetapi, tidak akan efektif jika hanya terfokuskan pada capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Diperlukan juga untuk memperhitungkan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, serta sektor-sektor yang dapat berpengaruh langsung terhadap masyarakat miskin. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran yang diakibatkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Sehingga membuat sebagian besar penduduk miskin lebih memilih bekerja di sektor informal karena terbatasnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti penyediaan kredit usaha rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Sebab UMKM merupakan bidang usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin yang rata-rata dari mereka memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianto, T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2013. 9.
- Arsyad, L. (1988). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Attibrizi, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Hubungannya Dengan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin di Indonesia. *Tesis*.
- Bappenas. (2004). *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan: Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2010). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- BPS. (2016). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Pokok-pokok Pikiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2009 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2004-2009*. Jakarta: Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Elinur. (2012). Analisis Konsumsi dan Penyediaan Energi Dalam Perekonomian Indonesia. *Disertasi*.
- Firdaus, M. (2011). *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fitri, T. M. (2016). Analisis Dampak Transformasi Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *JIM FEB Universitas Brawijaya*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hajiji, A. (2010). Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008. *Skripsi*.
- Jhingan, M. (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharrudin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, R. (2016, Juni 14). *Inilah Provinsi Sarang Kemiskinan di Indonesia*. Diambil kembali dari DW: [www.dw.com/id/inilah-provinsi-sarang-kemiskinan-di-indonesia/g-19328443](http://www.dw.com/id/inilah-provinsi-sarang-kemiskinan-di-indonesia/g-19328443)
- Rahardjo, M. (1986). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rumagit, M. C. (2016). Pro-Poor Growth dan Desentralisasi Fiskal dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara. *Disertasi*.
- Safitri, R. I. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan: Analisis Data Provinsi Di Indonesia 2010-2013.
- Suhartini, A. M. (2011). Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia. *Tesis*.
- Sukino. (2014). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani: Terobosan menanggulangi kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tambunan, T. (2015). *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. T. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yustika, A. (2007). *Perekonomian Indonesia Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Yustika, A. (2011). *Dari Krisis Ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*. Malang: UB Press.



## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Data Kemiskinan (POV), Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Ketimpangan Pendapatan (GINI), Pengangguran (UNP), Sektor Pertanian (AGR), dan Sektor Industri (IND) Pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015**

Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kab. Pacitan	2009	19.01	6.07	0.27	1.32	31.91	7.34
Kab. Pacitan	2010	19.5	6.53	0.29	0.87	30.89	7.29
Kab. Pacitan	2011	18.13	6.67	0.34	1.54	29.71	7.27
Kab. Pacitan	2012	17.29	6.33	0.31	1.02	30.3	6.92
Kab. Pacitan	2013	16.73	5.87	0.33	0.99	30.31	6.79
Kab. Pacitan	2014	16.18	5.2	0.31	1.08	30.53	6.71
Kab. Pacitan	2015	16.68	5.1	0.33	0.97	30.45	6.58
Kab. Ponorogo	2009	14.63	5.01	0.25	3.45	35.01	6.79
Kab. Ponorogo	2010	13.22	5.78	0.25	3.83	34.15	6.78
Kab. Ponorogo	2011	12.29	6.21	0.29	6.79	32.63	6.76
Kab. Ponorogo	2012	11.76	5.98	0.31	3.14	32.35	6.74
Kab. Ponorogo	2013	11.92	5.14	0.34	3.25	31.72	6.73
Kab. Ponorogo	2014	11.53	5.21	0.31	3.66	31.6	6.79
Kab. Ponorogo	2015	11.91	5.25	0.36	3.68	31.65	6.74
Kab. Trenggalek	2009	18.27	5.64	0.28	3.91	31.14	14.47
Kab. Trenggalek	2010	16	6.11	0.29	2.15	30.48	14.4
Kab. Trenggalek	2011	14.9	6.46	0.34	3.27	29.21	14.4
Kab. Trenggalek	2012	14.21	6.22	0.32	2.98	30.09	14.18
Kab. Trenggalek	2013	13.59	6	0.34	4.04	30.45	13.97
Kab. Trenggalek	2014	13.1	5.28	0.31	4.2	31.14	14.02
Kab. Trenggalek	2015	13.39	5.03	0.37	2.46	31.42	14.08
Kab. Tulungagung	2009	10.6	6.01	0.28	4.54	23.21	21.02
Kab. Tulungagung	2010	10.64	6.48	0.27	3.5	22.45	21.02
Kab. Tulungagung	2011	9.9	6.73	0.32	3.56	21.72	21.04
Kab. Tulungagung	2012	9.4	6.47	0.34	3.1	21.92	21
Kab. Tulungagung	2013	9.07	6.13	0.37	2.71	22	20.62
Kab. Tulungagung	2014	8.75	5.46	0.31	2.42	22.34	20.49
Kab. Tulungagung	2015	8.57	4.99	0.36	3.95	22.37	20.67
Kab. Blitar	2009	13.19	5.18	0.3	3	37.52	13.73
Kab. Blitar	2010	12.13	6.07	0.27	2.24	36.08	13.67
Kab. Blitar	2011	11.29	6.33	0.33	3.91	35	13.59
Kab. Blitar	2012	10.74	5.62	0.36	2.82	35.08	12.95
Kab. Blitar	2013	10.57	5.06	0.33	3.64	35.25	12.82
Kab. Blitar	2014	10.22	5.02	0.3	3.08	35.87	12.75
Kab. Blitar	2015	9.97	5.05	0.33	2.79	36.05	12.83

Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kab. Kediri	2009	17.05	4.95	0.25	5.1	27.72	19.55
Kab. Kediri	2010	15.52	6.04	0.26	3.75	27.02	19.72
Kab. Kediri	2011	14.44	6.2	0.31	8.33	26.48	19.87
Kab. Kediri	2012	13.71	6.11	0.32	4.08	26.63	19.42
Kab. Kediri	2013	13.23	5.82	0.3	4.65	26.31	19.1
Kab. Kediri	2014	12.77	5.32	0.31	4.91	26.53	19.05
Kab. Kediri	2015	12.91	4.88	0.34	5.02	26.51	19.11
Kab. Malang	2009	13.57	5.25	0.29	6.35	19.98	29
Kab. Malang	2010	12.54	6.27	0.3	4.49	19.36	29.34
Kab. Malang	2011	11.67	7.17	0.33	5.51	18.49	29.66
Kab. Malang	2012	11.04	6.77	0.31	3.75	18.16	29.91
Kab. Malang	2013	11.48	5.3	0.38	5.17	18.15	29.32
Kab. Malang	2014	11.07	6.01	0.33	4.83	18.15	29.99
Kab. Malang	2015	11.53	5.27	0.38	4.95	17.96	30.2
Kab. Lumajang	2009	15.83	5.46	0.23	2.24	42.43	18.71
Kab. Lumajang	2010	13.98	5.92	0.24	3.17	41.55	18.77
Kab. Lumajang	2011	13.01	6.26	0.27	3.16	40.4	18.86
Kab. Lumajang	2012	12.4	6	0.27	4.6	40.34	18.57
Kab. Lumajang	2013	12.14	5.58	0.23	2.01	39.82	18.57
Kab. Lumajang	2014	11.75	5.32	0.23	2.83	39.64	18.85
Kab. Lumajang	2015	11.52	4.62	0.29	2.6	39.68	18.84
Kab. Jember	2009	15.43	5.55	0.3	4.42	33.93	20.21
Kab. Jember	2010	13.27	6.05	0.25	2.71	33.25	20.28
Kab. Jember	2011	12.44	7	0.31	3.34	31.99	20.42
Kab. Jember	2012	11.81	5.83	0.28	3.77	31.78	20.81
Kab. Jember	2013	11.68	6.06	0.26	3.94	31.06	19.94
Kab. Jember	2014	11.28	6.21	0.26	4.64	30.74	19.84
Kab. Jember	2015	11.22	5.36	0.33	4.77	30.66	19.86
Kab. Banyuwangi	2009	12.16	6.05	0.26	4.05	35.97	11.88
Kab. Banyuwangi	2010	11.25	6.22	0.24	3.92	35.56	11.82
Kab. Banyuwangi	2011	10.47	7.02	0.32	6.06	34.75	11.74
Kab. Banyuwangi	2012	9.97	7.24	0.29	3.41	35.77	11.39
Kab. Banyuwangi	2013	9.61	6.71	0.3	4.65	36.23	11.16
Kab. Banyuwangi	2014	9.29	5.72	0.29	7.17	36.29	10.97
Kab. Banyuwangi	2015	9.17	6.01	0.34	2.55	36.46	10.88
Kab. Bondowoso	2009	20.18	5.01	0.25	2.88	35.3	22.09
Kab. Bondowoso	2010	17.89	5.64	0.21	1.59	35	22.06
Kab. Bondowoso	2011	16.66	6.2	0.29	3.01	33.98	22.11
Kab. Bondowoso	2012	15.81	6.09	0.3	3.6	33.94	21.59
Kab. Bondowoso	2013	15.29	5.81	0.28	2.04	33.76	21.08
Kab. Bondowoso	2014	14.76	5.05	0.27	3.72	33.7	20.84
Kab. Bondowoso	2015	14.96	4.95	0.32	1.75	33.66	20.82

Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kab. Situbondo	2009	15.99	5.15	0.29	2.28	36.98	15.76
Kab. Situbondo	2010	16.23	5.75	0.26	3.13	36.71	15.8
Kab. Situbondo	2011	15.11	6.31	0.26	4.77	35.45	15.87
Kab. Situbondo	2012	14.34	5.43	0.27	3.33	35.79	15.77
Kab. Situbondo	2013	12.65	6.19	0.28	3.01	35.94	15.69
Kab. Situbondo	2014	13.15	5.79	0.29	4.15	36.32	15.76
Kab. Situbondo	2015	13.63	4.86	0.33	3.57	36.24	16.09
Kab. Probolinggo	2009	27.69	5.72	0.3	2.6	40.78	21.58
Kab. Probolinggo	2010	25.22	6.19	0.25	2.02	39.77	21.32
Kab. Probolinggo	2011	23.48	6.23	0.28	2.8	38.45	21.35
Kab. Probolinggo	2012	22.22	6.44	0.29	1.92	39.21	21.12
Kab. Probolinggo	2013	21.21	5.15	0.34	3.3	38.78	21.49
Kab. Probolinggo	2014	20.44	4.9	0.32	1.47	38.46	21.64
Kab. Probolinggo	2015	20.82	4.76	0.3	2.51	38.26	21.99
Kab. Pasuruan	2009	15.58	5.31	0.27	5.03	8.17	56.02
Kab. Pasuruan	2010	13.18	6.14	0.26	3.49	7.87	55.96
Kab. Pasuruan	2011	12.26	7.02	0.28	4.3	7.58	56
Kab. Pasuruan	2012	11.58	7.5	0.3	6.38	7.65	56.24
Kab. Pasuruan	2013	11.26	6.95	0.28	4.34	7.75	56.03
Kab. Pasuruan	2014	10.86	6.74	0.28	4.43	7.91	56.13
Kab. Pasuruan	2015	10.72	5.38	0.32	6.41	7.94	56.32
Kab. Sidoarjo	2009	6.91	4.91	0.32	10.19	2.55	51.64
Kab. Sidoarjo	2010	7.45	5.63	0.27	8.35	2.43	50.64
Kab. Sidoarjo	2011	6.97	6.88	0.31	8.65	2.25	49.68
Kab. Sidoarjo	2012	6.44	7.26	0.33	5.37	2.35	48.29
Kab. Sidoarjo	2013	6.72	6.89	0.3	4.12	2.38	46.96
Kab. Sidoarjo	2014	6.4	6.44	0.3	3.88	2.39	47.06
Kab. Sidoarjo	2015	6.44	5.24	0.35	6.3	2.44	46.93
Kab. Mojokerto	2009	13.24	5.21	0.25	5.54	9.57	53.65
Kab. Mojokerto	2010	12.23	6.78	0.25	4.84	9.63	53.17
Kab. Mojokerto	2011	11.38	7.03	0.27	6.79	9.17	53.16
Kab. Mojokerto	2012	10.71	7.26	0.28	3.35	9.28	52.63
Kab. Mojokerto	2013	10.99	6.56	0.28	3.16	9.36	52.06
Kab. Mojokerto	2014	10.56	6.45	0.27	3.81	9.3	52.3
Kab. Mojokerto	2015	10.57	5.65	0.31	4.05	9.29	52.17
Kab. Jombang	2009	14.46	5.28	0.27	6.19	24.12	21.62
Kab. Jombang	2010	13.84	6.12	0.26	5.27	22.97	21.34
Kab. Jombang	2011	12.88	6.83	0.37	6.58	21.89	21.23
Kab. Jombang	2012	12.23	6.15	0.3	6.72	22.41	20.46
Kab. Jombang	2013	11.17	5.93	0.28	5.59	22.27	20.08
Kab. Jombang	2014	10.8	5.42	0.32	4.39	22.45	19.97
Kab. Jombang	2015	10.79	5.35	0.32	6.11	22.2	19.83



Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kab. Nganjuk	2009	17.22	6.03	0.25	3.98	37.65	13.32
Kab. Nganjuk	2010	14.91	6.28	0.24	3.64	36.15	13.2
Kab. Nganjuk	2011	13.88	6.42	0.31	6.31	35.03	13.11
Kab. Nganjuk	2012	13.22	5.85	0.38	4.09	34.36	12.74
Kab. Nganjuk	2013	13.6	5.4	0.33	4.73	33.63	12.64
Kab. Nganjuk	2014	13.14	5.1	0.3	3.93	32.92	12.74
Kab. Nganjuk	2015	12.69	5.18	0.35	2.1	32.54	12.76
Kab. Madiun	2009	16.97	5.08	0.27	6.04	37.17	10.1
Kab. Madiun	2010	15.45	5.92	0.25	5.55	36.46	10.04
Kab. Madiun	2011	14.37	6.41	0.29	4.96	35.23	9.99
Kab. Madiun	2012	13.7	6.12	0.33	3.99	35.44	9.84
Kab. Madiun	2013	12.45	5.67	0.3	4.63	35.09	9.77
Kab. Madiun	2014	12.04	5.34	0.28	3.38	35.01	9.76
Kab. Madiun	2015	12.54	5.26	0.32	6.99	34.62	9.77
Kab. Magetan	2009	13.97	5.36	0.28	3.82	35.56	9.77
Kab. Magetan	2010	12.94	5.79	0.27	2.41	34.89	9.8
Kab. Magetan	2011	12.01	6.16	0.31	3.95	34.21	9.82
Kab. Magetan	2012	11.5	5.79	0.33	3.64	34.32	9.64
Kab. Magetan	2013	12.19	5.85	0.34	2.96	34.44	9.58
Kab. Magetan	2014	11.8	5.1	0.32	4.28	34.59	9.65
Kab. Magetan	2015	11.35	5.17	0.34	6.05	34.28	9.62
Kab. Ngawi	2009	19.01	5.65	0.27	4.49	38.96	8.89
Kab. Ngawi	2010	18.26	6.09	0.22	4.8	38.53	8.9
Kab. Ngawi	2011	16.74	6.14	0.3	5.1	37.51	8.94
Kab. Ngawi	2012	15.99	6.63	0.3	2.94	38.63	8.76
Kab. Ngawi	2013	15.45	5.5	0.32	4.97	39.51	8.65
Kab. Ngawi	2014	14.48	5.82	0.34	5.61	39.19	8.86
Kab. Ngawi	2015	15.61	5.08	0.34	3.99	39.74	8.6
Kab. Bojonegoro	2009	21.27	10.1	0.26	4.52	16.16	5.34
Kab. Bojonegoro	2010	18.78	11.84	0.28	3.29	14.6	5.25
Kab. Bojonegoro	2011	17.47	9.19	0.27	5.7	13.11	5.34
Kab. Bojonegoro	2012	16.66	3.77	0.31	3.42	14.05	5.4
Kab. Bojonegoro	2013	16.02	2.37	0.32	5.81	14.29	5.47
Kab. Bojonegoro	2014	15.48	2.29	0.28	3.21	15.06	5.84
Kab. Bojonegoro	2015	15.71	17.42	0.32	5.01	17.28	6.6
Kab. Tuban	2009	23.01	5.99	0.23	4.22	21.21	30.61
Kab. Tuban	2010	20.19	6.22	0.25	2.86	20.18	30.17
Kab. Tuban	2011	18.78	7.12	0.28	3.69	19.22	29.78
Kab. Tuban	2012	17.84	6.29	0.27	4.13	20.29	29.19
Kab. Tuban	2013	17.23	5.85	0.3	4.3	20.69	29.14
Kab. Tuban	2014	16.64	5.47	0.24	3.63	20.74	28.52
Kab. Tuban	2015	17.08	4.89	0.29	3.03	21.35	28.36



Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kab. Lamongan	2009	20.47	6.31	0.22	4.92	41.38	6.95
Kab. Lamongan	2010	18.7	6.89	0.23	3.62	40.29	6.98
Kab. Lamongan	2011	17.41	7.02	0.29	6.14	38.08	7.23
Kab. Lamongan	2012	16.7	6.92	0.27	4.75	39.08	7.12
Kab. Lamongan	2013	16.18	6.93	0.31	4.93	39.56	7.02
Kab. Lamongan	2014	15.68	6.3	0.27	4.3	39.74	7.32
Kab. Lamongan	2015	15.38	5.77	0.3	4.1	39.32	7.5
Kab. Gresik	2009	19.14	10.86	0.26	7.01	7.74	49.21
Kab. Gresik	2010	16.42	7.06	0.24	7.7	7.42	48.37
Kab. Gresik	2011	15.33	7.29	0.33	5.93	7.08	48.01
Kab. Gresik	2012	14.35	6.92	0.43	6.78	7.39	48.15
Kab. Gresik	2013	13.94	6.05	0.36	4.55	7.58	48.06
Kab. Gresik	2014	13.41	7.04	0.28	5.06	7.73	48.21
Kab. Gresik	2015	13.63	6.58	0.31	5.67	8.21	49.22
Kab. Bangkalan	2009	30.45	4.96	0.29	5.01	20.39	1.71
Kab. Bangkalan	2010	28.12	5.44	0.29	5.79	19.66	1.75
Kab. Bangkalan	2011	26.22	6.25	0.3	6.37	18.34	1.8
Kab. Bangkalan	2012	24.7	-1.42	0.28	5.13	19.9	1.93
Kab. Bangkalan	2013	23.23	0.19	0.28	6.78	20.58	1.99
Kab. Bangkalan	2014	22.38	7.19	0.33	5.68	20.32	1.99
Kab. Bangkalan	2015	22.57	-2.66	0.32	5	25.51	2.47
Kab. Sampang	2009	31.94	4.64	0.27	1.7	33.71	3.3
Kab. Sampang	2010	32.47	5.34	0.24	1.77	32.35	3.31
Kab. Sampang	2011	30.21	6.04	0.26	2.13	31.08	3.3
Kab. Sampang	2012	27.97	5.77	0.25	1.71	31.49	3.26
Kab. Sampang	2013	27.08	6.53	0.25	4.68	29.97	3.04
Kab. Sampang	2014	25.8	0.08	0.23	2.22	32.1	3.24
Kab. Sampang	2015	25.69	2.08	0.3	2.51	35.47	3.5
Kab. Pamekasan	2009	24.32	5.18	0.24	2.18	35.72	6.01
Kab. Pamekasan	2010	22.47	5.75	0.26	3.53	35.23	5.96
Kab. Pamekasan	2011	20.94	6.21	0.28	2.61	34.41	5.96
Kab. Pamekasan	2012	19.61	6.25	0.24	2.29	35.03	5.93
Kab. Pamekasan	2013	18.53	6.1	0.25	2.17	35.19	5.93
Kab. Pamekasan	2014	17.74	5.62	0.26	2.14	35.96	6.01
Kab. Pamekasan	2015	17.41	5.32	0.34	4.26	35.84	6.1
Kab. Sumenep	2009	26.89	4.44	0.24	2.27	39.68	4.92
Kab. Sumenep	2010	24.61	5.64	0.27	1.89	38.13	4.94
Kab. Sumenep	2011	23.1	6.24	0.27	1.99	36.78	4.95
Kab. Sumenep	2012	21.96	9.96	0.29	1.14	36.13	4.69
Kab. Sumenep	2013	21.22	14.45	0.28	2.56	32.71	4.19
Kab. Sumenep	2014	20.49	6.23	0.25	1.01	33.33	4.24
Kab. Sumenep	2015	20.2	1.27	0.26	2.07	38.59	4.93

Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kota Kediri	2009	10.41	5.06	0.3	8.32	0.31	83.65
Kota Kediri	2010	9.31	5.91	0.28	7.39	0.3	83.61
Kota Kediri	2011	8.63	7.93	0.39	9.69	0.29	81.59
Kota Kediri	2012	8.14	5.27	0.39	8.12	0.28	81.63
Kota Kediri	2013	8.23	3.52	0.33	7.92	0.27	81.51
Kota Kediri	2014	7.95	5.85	0.31	7.66	0.28	81.71
Kota Kediri	2015	8.51	5.36	0.4	8.46	0.28	81.93
Kota Blitar	2009	7.56	6.21	0.32	8.47	4.02	9.83
Kota Blitar	2010	7.63	6.32	0.33	6.66	3.92	9.51
Kota Blitar	2011	7.12	6.59	0.34	5.24	3.8	9.34
Kota Blitar	2012	6.75	6.52	0.38	3.68	3.63	9.28
Kota Blitar	2013	7.42	6.49	0.39	6.17	3.53	9.22
Kota Blitar	2014	7.15	5.88	0.35	5.71	3.47	9.34
Kota Blitar	2015	7.29	5.68	0.37	3.8	3.4	9.49
Kota Malang	2009	5.58	6.21	0.34	10.44	0.39	29.51
Kota Malang	2010	5.9	6.25	0.35	8.68	0.36	28.91
Kota Malang	2011	5.5	7.08	0.36	9.74	0.32	28.68
Kota Malang	2012	5.21	6.26	0.48	7.96	0.31	28.64
Kota Malang	2013	4.87	6.2	0.37	7.73	0.3	28.24
Kota Malang	2014	4.8	5.8	0.37	7.22	0.31	27.14
Kota Malang	2015	4.6	5.61	0.38	7.28	0.3	26.51
Kota Probolinggo	2009	21.06	5.35	0.24	8.53	9.19	17.28
Kota Probolinggo	2010	19.03	6.12	0.24	6.85	8.03	16.82
Kota Probolinggo	2011	17.74	6.58	0.33	5.46	7.26	16.68
Kota Probolinggo	2012	10.92	6.49	0.28	5.26	6.89	16.21
Kota Probolinggo	2013	8.55	6.47	0.38	4.48	6.6	16.03
Kota Probolinggo	2014	8.37	5.93	0.33	5.16	6.94	15.75
Kota Probolinggo	2015	8.17	5.86	0.36	4.01	6.82	15.73
Kota Pasuruan	2009	9.34	5.03	0.28	7.57	3.2	21.84
Kota Pasuruan	2010	9	5.66	0.27	7.23	3.06	21.49
Kota Pasuruan	2011	8.39	6.29	0.37	6.22	2.88	21.3
Kota Pasuruan	2012	7.9	6.31	0.36	4.54	2.84	21.05
Kota Pasuruan	2013	11.26	6.51	0.32	5.41	2.76	20.85
Kota Pasuruan	2014	7.34	5.71	0.31	6.09	2.7	21.07
Kota Pasuruan	2015	7.47	5.52	0.39	5.57	2.64	21.06
Kota Mojokerto	2009	7.19	5.14	0.33	9.3	0.92	12.43
Kota Mojokerto	2010	7.41	6.09	0.31	7.52	0.83	11.93
Kota Mojokerto	2011	6.89	6.62	0.36	10.59	0.75	11.45
Kota Mojokerto	2012	6.48	6.09	0.3	7.52	0.73	11.14
Kota Mojokerto	2013	6.65	6.2	0.3	5.73	0.68	11.02
Kota Mojokerto	2014	6.42	5.83	0.31	4.42	0.69	11.15
Kota Mojokerto	2015	6.16	5.74	0.36	4.88	0.68	11.26

Kab/Kota	Tahun	POV	GRO	GINI	UNP	AGR	IND
Kota Madiun	2009	5.93	6.06	0.3	11.27	1.31	18.74
Kota Madiun	2010	6.11	6.93	0.32	9.52	1.27	18.13
Kota Madiun	2011	5.66	7.18	0.33	10.62	1.12	16.97
Kota Madiun	2012	5.37	6.83	0.34	6.89	1.09	16.62
Kota Madiun	2013	8.7	7.68	0.42	6.57	1.03	16.32
Kota Madiun	2014	4.86	6.62	0.34	6.93	1	16.18
Kota Madiun	2015	4.89	6.15	0.38	5.1	0.96	16.06
Kota Surabaya	2009	6.72	5.53	0.36	8.63	0.19	20.51
Kota Surabaya	2010	7.07	7.09	0.36	6.84	0.19	19.79
Kota Surabaya	2011	6.58	7.56	0.37	7.81	0.18	19.31
Kota Surabaya	2012	6.25	7.35	0.4	5.27	0.18	19.5
Kota Surabaya	2013	6	7.58	0.37	5.32	0.19	19
Kota Surabaya	2014	5.79	6.96	0.39	5.82	0.18	19.42
Kota Surabaya	2015	5.82	5.97	0.42	7.01	0.18	19.23
Kota Batu	2009	4.81	6.99	0.25	6.88	18.66	4.8
Kota Batu	2010	5.08	7.52	0.31	5.55	18.27	4.72
Kota Batu	2011	4.74	8.04	0.32	4.82	17.68	4.58
Kota Batu	2012	4.47	7.26	0.32	3.51	17.14	4.52
Kota Batu	2013	4.77	7.29	0.31	2.3	16.46	4.5
Kota Batu	2014	4.59	6.9	0.29	2.43	16.41	4.56
Kota Batu	2015	4.71	6.69	0.36	4.29	16.3	4.66

## Lampiran 2. Hasil Regresi Penentuan Model

### Uji Chow (*Chow Test*)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ02

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.365167	(37,223)	0.0000
Cross-section Chi-square	613.025194	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/12/18 Time: 09:48

Sample: 2009 2015

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.335278	0.163011	-2.056787	0.0407
GINI	43.16607	6.813975	6.334931	0.0000
TPT	0.994131	0.216264	4.596837	0.0000
PERTANIAN	0.165371	0.024924	6.635062	0.0000
INDUSTRI	-0.028093	0.018215	-1.542273	0.1242
C	-8.682476	2.692653	-3.224506	0.0014
R-squared	0.476826	Mean dependent var		13.47797
Adjusted R-squared	0.466764	S.D. dependent var		5.827383
S.E. of regression	4.255328	Akaike info criterion		5.756519
Sum squared resid	4708.033	Schwarz criterion		5.837350
Log likelihood	-759.6170	Hannan-Quinn criter.		5.788992
F-statistic	47.39323	Durbin-Watson stat		0.292131
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Hausman (*Hausman Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ02

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.440000	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE	0.232393	0.179079	0.000254	0.0008
GINI	19.587291	22.964148	0.737649	0.0001
TPT	0.215234	0.310960	0.000902	0.0014
PERTANIAN	0.484720	0.260537	0.009423	0.0209
INDUSTRI	0.391817	0.023612	0.034638	0.0479

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/12/18 Time: 09:49

Sample: 2009 2015

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.96872	3.950616	-3.788959	0.0002
PE	0.232393	0.066014	3.520344	0.0005
GINI	19.58729	2.952355	6.634462	0.0000
TPT	0.215234	0.094701	2.272777	0.0240
PERTANIAN	0.484720	0.106870	4.535600	0.0000
INDUSTRI	0.391817	0.190143	2.060645	0.0405

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.947788	Mean dependent var	13.47797
Adjusted R-squared	0.937955	S.D. dependent var	5.827383
S.E. of regression	1.451538	Akaike info criterion	3.730109
Sum squared resid	469.8528	Schwarz criterion	4.309396
Log likelihood	-453.1044	Hannan-Quinn criter.	3.962831
F-statistic	96.38246	Durbin-Watson stat	0.817400
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

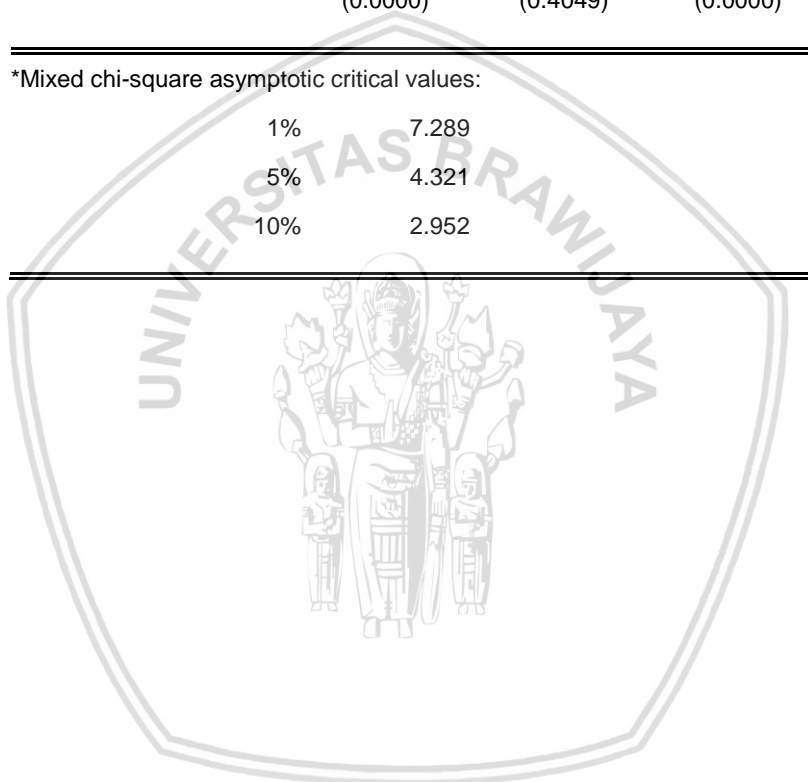
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	525.9564	0.693610	526.6500
	(0.0000)	(0.4049)	(0.0000)

\*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952





## Lampiran 3. Hasil Uji Regresi Panel

## Pooled Least Square (PLS)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/12/18 Time: 09:46

Sample: 2009 2015

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.335278	0.163011	-2.056787	0.0407
GINI	43.16607	6.813975	6.334931	0.0000
TPT	0.994131	0.216264	4.596837	0.0000
PERTANIAN	0.165371	0.024924	6.635062	0.0000
INDUSTRI	-0.028093	0.018215	-1.542273	0.1242
C	-8.682476	2.692653	-3.224506	0.0014
R-squared	0.476826	Mean dependent var	13.47797	
Adjusted R-squared	0.466764	S.D. dependent var	5.827383	
S.E. of regression	4.255328	Akaike info criterion	5.756519	
Sum squared resid	4708.033	Schwarz criterion	5.837350	
Log likelihood	-759.6170	Hannan-Quinn criter.	5.788992	
F-statistic	47.39323	Durbin-Watson stat	0.292131	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/13/18 Time: 03:34  
 Sample: 2009 2015  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.232393	0.066014	3.520344	0.0005
GINI	19.58729	2.952355	6.634462	0.0000
TPT	0.215234	0.094701	2.272777	0.0240
PERTANIAN	0.484720	0.106870	4.535600	0.0000
INDUSTRI	0.391817	0.190143	2.060645	0.0705
C	-14.96872	3.950616	-3.788959	0.0002

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.947788	Mean dependent var	13.47797
Adjusted R-squared	0.937955	S.D. dependent var	5.827383
S.E. of regression	1.451538	Akaike info criterion	3.730109
Sum squared resid	469.8528	Schwarz criterion	4.309396
Log likelihood	-453.1044	Hannan-Quinn criter.	3.962831
F-statistic	96.38246	Durbin-Watson stat	0.817400
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/12/18 Time: 09:43

Sample: 2009 2015

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.179079	0.064061	2.795443	0.0056
GINI	22.96415	2.824669	8.129855	0.0000
TPT	0.310960	0.089811	3.462401	0.0006
PERTANIAN	0.260537	0.044706	5.827727	0.0000
INDUSTRI	0.023612	0.038946	0.606264	0.5449
C	-4.077504	1.846386	-2.208370	0.0281

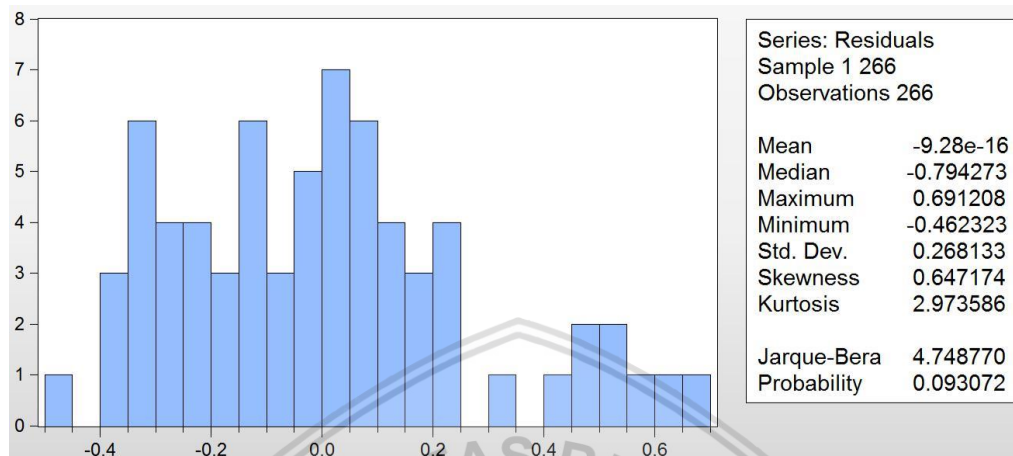
Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.609760	0.8608
Idiosyncratic random		1.451538	0.1392

Weighted Statistics			
R-squared	0.354332	Mean dependent var	2.025194
Adjusted R-squared	0.341915	S.D. dependent var	1.874815
S.E. of regression	1.520895	Sum squared resid	601.4116
F-statistic	28.53674	Durbin-Watson stat	0.733197
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.396446	Mean dependent var	13.47797
Sum squared resid	5431.370	Durbin-Watson stat	0.081186

## Lampiran 4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

### a. Normalitas



### b. Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 12/12/18 Time: 10:47  
Sample: 1 266  
Included observations: 266

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PE	0.026572	15.06149	1.028114
GINI	46.43026	102.6591	1.325116
TPT	0.046770	14.67742	1.063050
PERTANIAN	0.000621	6.318299	1.833424
INDUSTRI	0.000332	3.329581	1.398384
C	7.250380	106.5065	NA

### c. Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	7.573907	Prob. F(5,260)	0.6358
Obs*R-squared	33.81781	Prob. Chi-Square(5)	0.6242
Scaled explained SS	37.60475	Prob. Chi-Square(5)	0.5279

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 12/12/18 Time: 10:52

Sample: 1 266

Included observations: 266

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.167369	1.617474	-1.339971	0.1814
PE	0.154581	0.097920	1.578640	0.1156
GINI	12.28466	4.093149	3.001274	0.0029
TPT	0.172959	0.129910	1.331377	0.1842
PERTANIAN	-0.006069	0.014972	-0.405338	0.6856
INDUSTRI	-0.045607	0.010942	-4.168114	0.0000
R-squared	0.127135	Mean dependent var		3.222191
Adjusted R-squared	0.110349	S.D. dependent var		2.710068
S.E. of regression	2.556172	Akaike info criterion		4.737197
Sum squared resid	1698.844	Schwarz criterion		4.818028
Log likelihood	-624.0472	Hannan-Quinn criter.		4.769670
F-statistic	7.573907	Durbin-Watson stat		0.781593
Prob(F-statistic)	0.000001			

#### d. Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	236.4560	Prob. F(2,258)	0.0181
Obs*R-squared	172.1063	Prob. Chi-Square(2)	0.0155

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/12/18 Time: 10:53

Sample: 1 266

Included observations: 266

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.347008	0.098994	3.505359	0.0005
GINI	-19.41208	4.161620	-4.664548	0.0000
TPT	-0.298904	0.129715	-2.304306	0.0220
PERTANIAN	0.035919	0.014959	2.401227	0.0170
INDUSTRI	0.013691	0.010882	1.258077	0.2095
C	5.639521	1.629625	3.460625	0.0006
RESID(-1)	0.656267	0.057390	11.43523	0.0000
RESID(-2)	0.231086	0.057498	4.019058	0.0001
R-squared	0.647016	Mean dependent var	-9.28E-16	
Adjusted R-squared	0.637439	S.D. dependent var	4.214993	
S.E. of regression	2.537974	Akaike info criterion	4.730223	
Sum squared resid	1661.859	Schwarz criterion	4.837997	
Log likelihood	-621.1197	Hannan-Quinn criter.	4.773520	
F-statistic	67.55886	Durbin-Watson stat	1.773939	
Prob(F-statistic)	0.000000			